KERUSUHAN SOSIAL DI MADURA

KASUS WADUK NIPAH DAN LADANG GARAM

Direktorat
udayaan
28

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KERUSUHAN SOSIAL DI MADURA
KASUS WADUK NIPAH DAN LADANG GARAM

303.6828
Dwi
k

Tim Peneliti

Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum
Drs. Darto Harnoko
Dra. Sri Retno Astuti
S. Ilmi Albiladiyah, S.S.
Drs. Hisbaron Muryantoro

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA
TAHUN 2005

Cover : Koleksi Milik GRPT

KERUSUHAN SOSIAL DI MADURA
KASUS WADUK NIPAH DAN LADANG GARAM

303.6828
Dwi
k

Tim Peneliti

Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum
Drs. Darto Harnoko
Dra. Sri Retno Astuti
S. Ilmi Albiladiyah, S.S.
Drs. Hisbaron Muryantoro

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA
TAHUN 2005

Cover : Koleksi Milik GRPT

SAMBUTAN
KEPALA BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dapat menerbitkan buku hasil penelitian berjudul : *Kerusuhan Sosial di Madura : Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam.*

Buku ini merupakan salah satu laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum., dkk., Staf Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, dengan dukungan dana dari Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2004.

Kegiatan penelitian konflik ini didasari oleh kenyataan bahwa beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi kerusuhan sosial yang melibatkan arus bawah sehingga banyak menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, termasuk kerusuhan sosial yang terjadi di Madura, khususnya Sampang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang awal muawal terjadinya kerusuhan, dan penyebabnya. Mengingat masyarakat Madura, khususnya Sampang yang dikenal sangat agamis, namun juga terjadi kerusuhan yang menimbulkan banyak korban.Oleh sebab itu hasil penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi pemecahannya, karena pada dasarnya pembangunan harus memperhatikan budaya lokal dengan tanpa mengedepankan kedaerahan yang sempit, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Dengan telah terbit dan disebarluaskannya buku laporan hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Untuk itu kepada Tim Peneliti dan semua pihak yang telah bekerja keras membantu tersusunnya laporan ini, hingga diterbitkan buku ini kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala

Dra. Taryati

NIP. 130676861

DAFTAR ISI

	SAMBUTAN	iii
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL	vii
	DAFTAR FOTO	viii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	3
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Lingkup Studi	5
	E. Kerangka Teori	6
	F. Sumber dan Metode Penelitian	10
	G. Tinjauan Pustaka	11
	H. Sistematika Penulisan	13
BAB II.	GAMBARAN UMUM WILAYAH MADURA	16
	A. Kondisi Geografi dan Keadaan Alam	16
	B. Komposisi Penduduk	20
	C. Jaringan Transportasi	27
	D. Industrialisasi	29
	E. Madura Dalam Perubahan Zaman	34
BAB III.	KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADURA	38
	A. Stratifikasi Masyarakat	38
	B. Aktivitas Sosial, Politik, Ekonomi	40
	1. Sosial	40
	2. Politik	43
	3. Ekonomi	47
	C. Budaya	56
	D. Sistem Kepemimpinan	58
	1. Formal	58
	2. Non Formal	60
	E. Harga Diri	66
	F. Tanah dan Makam Leluhur	72

BAB IV. PEMBANGUNAN WADUK NIPAH : PROYEK YANG MENIMBULKAN GEJOLAK DI MASYARAKAT 76
A. Latar Historis Pembangunan Sarana Irigasi di Madura 77
B. Pembangunan Waduk Nipah 79
1. Lokasi dan Legenda Nipah 79
2. Rencana dan Konsep Pembangunan Waduk 83
3. Gejolak Dalam Pembangunan Waduk 85
a. Kronologi Pembebasan Tanah dan Kerusuhan 88
b. Pemicu / Penggerak 93
c. Kondisi Pasca Kerusuhan 98
4. Sikap dan Pandangan Masyarakat 102
a. Sikap dan Pandangan Ulama 102
b. Sikap dan Pandangan Non-Ulama 105
BAB V. KERUSUHAN DI LADANG GARAM TORJUN : SEBUAH SENGKETA YANG TAK KUNJUNG USAI 115
A. Latar Historis Pembuatan Garam 115
B Kondisi Masyarakat Pegaraman 124
C. Gejolak Sosial 128
D. Gerakan Petani Garam di Desa Ragung, Pangarengan dan Apaan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang 136
E. Kronologis Peristiwa Penangkapan, Penahanan dan Penyiksaan terhadap Petani Garam 140
F. Dampak : Warga Ragung, Pangarengan, dan Apaan, Tuntut Lahan Garam 1.200 ha 143

BAB VI. PENUTUP 147
A. Simpulan 147
B. Rekomendasi 149

DAFTAR PUSTAKA 151
DAFTAR INFORMAN 156
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten	17
Tabel 2.2	Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Se Madura 1961-1991.	21
Tabel 2.3	Penduduk Madura Menurut Kabupaten Tahun 1995 Dan 2000	21
Tabel 2.4	Penduduk Madura Menurut Jenis Kelamin	23
Tabel 2.5	Luas Area Perkebunan	26
Tabel 2.6	Produksi Perkebunan	26
Tabel 2.7	Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Penggunaannya	26
Tabel 2.8	Investor Besar di Madura	31
Tabel 2.9	Investor Minyak dan Gas Bumi di Madura dan Sekitarnya	32
Tabel 3.1	Penduduk Madura Berdasarkan Lapangan Pekerjaan	48
Tabel 3.2	Produk Domestik Regional Bruto	55
Tabel 5.1	Produksi Garam Briket di Kalianget dan Krampon 1904 - 1911	123

DAFTAR FOTO

Foto	1	:	Kawasan Hutan Nepa	82
Foto	2	:	Lokasi Genangan Waduk Nipah	89
Foto	3	:	Tanah Yang Akan Dibebaskan	93
Foto	4	:	Demo Mahasiswa di UGM	112
Foto	5	:	Lokasi Pintu Air di Montor	114
Foto	6	:	Ladang Garam di Torjun, Daerah Sengketa Yang Tak Kunjung Usai	124
Foto	7	:	Demo Warga Menduduki Ladang Garam	142
Foto	8	:	Demo Menuntut Pengembalian Lahan Yang Dikelola PT. Pegaraman III	144

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madura, sebuah pulau yang menjadi bagian dari wilayah Jawa Timur. Pulau yang mempunyai empat kabupaten tersebut dengan Pulau Jawa dihubungkan oleh Selat Madura. Walaupun letaknya berdekatan dengan Pulau Jawa, Madura memiliki budaya yang khas dan berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Julukan sebagai pulau penghasil "emas putih" atau garam melekat pada pulau itu, selain sebagai daerah karapan sapi.

Orang Madura dikenal sebagai orang yang temperamental, religius, berani, agresif, dan cepat marah. Stereotip tersebut, benar atau salah, sering memberikan kesan menakutkan bagi pihak luar. Gambaran orang luar yang akan pergi ke Madura pada permulaan abad XX memberi kesan bahwa Madura adalah daerah yang 'menakutkan'. Keterangan lebih lanjut dari cap tentang 'menakutkan' adalah bahwa orang-orang Madura pergi kemana-mana dengan membawa senjata, hal itu merupakan bahaya bagi sesama mereka sendiri (orang Madura) dan juga bagi kita (orang luar)[1]. Saat sekarang, sekitar satu abad kemudian, pernyataan yang muncul seperti tersebut di atas akan dilihat melalui berbagai kasus yang muncul di pulau garam tersebut.

Dalam masyarakat Madura penggunaan kekerasan fisik merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, pandangan masyarakat luar tentang orang Madura sebagai orang yang cepat marah, siap untuk membunuh lawan, dan semangat untuk *survive* di tempat lain, dari dahulu dan masih berlaku sampai sekarang. "Madura", dengan demikian masih tetap sama dengan "kekerasan". Kekerasan fisik berupa pembunuhan terhadap pihak lawan yang ada di Madura, mempunyai akar budaya yang cukup lama. Pembunuhan terhadap lawan untuk mempertahankan harga diri, bagi masyarakat Madura dikenal dengan istilah *carok*[2]. *Carok* terdapat di seluruh Madura dan daerah-daerah

---

[1] Dikutip dari Java Post oleh Elly Touwen-Bouwsma, "Kekerasan di Masyarakat Madura", dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi. Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 159.

[2] Carok adalah penggunaan kekerasan fisik oleh seseorang untuk menghabisi lawannya dengan memakai senjata tajam berupa celurit. Penyebab langsung *carok* adalah perasaan terhina. Di Madura ada pepatah yang berbunyi "lebih baik berputih tulang daripada berputih mata". Arti pepatah tersebut lebih kurang "kalau hanya bagian putih mata, anda tidak akan berani menatap musuh. Mati lebih disukai daripada hidup dengan menanggung rasa malu karena penghinaan".

tempat tinggal orang Madura, seperti Surabaya dan Jawa bagian timur. Dari seluruh Madura, Bangkalan dan Sampang merupakan dua wilayah yang terkenal dengan peristiwaperistiwa *carok,* dibandingkan dengan dua daerah lain yakni Pamekasan dan Sumenep.

Ilustrasi di atas sengaja dipaparkan untuk mengantar pada bagian inti dari penelitian ini tentang kerusuhan sosial di Madura. Disadari atau tidak, berbagai kerusuhan sosial yang ada di Indonesia pada masa transisi pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi, ada peristiwa-peristiwa yang melibatkan etnis Madura, seperti peristiwa di Kalimantan Barat, antara orang Dayak dan orang Madura, juga yang terjadi Kalimantan Tengah, antara penduduk setempat dengan orang Madura[3]. Konflik yang terjadi di kedua tempat itu tergolong konflik etnis. Sementara itu, di Madura sendiri konflik seringkali muncul baik itu antar partai politik, antara masyarakat petani dengan pemerintah atau antara ulama dengan pemerintah. Oleh karena itu, bisa dikatakan konflik yang muncul ada yang bersifat vertikal maupun horizontal. Beberapa konflik yang ada di Madura antara lain pertentangan antara pemerintah dan ulama Madura seputar pembangunan jembatan Suramadu[4], konflik masyarakat seputar pembangunan waduk Nipah[5], juga tentang peristiwa Jengrik[6], dan juga kasus di ladang garam. Dua kasus yakni insiden Nipah dan peristiwa penangkapan petani di ladang garam masuk wilayah Sampang. Peristiwa-peristiwa yang disebut di atas terjadi pada dasawarsa terakhir abad XX, dan sampai saat ketika penelitian dilakukan masih dalam kondisi "kompromi" dari beberapa pihak yang terkait.

Apabila kita tengok lebih ke belakang, maka sederetan peristiwa yang melibatkan etnis Madura dalam berbagai konflik akan tergambar cukup banyak, setidaknya bisa dimulai dari perlawanan Trunojoyo (1677 - 1680)[7], juga tokoh Cakraningrat IV yang merupakan aktor utama dalam hubungan

---

[3] Riwanto Tirtosudarmo, "Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah", *Analisis*, CSIS Tahun XXXI/ 2002 No. 3 (Jakarta: CSIS, 2002), hlm. 341 - 342.

[4] Baca Muthmainnah, *Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi* (Yogyakarta: LKPSM, 1998).

[5] Mochtar Mas'oed, dkk., (ed.), *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu* (Yogyakarta: P3PK UGM, 2001), hlm. 175 - 177.

[6] *Ibid.*, hlm. 185 - 187.

[7] Baca Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa. Relasi Hubungan Pusat Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726 1745)* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 127 - 128.

antara pusat dan daerah, khususnya antara Keraton Kartasura dengan Madura (1719 - 1745)[8]. Konflik antara orang Madura yang berkecimpung dalam bidang pembuatan garam dengan pemerintah kolonial juga sering terjadi, yang dipicu oleh adanya monopoli pemerintah[9]. Perebutan ladang garam itu ternyata berlanjut sampai pada masa Republik. Tahun 1882 di Bangkalan terjadi pemogokan petani yang menolak kerja wajib, dan tahun 1895 di Sampang seorang kyai menyebarkan ajaran yang oleh pemerintah kolonial dianggap membahayakan kedudukan pemerintah[10]. Pada awal abad XX, beberapa kali Madura membuat pusing pemerintah kolonial dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat Madura terutama mereka yang tergabung dalam organisasi Sarekat Islam (SI)[11].

Apabila dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi Madura atau yang melibatkan etnis Madura, maka akan tampak deretan panjang tentang catatan konflik. Khusus peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir dasawarsa abad XX antara lain peristiwa Nipah, Jengrik, dan Bangkalan serta perebutan ladang garam, sepertinya tidak lepas dari fenomena kekerasan dan keresahan sosial yang melanda Indonesia. Permasalahannya adalah mengapa muncul berbagai gejolak sosial di Madura. Masalah itu cukup menarik untuk dikaji mengingat Madura mempunyai budaya lokal yang penuh dengan muatan agama, namun juga mempunyai budaya "keras" dalam bentuk *carok* yang oleh masyarakat luar hal itu penuh juga dengan muatan konflik. Walaupun ada perbedaan antara konflik dan kekerasan yang timbul untuk menebus harga diri (*carok*) dengan konflik dan kekerasan yang lainnya. Sudah barang tentu faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik juga bermacam macam.

B. Permasalahan

Dinamika dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan mengelola kemajemukan bukan pekerjaan yang mudah. Membangun konsensus dalam perbedaan merupakan pekerjaan yang cukup

---

[8] *Ibid.*, hlm. 239 - 498.

[9] Baca Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850 - 1940* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).

[10] *Ibid.*, 591 - 592.

[11] Kuntowijoyo, "Agama Islam dan Politik: Gerakan - Gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura, 1913 - 1920" dalam Huub de Jonge, *op. cit.*, hlm. 83 - 110.

sulit. Apabila kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat, pengalaman itu banyak muncul dalam kehidupan. Menguatnya konflik dan kekerasan yang melibatkan negara dan masyarakat, sengketa antarkelompok etnis, sentimen agama, perselisihan antarpartai politik, penyerangan antarwarga kampung, dan lainnya menjadi bukti kerawanan dan kerentanan masyarakat dalam situasi konflik. Berbagai kasus kerusuhan dan kekerasan itu tidak jarang memicu bentrokan fisik yang banyak membawa korban harta benda bahkan nyawa[12]. Di samping itu juga muncul trauma, ketakutan, dan hilangnya lembaga sosial akibat konflik yang berlarut-larut. Konflik dan kekerasan yang muncul di daerah mempunyai latar belakang, model, dan dampak yang berlainan. Oleh karena itu, penelitian tentang konflik dan kerusuhan yang terjadi di Madura perlu dilakukan agar tidak terulang lagi.

Konflik dan kerusuhan sosial di Indonesia dapat disebabkan oleh dua kondisi, yakni kondisi primer dan sekunder. Kondisi primer menyangkut a) terdesaknya akses kelompok tertentu, kekuasaan dan sumber daya, b) keterdesakan terjadi lewat proses yang dianggap tidak atau kurang adil, c) penguasa baru atas akses dan sumber daya adalah para pendatang, d) para pendatang berbeda suku, ras, dan agama, e) etnosentrisme dan ekslusivisme. Kondisi sekunder meliputi a) rasa keadilan setempat yang tidak terpenuhi, b) aparat pemerintah yang tidak peka terhadap keadaan tertentu, c) aparat pemerintah yang memihak salah satu kelompok, d) kesadaran kesatuan bangsa yang masih lemah, dan e) pengetahuan budaya lokal yang sangat kurang.[13]

Konflik yang terjadi di Madura dari segi waktu dan intensitasnya, yang terjadi pada dasawarsa terakhir abad XX, apabila dibandingkan dengan kasus yang terjadi di daerah lain, termasuk yang agak 'mudah untuk dipahami'. Anggapan dasar yang dibangun dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor empiris seperti ketidakadilan sosial - ekonomi, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan antara penguasa dan masyarakat, lemahnya kohesitas budaya serta lemahnya kontrol sosial dapat menyebabkan konflik baik vertikal maupun horizontal.

---

[12] "Menanti Kelahiran Komisi Penengah Konflik Agraria", *Kompas*, 25 Juni 12004.

[13] Heddy Shri Ahimsa - Putra, "Pluralitas Budaya dan Kekerasan Massal: Apakah Hubungannya? *Makalah*. Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2001.

Dengan melihat uraian di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Kapan dan dimana kerusuhan itu muncul serta seberapa jauh cakupannya?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik itu muncul?
3. Konflik apa saja yang muncul di masyarakat?
4. Bagaimana model konflik yang terjadi?
5. Apa dampak dari konflik dan solusi yang ditawarkan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mendeskripsikan keresahan, konflik maupun kerusuhan yang terjadi di Madura, khususnya daerah Sampang. Gambaran yang akan dipaparkan dalam penelitian ini meliputi latar belakang, peristiwa dan solusi yang dihasilkan. Kedua, diharapkan dari pendeskripsian dan pengkajian ini, akan bisa diketahui akar permasalahan yang sebenarnya mendasari munculnya konflik, dan dapat mengidentifikasi pola dan model konflik yang ada di Sampang. Hasil dari penelitian ini dengan demikian dapat dipakai sebagai masukan pada berbagai kalangan yang mempunyai *concern* terhadap masalah konflik dan kerusuhan yang banyak terdapat di Indonesia, dan khususnya daerah Sampang Madura.

D. Lingkup Studi

Penelitian ini mengambil subjek di daerah Madura, Jawa Timur. Pemilihan ini berdasarkan asumsi bahwa di daerah itu masyarakatnya mempunyai temperamen keras. Di samping itu, masyarakat di daerah tersebut juga mempunyai mobilitas yang cukup tinggi dengan menjadi pekerja di daerah lain. Dalam melihat kerusuhan sosial yang ada secara lengkap di seluruh Madura tentulah sangat tidak memungkinkan. Oleh karena itu pilihan yang cukup menarik adalah mengambil daerah Sampang. Daerah itu dipilih untuk mendalami sebuah kasus kerusuhan antara lain karena di Sampang pernah ada kasus yang cukup banyak mendapat sorotan publik, yakni pembangunan waduk Nipah yang sampai sekarang belum jelas kelanjutannya. Di samping itu, ada pula kasus-kasus yang muncul pada masa 'transisi' antara masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Bahkan ada kasus yang terjadi sejak

masa kolonial sampai pada masa sekarang dan masih tetap suram, yakni kasus sengketa ladang garam.

Dari beberapa pilihan kasus yang ada di Madura, pilihan akhirnya jatuh pada dua kasus yang terjadi di Sampang, yakni kasus sengketa antara penduduk Banyuates dengan pemerintah dalam pembangunan waduk Nipah dan kasus ladang garam yang juga melibatkan pemerintah dan masyarakat atau petani garam. Pembangunan Waduk Nipah di daerah Banyuates direncanakan akan bisa mengairi delapan desa dari duapuluh desa di Kecamatan Banyuates, Sampang. Pembangunan yang mulai dicanangkan sejak tahun anggarana 1981/1982 itu, saat ini (tatkala penelitian dilakukan) sedang dalam tahap "pembangunan" setelah beberapa lama terhenti, akibat mendapat penolakan dari warga dan ulama. Dalam kasus sengketa ladang garam, permasalahan menjadi lebih rumit, warga mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka dan mereka menolak kehadiran PT Garam yang dianggap merugikan. Kedua kasus tersebut walaupun tidak bisa dianggap sebagai representasi kasus kerusuhan di Madura, namun setidaknya bisa dilihat pola dan model dari gejolak sosial yang muncul.

Mengapa dasawarsa terakhir abad XX diambil sebagai lingkup penelitian hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pada masa itu di beberapa wilayah Indonesia dilanda kerusuhan massal. Fenomena itu dapat pula dilihat di Madura, khususnya Sampang. Di samping itu, sampai sekarang kasus tersebut belum bisa dibilang 'selesai' karena kedua kasus tersebut masih dalam rangka 'kompromi'. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pembahasan hanya sampai pada peristiwa yang terekam tatkala penelitian dilakukan.

E. Kerangka Teori

Dengan sedikit variasi proses perkembangan dari keresahan menjadi konflik dan kekerasan atau kerusuhan, secara akademis bisa dijelaskan sebagai berikut. Keresahan yang dirasakan masyarakat dapat diredam kalau masyarakat mengundurkan diri dari masalah. Apabila tidak bisa, perasaan tersebut akan terus menumpuk dalam emosi yang tinggi sehingga yang kemudian muncul adalah kerusuhan (*riot)* yang dilakukan oleh banyak orang terhadap benda maupun manusia. Dari segi sosiologis keresahan sosial dapat

dibedakan menjadi dua, yakni keresahan tertutup atau (*latent)* dan terbuka (*open)*. Apabila sudah diketahui pihak-pihak mana yang terlibat dapat digunakan istilah konflik tertutup dan konflik terbuka.[14]

Oleh karena itu, ada tahapan solusi yang muncul dari rasa resah masyarakat sampai menjadi kerusuhan maka perlu disepakati beberapa konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain tentang keresahan, konflik, kekerasan dan kerusuhan. Dalam berbagai kasus beberapa kata seperti konflik terbuka, kekerasan dan kerusuhan dipakai secara bergantian yang menunjuk pada kondisi adanya konflik terbuka dalam masyarakat yang diikuti dengan tindak kerusuhan dan kekerasan.

Dalam wacana ilmu sosial, membicarakan konflik, hampir tidak bisa dipisahkan dari Karl Marx yang *notabene* merupakan tokoh yang memunculkan teori-teori konflik. Namun sebenarnya membahas mengenai konflik itu sendiri pangkal permasalahannya terletak pada bagaimana sebuah kehidupan masyarakat itu terbentuk? Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang berbeda, pandangan yang pertama meyakini bahwa sebuah masyarakat itu terbentuk sebagai hasil dari persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, hasil konsesus umum (*a consensus omnium)* atau persetujuan bersama (*volonte generale)*. Pandangan kedua mengatakan bahwa ikatan dan tata kehidupan dalam masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan, atas dasar dominasi satu golongan tertentu dan penundukan terhadap golongan lainnya. Dalam pandangan yang kedua inilah kita temukan bagaimana kelompok-kelompok dalam masyarakat itu bertentangan sesuai dengan kepentingannya. Permasalahan ini mempunyai korelasi dengan pandangan-pandangan Marx.[15] Konflik itu sendiri adalah pertentangan antarbanyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada.[16] Konflik dengan demikian menjadi tidak terelakkan, yang dapat bersifat positif maupun negatif. Aspek positif dari konflik ketika konflik membantu mengidentifikasikan sebuah proses yang tidak dapat berjalan

---

[14] Selo Soemardjan, "Konflik-Konflik Sosial Di Indonesia: Refleksi Keresahan Masyarakat", *Analisis,* CSIS Tahun XXXI/2002 no. 3 (Jakarta: CSIS, 2002), hlm. 306 - 321.

[15] George Ritzer, *Modern Sosiological Theory* (Singapore: McGraw-Hill Book Co, 1992), hlm. 145.

[16] Sebagaimana yang dikutip Bruce Mitchell, dkk. Dari Johson dan Duiker. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 365.

secara efektif, mempertajam gagasan, dan menjelaskan kesalahpahaman. Konflik juga akan bermanfaat yaitu ketika mempertanyakan *staus quo,* maka sebuah proses yang kreatif bisa muncul. Sebaliknya konflik menjadi negatif jika diabaikan, karena konflik yang tidak terselesaikan merupakan sumber kesalahpahaman, ketidakpercayaan, serta bias. Konflik menjadi buruk apabila menyebabkan semakin meluasnya hambatan-hambatan untuk saling bekerja sama antarberbagai pihak.[17] Seperti yang telah ditulis di depan apabila konflik tidak dapat ditangani secara baik kemungkinan besar akan menimbulkan bentrokan antarpihak yang terlibat, sehingga tidak jarang menimbulkan kerusuhan dan kekerasan fisik.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan? Kekerasan adalah *'behavior involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something'*.[18] Klasifikasi kekerasan yang terjadi di Indonesia pada kurun 1990-2001 menurut UNSFIR (*United Nations Supporting Facilities for Indonesian Recovery*) terbagi dalam empat kelompok yakni: 1) kekerasan komunal, 2)kekerasan separatis, 3) kekerasan negara masyarakat, dan 4) kekerasan hubungan industrial.[19]

Dari berbagai klasifikasi dan definisi yang muncul tentang kekerasan maka ada 3 pendekatan yang dipakai untuk menganalisa kekerasan yang terjadi di Indonesia. Pendekatan pertama adalah melalui pola induksi, kedua pendekatan struktural, dan ketiga psikologis. Pendekatan induktif, berusaha menjelaskan fenomena kekerasan yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu yang spesifik. Pola ini digunakan oleh Djuli dan Jereski untuk melihat konflik sumber daya yang terjadi di Aceh dan Papua.[20] Pendekatan strukturalis melihat gelombang kekerasan di Indonesia diakibatkan antara lain karena lemahnya struktur negara (*weak state*).[21] Dalam suatu negara lemah, kebijakan politik yang diambil dipengaruhi oleh ketidaksatabilan politik, krisis legitimasi, lemahnya identitas nasional, tidak berfungsinya institusi sosial politik,

---

[17] *Ibid.*

[18] New Oxford Dictionary, *The New Oxford Dictionary of Ingslish* (Oxford: Claredon, 1998), hlm. 2063.

[19] Riwanto Tirtosudarmo, "Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah" dalam *Analisis,* CSIS Tahun XXXI/2002 no. 3 (Jakarta: CSIS, 2002), hlm. 341.

[20] Andi Widjajanto dan Laila Hasnah, "Gelombang Kekerasan di Indonesia Sebagai Masalah Fenomenologis", *Analisis,* CSIS tahun XXXI/ 2002 No. 3 (Jakarta: CSIS, 2002), hlm. 354.

[21] *Ibid.*, hlm. 355.

kemiskinan ekonomi dan sangat rentan terhadap tekanan luar. Hal itu membuat elite politik terus menerus berada dalam *process of crisis management*. Dengan kondisi tersebut tidak jarang elite politik menggunakan alokasi sumber daya dan penguasaan terhadap kekayaan negara sebagai alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan. Pendekatan ketiga adalah dari sudut psikologis, tokoh yang mengembangkan penelitian dengan sudut pandang itu, antara lain Nordholt, yang menekankan tentang pembentukan budaya kekerasan di Indonesia.[22] Tulisan Henk S. Nordholt yang diterbitkan KLTLV, memuat tentang gelombang kekerasan yang terjadi di Indonesia sejak masa kerajaan sampai masa Orde Baru. Nordholt dengan pendekatan psikologis beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi sebagai sebuah *genealogy of violence. Genealogy of violence* yang terbentuk tampak dari adanya kesinambungan teror yang melegitimasi dengan menggunakan kekerasan oleh negara (*state sponsored violence*). Pendapat Nordholt didukung oleh William H. Frederick yang menganggap bahwa penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah-masalah politik terlembaga dan secara sengaja dieksploitasi oleh pemimpin politik dan militer sepanjang periode revolusi kemerdekaan.

Berbicara tentang kekerasan atau kerusuhan sosial tentunya tidak lepas dari konflik yang terjadi di masyarakat. Kekerasan atau kerusuhan sosial yang muncul di berbagai daerah di Indonesia sering kali muncul bersamaan dengan proses pembangunan. Aloysius Gunadi Brata mengambil dari Bangura, menulis bahwa konflik yang sistemik dapat dipakai sebagai kritik terhadap pembangunan.[23] Dalam hal ini, pembangunan yang kerap dipahami begitu sarat muatan ekonomi, tidak akan dapat berkelanjutan jika kebijakan-kebijakan tidak sensitive terhadap marginalisasi, ketidakadilan sosial dan ketidakseimbangan politik. Sementara itu, Collier memaparkan dampak dari diversitas etnis terhadap kinerja ekonomi dan resiko terjadinya konflik kekerasan.[24]

---

[22] Henk S. Nordholt, "A Geneology of Violence", dalam Freek Colombijn and J. Thomas Linbald (eds.), *Roots of Violence in Indonesia. Contemporary violence in historical perspective* (Leiden: KITLV Press, 2002).

[23] Aloysius Gunadi Brata, " Konflik di Masa Krisis: Studi Empiris Determinasi Ketidakadilan Sosial Ekonomi", *Analisis*, CSIS Tahun XXXI/2002 No. 3 (Jakarta: CSIS, 2002), hlm. 325.

[24] *Ibid.*, hlm 327.

F. Sumber dan Metode Penelitian

Ilmu sejarah sebagai sebuah ilmu yang mencoba mengkaji dan merekonstruksi persoalan masa lampau manusia, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan-bahan peninggalan masa lampau. Peninggalan masa lampau tersebut harus dicari dengan sebuah metode. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan usaha-usaha sejarawan dalam "pemburuan" jejak-jejak masa lampau yang oleh masa kini dianggap sebagai sumber sejarah. Dalam "pemburuan" tersebut harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sistematis dan seperangkat aturan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis dan menyajikan sistesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Penelitian ini secara temporal mengambil masa yang relatif masih "baru". Oleh karena itu, dalam penggaliaan sumber, metode yang menarik adalah menggunakan sumber lisan dengan praktek wawancara dan dokumen. Nara sumber dipilih berdasarkan atas saksi langsung atas peristiwa yang terjadi, dan juga mereka yang mengetahui "peristiwa" itu walaupun tidak berada di tempat kejadian. Nara sumber itu dapat diidentifikasi lagi berdasarkan peran dan kapasitas yang dimiliki, misalnya aparat pemerintah, petani yang lahannya tergusur, ulama, atau dari pihak intelektual yang *concern* terhadap Madura. Sudah barang tentu kesaksian yang didapat dari nara sumber akan banyak variasi berkaitan dengan topik yang diambil. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa pada kedua kasus tersebut, dari data awal yang berhasil didapat, terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antara banyak pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penelitian ini selain menggunakan sumber primer juga didukung oleh sumber sekunder yang di dapat dari tulisan-tulisan yang sudah dipublikasi maupun karya tulis yang belum dipublikasi. Karya tulis yang terkait dengan tema penelitian meliputi makalah, buku-buku, artikel, hasil penelitian, dan sebagainya, dikumpulkan dari berbagai perpustakaan, baik di Yogjakarta, Surabaya, Jakarta, dan juga Jember.

Data yang telah terkumpul dan terseleksi kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan gambaran yang interpretif. Analisis dilakukan secara rinci meliputi tata nilai, agama, kebudayaan, pandangan hidup, dan

juga adat istiadat yang berlaku di tanah Madura. Dari serangkaian data itu diharapkan dapat diketahui bagaimana masyarakat Madura melihat dan terlibat dalam proses sejarah daerahnya yang sedang membangun. Diskripsi dan analisis tentang budaya setempat diangkat agar kasus penolakan dan kerusuhan yang terjadi di Sampang bisa dilihat secara komprehensif. Selanjutnya bisa dipakai sebagai acuan agar dalam "pembangunan" yang lain tidak ada lagi penolakan dan kerusuhan.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pusataka disertakan dalam penelitian ini, agar terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan tulisan sebelumnya. Pustaka yang dipakai pada bagian ini akan mengambil materi yang berkaitan dengan tulisan-tulisan tentang Madura dan tentang konflik. Tulisan mengenai Madura, ada banyak pakar yang sudah menulis, antara lain Huub de Jonge,[25] Kees van Dijk,[26] Kuntowijoyo,[27] dan lainnya. Buku yang di tulis oleh beberapa peneliti dengan Huub de Jonge sebagai editor berjudul *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi. Studi-studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura* memuat potret Madura dalam tiga tema yakni Islam, kebudayaan, dan ekonomi. Buku yang cukup menarik ini diawali dengan tulisan yang membahas perkembangan hubungan politik selama pemerintahan kolonial tidak langsung di Sumenep. Kemudian diikuti 3 tulisan yang membahas arti penting agama Islam, yakni tentang SI lokal, hubungan Islam dan ekonomi serta pengaruh Islam dalam orientasi politik masyarakat Madura. Tulisan lain adalah mengenai kepemimpinan di masyarakat Madura. Satu tulisan yang disusun oleh Elly Touwen-Bouwsma membahas tentang budaya kekerasan di Madura yang muncul dalam bentuk *carok*. Enam tulisan berikutnya berisi sastra, musik, pertanian, profesi sektor informal, pentingnya karapan sapi, dan hubungan ketergantungan dalam perikanan di Madura.

---

[25] Huub de Jonge, (ed.), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi. Studi-studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).

[26] Kees van Dijk (ed.), *A Cross Madura Strait: The Dynamics of an Insular Society* (Leiden: KITLV Press, 1995).

[27] Kuntowijoyo *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris, Madura 1850 1940.* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).

Buku yang diedit oleh Kees van Dijk (*et.al*) berisi tentang berbagai tema yang semua bertalian dengan Madura. Tema yang dibahas antara lain mengenai budaya, politik, kepemimpinan, industrialisasi, dan seni. Buku berjudul *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850 - 1940*, tulisan Kuntowijoyo berisi tentang keunikan Madura dalam ekohistori. Madura terbentuk dari sistem ekologi tegal yang khas, berbeda dengan tempat lain yang berekologi sawah atau ladang. Ekologi tegal menurut Kuntowijoyo membentuk sebuah pola pemukiman berpencar, tingkat migrasi keluar yang cukup tinggi, struktur dan organisasi sosial ekonomi, pola kepribadian yang berpusat pada individu dan kepemimpinan yang dipegang oleh kaum ulama. Bab terakhir dari buku itu, kembali Kuntowijoyo mempertanyakan apakah tesis yang dibangun sekitar 60 tahun yang silam masih cocok untuk melihat Madura pada saat ini. Pada bab itu berisi beberapa peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1990-an.

Masih tentang Madura, tulisan Andang Subaharianto dan kawan-kawan yang berjudul *Tantangan Industrialisasi di Madura Membentur Kultur Menjunjung Leluhur*[28] banyak memberi inspirasi tentang resistensi petani Madura khususnya daerah Bangkalan dalam menerima industrialisasi. Buku tersebut banyak membahas tentang karakteristik masyarakat Madura. Kasus yang diambil sebagai pokok bahasan adalah mengenai resistensi petani terkait dengan pembangunan jembatan Suramadu. Buku tersebut sedikitpun tidak membahas tentang pembangunan waduk Nipah, yang sebenarnya juga sama-sama tentang industrialisasi di Madura. Oleh karena itu, antara buku tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini jelas ada perbedaannya, baik objek maupun wilayah kejadian.

Tulisan yang membahas tentang kekerasan yang terjadi di sejumlah tempat di Indonesia dapat dijumpai dari buku *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu*,[29] oleh Mochtar Mas'oed, dkk., terbitan P3PK UGM tahun 2001. Buku tersebut berisi tulisan dari beberapa peneliti yang mengupas tentang 20 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1995 - 1997. Di samping berisi kronologi dari sebuah peristiwa kerusuhan, buku itu juga menyajikan

[28] Andang Subaharianto, dkk., *Tantangan Industrialisasi di Madura Membentur Kultur Menjunjung Leluhur* (Malang: Bayumedia, 2004)

[29] Mochtar Mas'oed, dkk., (ed), *op. cit.*, hlm. 167 189.

kondisi-kondisi dan faktor pemicu munculnya kerusuhan. Buku tersebut dalam salah satu babnya khusus membahas tentang kekerasan yang terjadi di Sampang. Walaupun data yang di-*cover* untuk tulisan itu cukup banyak namun untuk sumber lisan masih relatif sedikit. Penelitian itu akan lebih valid apabila nara sumber yang dipakai berasal dari berbagai golongan yang mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi di Madura.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama dari tulisan ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup dan sumber serta kerangka konsep. Pertanggungjawaban penelitian secara akademis juga menjadi bagian dari bab pertama ini. Bab ini merupakan pengantar untuk menuju bab-bab selanjutnya. Antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bab kedua berupaya menguraikan tentang kondisi Madura untuk memberikan informasi kepada pembaca keadaan terakhir Madura. Pada saat penelitian dilakukan pembangunan Waduk Nipah dan sengketa di ladang garam masih dalam kondisi "kompromi". Bab ini diawali uraian tentang kondisi geografi dan keadaan alam pulau Madura. Di samping itu juga mengulas tentang komposisi penduduk, jaringan transportasi, industrialisasi, dan Madura yang sedang mengalami perubahan zaman. Asumsi pokok pada bab ini adalah lingkungan alam Madura yang kering, tandus dengan struktur tanah berkapur, dan suplai air yang terbatas, mempengaruhi jenis pertanian yang pada gilirannya juga berpengaruh pada struktur sosial masyarakat. Tanah di Madura yang mengandung batu kapur, suatu kondisi yang tidak banyak memberi kemungkinan pada masyarakat untuk menanam padi. Kondisi tanah yang kering juga menyebabkan masyarakat Madura mengolah tanahnya dengan sistem ekologi tegalan, yang menghasilkan palawija, seperti jagung, ketela, ubi, kacang, dan beberapa jenis tanaman lainnya. *Tegal* merupakan jenis lahan yang dominan.

Bab dua juga mendiskusikan tentang perubahan sosial yang terjadi di Madura baik dari segi geografi, ekonomi maupun politik. Asumsi yang dibangun dalam subbab ini adalah bahwa masyarakat Madura sampai saat penelitian dilakukan, telah banyak mengalami perubahan, terutama yang

berkaitan dengan lapisan yang bergerak cepat, yakni bidang politik. Dalam bidang politik secara detail akan dibahas dalam bab III.

Bab ketiga mendiskusikan tentang karakteristik masyarakat Madura. Ulasan ditekankan pada stratifikasi sosial masyarakat, aktivitas masyarakat, sistem kepemimpinan, harga diri, tanah dan penghormatan terhadap makam (*buju'*). Kombinasi antara ekologi Madura yang didominasi oleh lahan tegal dengan budaya masyarakat memberi corak yang khas pada masyarakat Madura. *Buppa-babu, guru,ratoh,* merupakan unsur penentu dalam dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik di Madura. Orang Madura sangat patuh pada tokoh panutan, yakni kyai, yang dalam struktur masyarakat menempati posisi yang tinggi. Kehidupan keagamaan yang cukup kental pada masyarakat dipadukan dengan budaya lokal yang kuat, menjadi karakteriktik yang khas pada masyarakat Madura. Pemahaman tentang karakteristik masyarakat yang komprehensif diangkat agar dapat dijadikan cermin untuk memahami berbagai kerusuhan yang terjadi di Madura.

Pembahasan pada bab keempat difokuskan pada gejolak sosial yang terjadi seputar pembangunan Waduk Nipah di Kecamatan Banyuates, Sampang. Pembahasan diawali dengan uraian tentang pembangunan sarana irigasi yang dilakukan di Madura sejak masa kolonial. Bahasan dilanjutkan pembangunan Waduk Nipah yang sempat menuai protes dari warga masyarakat dan juga membawa korban penduduk Banyuates, akibat terkena tembakan dari aparat. Warga yang merasa kehormatannya diabaikan menolak tanahnya digusur, sehingga pembangunan waduk memerlukan waktu "kompromi" yang cukup lama sampai akhirnya projek itu jalan kembali. Bab keempat juga membahas tentang sikap dan komentar warga tentang pembangunan Waduk Nipah.

Bab V mendiskusikan tentang gejolak sosial yang terjadi di daerah ladang garam di wilayah Kecamatan Torjun. Sengketa di ladang garam bisa dibilang akarnya sudah cukup lama, sejak masa kolonial sampai akhir abad XX, prosesnya tidak kunjung usai. Sengketa antara warga masyarakat (pemilik tanah dan pembuat garam) dengan pemerintah dalam hal ini dengan PN Garam, seputar hak kepemilikan lahan, hak penggarap, upah, dan monopoli harga, menjadi isu yang selalu mencuat ke atas. Warga pun melakukan *counter*

terhadap keberadaan PN Garam dengan cara *reclaiming* lahan. Aksi yang dilakukan warga mengakibatkan beberapa orang di tahan oleh pihak yang berwajib, dan bahkan ada yang dianiaya. Sampai saat penelitian dilakukan kasus tersebut belum selesai.

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH MADURA

Madura, daerah yang sekarang mempunyai empat kabupaten itu telah mengalami dinamika yang cukup beragam. Namun ada segi-segi tertentu yang prosesnya bisa dibilang lambat atau pelan, seperti kondisi geografi. Dalam bidang lain, seperti budaya, ekonomi, politik, Madura menampakkan perubahan yang dinamis. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas tentang kondisi geografi, keadaan alam, transportasi, industrialisasi, dan juga Madura yang sedang mengalami perubahan.

A. Kondisi Geografi dan Keadaan Alam

Pulau Madura terletak di timur laut Jawa kurang lebih 7° sebelah selatan dari khatulistiwa di antara 112 bujur barat dan 114 bujur timur. Luas Pulau Madura lebih kurang 5.304 km^2. Panjangnya kurang lebih 190 km dan jarak yang terlebar 40 km. Pantai utara merupakan suatu garis panjang yang hampir lurus. Pantai selatannya di bagian timur mempunyai dua teluk yang besar terlindung oleh pulau-pulau, gundukan pasir dan batu-batu karang. Batas Pulau Madura adalah: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Madura.

Secara administratif pulau Madura yang dulunya tergabung dalam sebuah eks Karesidenan Madura merupakan salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Eks Karesidenan Madura ini secara administratif dibagi menjadi empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Selanjutnya tiap-tiap kabupaten dibagi dalam beberapa kecamatan serta kelurahan. Selain itu, Pulau Madura juga mempunyai kawasan kepulauan sebanyak 67 pulau-pulau kecil yang hampir semuanya terletak di Kabupaten Sumenep dan hanya satu di Kabupaten Sampang.[1]

[1] Dinas Pariwisata, *Jawa Timur, Madura Pulau Pesona* (Surabaya: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tmur, 1993), hlm. 13.

Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten

No	Keterangan	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep	Jumlah
1	Pembantu Bupati	5	4	4	7	20
2	Kecamatan	18	12	13	25	68
3	Desa	273	180	178	328	959

Sumber: *Jawa Timur Membangun, 1993*

Secara geologis Madura merupakan kelanjutan bagian utara Jawa, kelanjutan dari pengunungan kapur yang terletak di sebelah utara dan di sebelah selatan lembah Solo. Lingkungan alam Madura didominasi oleh struktur tanah yang tersusun dari batuan kapur dan endapan gamping. Lapisan *aluvial* terdapat disepanjang pantai utara dan keempat dataran sungai. Lapisan batuan kapur di utara, selatan, pantai selatan dan timur merupakan kelanjutan dari formasi batuan kapur yang memanjang dari Grobogan ke arah timur menyusuri bagian utara Jawa Timur.[2] Bukit-bukit kapur di Madura merupakan bukit-bukit yang lebih rendah, lebih kasar dan lebih bulat daripada bukit-bukit di Jawa dan letaknya pun lebih bergabung. Secara keseluruhan panjang dari Pulau Madura ± 190 km, lebarnya dari utara ke selatan lebih kurang ± 40 km, sedangkan luasnya ± 5.304 km^2.

Topografinya menunjukkan bahwa Pulau Madura termasuk dataran rendah tanpa pegunungan utama dengan ketinggian rata-rata 25 m dari atas permukaan laut.[3] Sebagian besar tanahnya terdiri dari bukit-bukit kapur sehingga tanahnya agak tandus. Hal ini bisa dilihat pada permukaan tanahnya yang merupakan susunan batu kapur dan endapan kapur. Bila dilihat dari geologinya, tanah di Pulau Madura berupa tanah yang berwarna merah kekuning-kuningan, merupakan campuran dari pasir kuarsa dan mineral lainnya dan sebagian lagi berupa tanah *aluvial*. Keduanya bisa dimanfaatkan untuk areal pertanian, meskipun hanya areal pertanian lahan kering. Sedangkan tanah vulkanis tidak ditemukan karena memang di Pulau Madura

[2] Diambil dari Andang Subaharianto, dkk., *Tantangan Industrialisasi Madura (Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 17-18.

[3] Muthmainnah, *Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi.* (Yogyakarta: LKPSM, 1988), hlm. 17.

tidak ada gunung berapi.[4]

Seperti di wilayah Indonesia lainnya, Pulau Madura juga memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di daerah yang letaknya agak tinggi musim penghujan bisa berlangsung lama sedang di daerah yang rendah musim penghujan hanya berkisar antara 3 - 4 bulan saja. Oleh karena itulah di Pulau Madura kurang memiliki tanah yang cukup subur atau persawahan, sebagian besar tanah yang dipakai untuk pertanian terdiri dari tanah *tegalan* yang ditanami jagung dan singkong bila musim penghujan tiba. Meskipun tanah di Madura tandus namun matapencaharian sebagian besar masyarakat Madura adalah sebagai petani dan peternak. Sedangkan nelayan dipakai sebagai matapencaharian pokok bagi masyarakat yang berada di pinggir-pinggir pantai baik di pantai utara maupun pantai selatan. Tanah-tanah di pesisir pantai ini pada musim penghujan dimanfaatkan sebagai tambak sedang di musim kemarau dimanfaatkan menjadi ladang garam.

Kondisi geografis pulau Madura dengan topografi yang relatif datar di bagian selatan dan semakin kearah utara tidak terjadi perbedaan elevansi ketinggian yang begitu mencolok. Selain itu, juga merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi menjadikan tanah pertanian lahan kering. Iklim di daerah Madura adalah tropis dengan suhu rata-rata 26,90° C. Musim kemarau kering rata-rata 2-4 bulan atau pada musim kemarau panjang 4-5 bulan. Curah hujan rata-rata antara 1500 - 2000 mm dengan jumlah hari hujan sekitar 88 hari pertahun. Suhu udara maksimum rata-rata 30,50° C. Kelembaban rata-rata 79 %. Komposisi tanah dan curah hujan yang tidak sama di lereng-lereng yang tinggi letaknya justru terlalu banyak sedangkan di lereng-lereng yang rendah malah kekurangan dengan demikian mengakibatkan Madura kurang memiliki tanah yang subur. Tingkat kesuburan yang rendah terkait erat dengan keadaan tanah Madura yang tersusun atas bukit-bukit dan endapan kapur yang gersang dan tandus. Bukit-bukit kapur Madura, pada umumnya ditutupi lapisan yang tanah tipis yang terus-menerus mengalami erosi. Kurang suburnya tanah di Madura, selain akibat iklim yang panas serta tanah yang berkapur, juga disebabkan oleh sempitnya areal hutan yang dimiliki Madura. Madura juga

[4] Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940.* (Yogyakarta: Matabangsa, 2002), hlm. 24-26.

kekurangan tanah vulkanis Kurangnya air dan jenis tanah merupakan rintangan yang besar bagi pertanian di Madura.

Madura dialiri beberapa sungai yang ukurannya berbeda-beda. Dari segi ukuran sungai-sungai yang mengaliri daratan Madura jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan sungai-sungai yang berada di Jawa. Di antara sungai-sungai yang ada di Madura Sungai Sodung (22 km), Sungai Kemuning (20 km), dan Sungai Klampis (14 km), sungai-sungai tersebut termasuk sungai yang besar. Sungai Klampis memberikan kontribusi yang besar bagi irigasi pertanian di Kabupaten Sampang dengan luas baku sawah lebih dari 2.600 hektar.[5] Sungai Budduh (11,5 km) merupakan sungai yang terpanjang di Kabupaten Bangkalan. Sungai lainnya di Bangkalan adalah Sungai Jambu dan Sungai Gladak Mateh, masing-masing dengan panjang sekitar 8 km.[6] Sedangkan di Kabupaten Pamekasan mengalir Sungai Sumber Payung (11 km) dan Sungai Engrang.[7] Sungai Kebonagung, Sungai Jepun dan Sungai Persanga, merupakan sungai-sungai yang mengalir di daerah Sumenep. Sungai-sungai tersebut tidak selalu mengalir, sebab apabila musim kemarau tiba, ada sebagian sungai yang kering. Namun begitu keberadaan sungai tersebut memberi kontribusi yang besar bagi masyarakat, sungai-sungai itu oleh penduduk Madura dipakai untuk memenuhi berbagai keperluan dalam kehidupan, tidak saja dalam bidang pertanian, namun juga dipakai untuk keperluan mandi dan cuci.

Dengan keadaan tanah yang kurang subur dan irigasi yang tidak mencukupi, sebagian besar aktivitas pertanian dilakukan di lahan tegalan dengan tanaman pokok jagung dan ketela. Di tanah yang tergolong subur, penduduk mengusahakan penanaman padi, dengan irigasi utama dari air hujan, itupun hanya bisa dilakukan setahun sekali. Dengan kondisi semacam itu menurut Kuntowijoyo, Madura merupakan representasi dari ekotipe tegalan.[8]

---

[5] BPS, *Kabupaten Sampang dalam Angka* (BPS, 1999), hlm. 4-5.
[6] BPS, *Kabupaten Bangkalan dalam Angka* (BPS, 2000), hlm. 11.
[7] BPS, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka* (BPS, 1999), hlm. 8.
[8] Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940* (Yogyakarta: Matabangsa, 2002).

B. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk 1990 di Madura adalah 3.005.924 jiwa. Masing-masing kabupaten berjumlah 628.308 untuk Pamekasan dan yang terbanyak kabupaten Sumenep 933.741. Jumlah ini adalah mereka yang berdomisili di Pulau Madura sendiri, sedangkan mereka yang tinggal di luar pulau Madura diperkirakan jumlahnya dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang berdomisili di Pulau Madura.

Tingkat pertumbuhan penduduk di Madura termasuk rendah terutama untuk daerah Sumenep dan Bangkalan, selama periode 1980-1990, masing-masing 0,87% dan 0,89% per tahun. Sedangkan Sampang dan Pamekasan angka pertumbuhan penduduknya selama periode yang sama masih lebih tinggi dari angka pertumbuhan Jawa Timur dimana pada periode 1980-1990 masing-masing 1,52% dan 1,54% per tahun, sedangkan untuk Jawa Timur secara keseluruhan hanya 0,98%.

Angka pertumbuhan penduduk yang lebih rendah dari angka pertumbuhan Jawa Timur adalah Bangkalan dan Sumenep, hal ini diduga karena dari kedua daerah itu kemungkinan untuk bermigrasi ke Jawa lebih mudah, Bangkalan secara geografis adalah daerah yang paling dekat dengan Surabaya, sedangkan dari Sumenep tersedia transportasi ke Panarukan, dengan demikian angka migrasi dari dua derah itu cukup besar. Pamekasan dan Sampang adalah dua kabupaten yang keikutsertaannya dalam keluarga berencana masih kurang. Tabel 2.2 menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 1961-1990.

Tabel 2.2. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Se Madura 1961-1990

No.	Daerah Tinggkat II	Jumlah Penduduk				Tingkat Pertumbuhan/Tahun (%)		
		1961	1971	1980	1990	1961-1971	1971-1980	1980-1990
1.	Bangkalan	574.346	631.455	688.362	750.740	0,96	0,95	0,87
2.	Sampang	484.886	535.615	604.541	703.135	1,01	1,34	1,52
3.	Pamekasan	396.413	455.362	539.055	628.308	1,42	1,86	1,54
4.	Sumenep	694.547	762.212	854.925	933.741	0,95	1,27	0,89
Jumlah		2.150.192	2.384.644	2.486.883	3.000.924			

Sumber: *Kantor Statistik 1981-1991*

Pada tahun 2000 berdasarkan data statistik yang dikeluarkan BPS Jawa Timur, diketahui bahwa jumlah penduduk Madura mencapai lebih dari 3,1 juta. Angka tersebut tersebar di empat kabupaten. Perinciannya sebagai berikut: Bangkalan sebesar 764.000 jiwa, Sampang sebesar 715.000 jiwa, Pamekasan sebesar 674.000, dan Sumenep sebesar 966.000 jiwa (selengkapnya lihat Tabel 2.3).[9]

Tabel 2.3. Penduduk Madura Menurut Kabupaten 1995 dan 2000

Kabupaten	1995	2000
Bangkalan	722.000	762.000
Sampang	705.000	715.000
Pamekasan	637.000	674.000
Sumenep	925.000	966.000
Total Madura	2.989.000	3.117.000
Jawa Timur	32.655.000	34.000.000

Sumber: *Jawa Timur dalam Angka 2000* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2000)

[9] BPS, *Jawa Timur dalam Angka 2000* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2000) hlm. 53.

Secara pasti, dalam periode 1995-2000, peningkatan jumlah penduduk tertinggi tetap berlangsung di Kabupaten Sumenep, yaitu sebesar 41.000 jiwa, disusul Kabupaten Bangkalan sebesar 40.000 jiwa, dan Pamekasan 37.000. Peningkatan jumlah penduduk yang terendah terjadi di Kabupaten Sampang sebesar 10.000 jiwa. Peningkatan penduduk yang tinggi di Sumenep sejajar dengan posisi wilayah itu sebagai kabupaten di Madura yang mempunyai jumlah penduduk terbesar dibanding dengan tiga kabupaten lainnya. Sejak zaman kolonial, secara demografis, Sumenep menempati urutan pertama dari segi kuantitas penduduknya. Menurut Raffles, jumlah penduduk Sumenep pada tahun 1815 mencapai 124.400 jiwa atau sekitar 56,4 persen dari total seluruh penduduk Madura. Meskipun proporsinya cenderung menurun dari tahun ke tahun, data yang disajikan Kuntowijoyo untuk periode 1816-1930 jelas memperlihatkan posisi Sumenep sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar.[10]

Berdasarkan sudut pandang jenis kelamin, pada tahun 2000 jumlah penduduk perempuan di Madura lebih besar daripada penduduk laki-laki. Data BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Madura sekitar 1.489.500 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan kurang lebih 1.628.100 jiwa (lihat Tabel 2.4). Besarnya jumlah penduduk perempuan dibanding jumlah penduduk laki-laki sebenarnya merupakan fenomena universal di seluruh Jawa Timur, bahkan di sebagian besar wilayah Indonesia lainnya. Data penduduk yang dikumpulkan dalam sensus penduduk tahun 1961 memperlihatkan fenomena serupa.[11]

[10] Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940,* (Yogyakarta: Matabangsa, 2002), hlm. 72.

[11] W. Nitisastro, *Population Trends in Indonesia,* (Ithaca: Cornell University Press, 1970), hlm. 241.

Tabel 2.4. Penduduk Madura Menurut Jenis Kelamin

Kabupaten	2000	
	Laki-laki	Perempuan
Bangkalan	358.700	403.300
Sampang	343.000	372.200
Pamekasan	326.100	348.100
Sumenep	461.700	504.500
Total Madura	1.489.500	1.628.100
Jawa Timur	16.677.000	17.323.700

Sumber: *Jawa Timur dalam Angka 2000* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2001), hlm. 49.

Pada saat ini untuk menuju ke Pulau Madura hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kapal fery, waktu penyeberangan yang ditempuh ± 30 menit dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pulau Madura sendiri secara administratif terdiri dari 4 kabupaten masing-masing dari arah paling dekat dengan ibukota Jawa Timur yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Perkebunan tidak banyak dijumpai di wilayah ini yang ada hanyalah perkebunan tembakau yang dijumpai di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang. Akibat dari keadaan alam yang demikian itu maka tingkat perekonomian masyarakat Madura sangat kurang. Anak-anak kebanyakan hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat SLTP saja. Untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya maka banyak masyarakat Madura yang pergi bermigrasi ke luar Pulau Madura untuk mencari pekerjaan, bahkan sebagian ada yang sampai ke luar negeri. Keberhasilan mereka bermigrasi ini tampak pada rumah-rumah penduduk yang sekarang jauh lebih bagus dibandingkan dengan di masa lalu. Selain itu perabotan-perabotan atau barang-barang mewah seperti TV, kendaraan roda dua, dan barang-barang mewah lain bisa terbeli. Oleh karena itu, sekarang ini pendidikan anak-anak sudah bisa mencapai sampai lanjutan atas, bahkan sampai Perguruan Tinggi. Dengan demikian tidak mengherankan bila sekarang di wilayah Pulau Madura banyak dijumpai rumah-rumah bagus dengan isinya

yang cukup modern. Hal itu dapat menunjukkan bahwa tingkat perekonomian mereka sudah semakin tinggi. Sudah barang tentu hal inipun juga mendorong untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di wilayah masing-masing, meskipun belum sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Memang di pulau ini belum banyak dijumpai adanya Perguruan Tinggi namun sekolah-sekolah lanjutan atas sudah ada di setiap kabupaten dan beberapa di wilayah kecamatan. Bila menginginkan sekolah sampai ke Perguruan Tinggi harus keluar dari Pulau Madura. Biasanya mereka pergi ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dahulu masyarakat Madura sangat sulit untuk menerima budaya-budaya dari luar Pulau Madura. Namun sekarang dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi masyarakat Madura sedikit demi sedikit sudah bisa menerima budaya-budaya dari luar Madura. Namun demikian hal-hal yang dianggap sebagai pakem dalam adat dan tradisinya tetap dipertahankan.

Hal ini terbukti masih adanya pola pemukiman yang masih menggunakan adat lama, yaitu pola pemukiman bagi masyarakat Madura yang masih tetap berpegang pada pola *taneyan lanjang* (*taneyan*: halaman, *lanjang*: panjang). Dengan kata lain biasanya sebuah desa di Madura berisi dari beberapa kelompok pemukiman yang dikelilingi oleh *tegal*. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 - 8 rumah yang dibentuk dengan pola yang khas, yaitu dideret memanjang dimulai dari rumah anak yang tertua. Biasanya anak perempuan yang sudah kawin akan diberi satu buah rumah yang akan dipakai sebagai tempat tinggal bersama pasangannya. Pada setiap *taneyan lanjang* tentu akan dilengkapi dengan sumur dan mushala yang akan dipakai secara bersama-sama. Hal ini nantinya akan berkembang menjadi satu desa yang cukup luas, sehingga disitu akan didirikan satu tempat peribadatan yang juga lebih besar (Masjid). Biasanya nanti akan berkembang pula adanya madrasah dan pondok Pesantren. Sehingga tidak mengherankan jika di Madura banyak dijumpai pondok-pondok pesantren sampai di pelosok-pelosok desa. Tidak mengherankan jika anak-anak desa biasanya disekolahkan di pondok-pondok di dekat rumahnya.[12]

[12] *Ibid.* Lihat juga Muthmainnah, *op.cit.*, hlm. 22-23.

Oleh karena itulah maka tidak mengherankan jika masyarakat Madura sangat menghormati peran kyai di wilayahnya karena kyai lah yang dianggap sebagai penguasa di wilayahnya dan juga sebagai pemersatu desa. Kadangkala masyarakat bahkan lebih menghormati dan takut pada kyai dari pada penguasa birokrasi pemerintah.

Di Kabupaten Sampang yang luasnya ± 1.233,36 km^2 dan terdiri dari 12 kecamatan, masing-masing yaitu kecamatan Sresem, Torjun, Sampang, Camplong, Tembelangan, Banyuates, Robatal, Soko Banah, Omben, Kedundung, Jrengik dan Ketapang. Kondisi geografi dan keadaan tanahnya juga tidak jauh berbeda dengan Pulau Madura secara keseluruhan. Kabupaten Sampang mempunyai 2 pantai yang letaknya berada di sebelah utara dan di selatan ibukota kabupaten. Pantai yang ada di sebelah selatan masuk pada wilayah Kecamatan Torjun, sedang pantai di sebelah utara masuk pada wilayah Kecamatan Ketapang. Sudah barang tentu mereka berada di wilayah yang berdekatan dengan pantai, bermatapencaharian sebagai nelayan, dan petani garam. Adapun masyarakat yang berada di wilayah kecamatan lainnya sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani di lahan tegal.[13]

Luas lahan pertaniannya sebagian besar berupa lahan *tegalan* ± jumlahnya 80.554 ha yang kesemuanya bergantung pada curah hujan disetiap tahunnya, sedang lahan sawah menggunakan pengairan dengan sistem teknis ada 3.429 ha, sub teknis seluas 872 ha dan pengairan sederhana seluas 346 ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 15.865 ha.[14]

Di samping itu, ada pula tanah yang dipergunakan untuk perkebunan antara lain yaitu perkebunan *jambu mete*, kelapa, *kapuk randu*, kapas, tembakau, dan tebu. Namun yang mempunyai produksi cukup tinggi adalah *jambu mete* dan kelapa. Produksi *jambu mete* dan kelapa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut ini.[15]

---

[13] Wawancara dengan Kesra di kantor Balai Desa Banyuates, Sampang, pada tanggal 28 Mei 2004.
[14] BPS, *Jawa Timur Dalam Angka 2002*. (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur 2003).
[15] *Ibid.*, hlm. 177.

Tabel 2.5 Luas Area Perkebunan

Jenis	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Jambu Mete	8.170	8.505	8.522	8.681	8.681	8.629	8.639
Kelapa	2.082	2.436	2.436	2.484	2.574	2.490	2.553
Kapuk Randu	1.271	1.272	1.272	1.273	1.373	1.373	4.616
Kapas	-	-	-	-	-	-	-
Tembakau	8.340	9.391	8.542	5.062	10.630	12.056	12.060
Tebu	55	55	-	-	-	-	-

Sumber: *Jawa Timur Dalam Angka 2002* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2003), hlm. 177.

Tabel 2.6 Produksi Perkebunan

Jenis	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Jambu Mete	1.827	1.898	1.938	1.818	2.076	1.010	2.054
Kelapa	606	751	685	579	586	724	756
Kapuk Randu	55	19	19	19	42	44	45
Tembakau	-	4.615	4.240	2.461	6.035	4.424	4.462

Sumber:*Jawa Timur Dalam Angka 2002*,(Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2003), hlm. 184

Selain itu, di wilayah Sampang selain terdapat tanah tegalan juga terdapat lahan sawah yang terdiri dari lahan sawah tadah hujan seluas 15.865 ha, sawah pasang surut tidak terdapat di kabupaten ini.[16] Sedangkan lahan sawah menurut penggunaannya.

Tabel 2.7 Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Penggunaannya

No.	Jenis Lahan	Luas
1.	Pekarangan, bangunan dan halaman	12.575
2.	Tegal, kebun, ladang, huma	80.554
3.	Tegal, kebun	80.554
4.	Ladang, huma	0
5.	Penggembahalaan/padang rumput	75
6.	Tambak	5.255

Sumber: *Jawa Timur Dalam Angka 2002*,(Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2003), hlm. 163.

[16] *Ibid.*, hlm. 163-166.

Melihat kondisi wilayah Kabupaten Sampang sampai yang demikian ini, tampak bahwa di wilayah tersebut tanahnya kurang subur sehingga masyarakatnya pun jauh dari kemakmuran. Oleh karena itulah untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat wilayah Sampang, maka pemerintah berupaya untuk membuat waduk di wilayah Kabupaten Sampang yang dipergunakan sebagai pengairan terutama bila musim kemarau tiba. Apabila waduk itu telah terlaksana maka pada musim kemarau tanah-tanah *tegalan* milik penduduk bisa mendapat pengairan sehingga mereka bisa memanen 2 kali dalam setahun. Proyek itu ternyata banyak mendapat tantangan dari warga masyarakat yang terkena waduk namun akhirnya setelah mereka diberi pengertian akan keuntungan-keuntungan adanya waduk ini, mereka bisa menerima. Waduk tersebut dinamakan Waduk Nipah karena berada di sekitar Sungai Nipah. Bendungan yang dibangun lebih dahulu sebelum Waduk Nipah adalah Waduk atau Bendungan Klampis yang berasal dari Sungai Klampis.

C. Jaringan Transportasi

Pada masa kolonial jaringan transportasi di Madura dilakukan dengan trem, mobil, *cikar*, dan juga perahu. Alat transport tersebut menurut *memori Residen W. H. Ockers* dipakai untuk mengangkut orang dan barang.[17] Jalan kereta api Madura memanjang dari Kamal melalui Pamekasan sampai di Kalianget. Kereta api yang beroperasi di Madura termasuk jenis kereta api kelas 2 dengan kecepatan maksimun 30 km per jam. Pada tahun 1929, perusahaan kereta api juga menyelenggarakan transportasi bus. Jumlah bus yang beroperasi di Madura sampai tahun 1930 ada sekitar 53 kendaraan. Adapun kereta kuda yang beroperasi di Madura mencapai 1. 549 buah.[18]

Jalan propinsi dan jalan-jalan kabupaten di Madura pada sekitar tahun 1930 belum memenuhi syarat untuk lalu-lintas modern dan untuk kendaraan bermotor. Jalan-jalan itu masih sempit dan lapisan kerasnya masih tipis. Jalan utama Kamal- PamekasanKalianget sudah diperkeras dengan aspal, namun karena material yang dipakai kurang baik jalan tersebut sering mengalami

[17] Sartono Kartodirdjo, dkk., *Memori Serah Jabatan 1921 1930 Jawa Timur dan Tanah Kerajaan* (Jakarta: ANRI, 1978), hlm. 277 - 278.
[18] *Ibid.*

perbaikan. Jalan-jalan desa pada umumnya berupa jalan setapak. Jalan yang menghubungkan pantai selatan dengan pantai utara dari Pamekasan sampai Waru melewati Pakong, mulai dibuat tahun 1930-an.

Transportasi di perairan diusahakan oleh *Madoera Stoomtrammaatschappij*. Alat transportasinya berupa kapal motor, perahu, dan sampan. Penduduk biasanya menggunakan alat transportasi berupa perahu yang bisa mengangkut barang dan manusia. Komunikasi dengan pulau-pulau yang berdekatan dengan daratan Madura dilakukan dengan menggunakan perahu layar kecil dan perahu dayung. Perahu-perahu di pantai selatan Madura menyelenggarakan transportasi ke Probolinggo, Pasuruan dan Surabaya. Sedangkan perahu-perahu yang berada di pantai utara ada yang membawa dagangan sampai ke pantai selatan Pulau Kalimantan.[19]

Dewasa ini pada umumnya transportasi dan komunikasi di berbagai wilayah di Indonesia sudah cukup baik. Demikian pula di wilayah Madura. Adanya kemajuan teknologi dan informasi menjadikan hubungan antarwilayah satu dengan wilayah lainnya semakin baik, cepat, dan lancar. Kapal fery sebagai alat transportasi dari dan ke Pulau Madura sudah semakin banyak sehingga membuat lancarnya arus penumpang dan barang. Jalan-jalan di wilayah Madura juga sudah banyak beraspal dan semakin lebar terutama jalan-jalan antarkabupaten. Kendaraan bermotor dan roda empat juga semakin banyak sehingga memperlancar transportasi antarkabupaten. Sedangkan transportasi antarkecamatan dan desa meskipun tidak selancar dan sebanyak di kabupaten namun sudah semakin baik. Beberapa angkudes dan ojek banyak dijumpai sebagai sarana transportasi antarkecamatan dan desa. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan-jalan kecamatan dan desa yang masih sempit dan kadang belum beraspal.

Sarana komunikasi baik berupa telepon, televisi, dan media cetak juga sudah banyak dijumpai di wilayah Madura. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu sarana untuk memperlancar arus informasi antardaerah baik dari dalam wilayah Madura sendiri maupun dengan luar Pulau Madura. Dengan demikian kemajuan pembangunan dan ekonomi pun semakin nyata.

---

[19] *Ibid. 214*

Untuk Kabupaten Sampang sendiri transportasi juga cukup baik, jalan-jalan sudah semakin lebar terutama di pusat ibukota kabupaten. Angkutan antarkota kabupaten melewati ibukota kabupaten bisa dijumpai baik siang maupun malam. Sedangkan untuk sarana transportasi wilayah kecamatan masih kurang, hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang masih kurang memadai sehingga angkutan yang melewati antar kecamatan maupun antar desa juga masih kurang. Angkutan desa yang melewati dari pagi mulai pukul 06.00 hanya sampai pukul ±16.00 demikian pula ojek yang ada di wilayah tersebut. Melebihi jam tersebut masyarakat harus berjalan kaki untuk menuju wilayah lainnya, kecuali mereka yang sudah mempunyai kendaraan sendiri, keadaan seperti ini tidak menjadi masalah.

D. Industrialisasi

Industrialisisasi pada dasarnya juga telah dimulai sejak lama. Pada masa kolonial aktivitas di ladang garam mulai dibuat secara modern dengan membuat garam briket. Irigasi yang termasuk langka di Madura mulai diusahakan dengan membuat bendungan-bendungan agar disribusi air di Madura menjadi lebih baik.

Saat ini Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi yang mempunyai wilayah cukup makmur. Namun kemakmuran ini tidak merata disemua wilayahnya. Wilayah Jawa Timur yang kurang makmur antara lain Pulau Madura terutama Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang adalah daerah miskin dengan tanahnya yang kering. Kemiskinan ini dialami secara alamiah artinya disebabkan oleh kondisi alam yang tandus, kering, tidak adanya pengairan yang cukup serta sumber daya alam lain yang bisa mendukung kemakmuran Kabupaten Sampang.[20] Sedangkan 3 kabupaten lainnya di Madura sudah jauh lebih makmur. Sehingga banyak terlihat perbedaan-perbedaan terutama masyarakatnya yang sudah lebih terbuka dengan pihak luar.

Untuk meningkatkan ekonomi rakyat Madura maka pemerintah akan menjadikan Pulau Madura sebagai kawasan industri seperti halnya di Pulau

[20] Mochtar Mas'oed, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu.* (Yogyakarta: P3PK UGM, 2001), hlm. 168.

Batam. Ide ini mendapat tanggapan yang bermacam-macam dari para ulama Madura. Industrialisasi di Madura banyak ditentang oleh masyarakat Madura terutama oleh para kyai. Rencana pemerintah untuk mewujudkan Madura sebagai kawasan industri banyak mendapat tentangan oleh BASSRA. BASSRA adalah singkatan dari Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura. Sesuai dengan namanya, lembaga ini beranggotakan ulama pesantren yang tersebar di 4 kabupaten di Madura.[21] Ulama BASSRA ingin mencari kejelasan akan adanya industrialisasi ini. Hal ini karena disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang industrialisasi sehingga mereka mempunyai anggapan bahwa industri itu ibarat "mahkluk asing" yang belum ada kejelasannya. Mereka tidak bisa begitu saja menerima. Mereka mempunyai anggapan bahwa industrialisasi itu sebagai sesuatu yang tidak jelas/samar-samar hubungan berada diantara halal dan haram yang bisa menguntungkan dan juga merugikan. Menguntungkan bagi yang siap dan merugikan bagi yang tidak siap.[22]

Dari berbagai pertemuan yang membahas masalah industrialisasi di Madura ini ulama BASSRA mengusulkan, untuk membangun industri tertentu juga mengingat kualitas SDM Madura yang rendah serta kesiapan masyarakat Madura sendiri dalam menerima industrialisasi. Adapun jenis industri yang diusulkan oleh ulama BASSRA adalah industri-industri seperti agrobisnis dan agro-industri sebagai pengembangan Madura berlangsung secara bertahap.[23] Seiring dengan perkembangan waktu akhirnya secara pelan-pelan masyarakat Madura bisa menerima adanya industrialisasi di wilayahnya.

Lancarnya jaringan transportasi di wilayah Madura akhirnya membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Beberapa investor besar yang sudah menanamkan modalnya di wilayah Madura antara lain.[24]

---

[21] Muthmainnah, *op.cit.*, hlm. 81.
[22] *Ibid.*, hlm. 82.
[23] *Ibid.*, hlm. 85.
[24] Mochtar Mas'oed, dkk., *op.cit.*, hlm. 172.

Tabel 2.8 Investor Besar di Madura

Nama Investor	Kegiatan Investasi
Madura Barat:	
PT. Dwipa Madura Pradana	Industri elektronika dan real estate
Bimantara	Real estate
Salim Group	Industri Semen
Semen Gresik	Industri Semen
Astra	Real estate dan industri elektronika
Modern Group	Real estate
Jan Darmadi	?
Metraco	?
Sekar Group	?
PT. Madura Guano Phosphate	Industri kimia
PT. Maduratex	Industri tekstil
Petrokimia	Industri Kimia
Pacto	?
Mulia Group	?
Madura Timur:	
Ometraco	?
Kodel	Agribisnis dan kegiatan lain
Bakri Brothers	Agribisnis dan kegiatan lain
Modern Group	?
Rajawali Group	?
Sekar Group	?
Gudang Garam	Industri rokok sigaret
Djarum	Industri rokok sigaret
Bentoel	Industri rokok sigaret
Sampurna	Industri rokok sigaret
PT. Madura Guano Phosphate	Industri kimia
Bimantara	Agribisnis, konstruksi, dll
Pacto	?
Djiko Agung	?

Sumber: *Warta Ekonomi* dikutip dalam Rachbini (1995:217)

Di samping itu juga terdapat investor minyak dan gas bumi di Madura dan sekitarnya yaitu[25]

Tabel 2.9 Investor Minyak dan Gas Bumi di Madura dan Sekitarnya

Nama Investor	Tempat Kegiatan
Mobil Madura Straits, Inc.	Madura Block
Kodeco Energy Co., Ltd.	West Madura Block
Enterprice Co., Ltd.	Bawean Block
Impex Madura Offshore	East Block of Java Sea
Trend Java Sea Ltd.	East Block of Java Sea
Huffco Brantas Ltd.	Brantas Block
Shell Madura	Madura Block
Trend East Java Sea Ltd.	Tiban Block
Stanvac	Gundih Block
Arbni	Kangean Block
Amoco Java Sea	North East Java Block
Humpuss Patragas (Swasta Nas.)	Cepu Block
British Petroleum	Sumenep Block

Sumber: Pertamina UPDN V, 1990 dikutip dari Rachbini 1995:218.

Namun begitu tampaknya industrialisasi di Madura ini tidak semuanya bisa diterima begitu saja oleh masyarakat Madura. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran masyarakat Madura akan dampak dari industrialisasi tersebut yang mungkin bisa merubah sikap dan perilaku masyarakat Madura yang masih memegang teguh tradisi kereligiusannya. Seperti yang dikatakan Mochtar Mas'oed dalam bukunya yang mengatakan bahwa mengingat investor yang sudah terdaftar umumnya ingin menanamkan modal dalam pembangunan industri yang padat modal dan kapital, kekhawatiran muncul bahwa rakyat Madura tidak akan banyak bisa memperoleh manfaat dari proses pembangunan itu. Ekspansi dan akumulasi kapital itu diduga hanya akan membuat sumber daya Madura lebih banyak dimanfaatkan oleh orang dari

[25] *Ibid.*, hlm. 171.

luar, sedangkan penyakit sosial yang datang bersama dengan modernisasi sosial-ekonomi seperti itu akan merusak tradisi lokal yang sangat religius.[26]

Seperti diketahui bahwa nilai keagamaan bagi masyarakat Madura sangat kuat sehingga tidak dipungkiri bahwa pengaruh kyai sangat kuat dan mengakar pada masyarakat Madura. Tidak mengherankan jika Madura dijuluki dengan pulau seribu pondok. Karena dimana-mana di wilayah Madura banyak terdapat pondok pesantren yang merupakan tempat pendidikan bagi masyarakat Madura.[27]

Oleh karena itulah maka masyarakat akan selalu mengikuti apa yang dikatakan kyai, meskipun itu bertentangan dengan pemerintah. Demikian juga halnya dengan industrialisasi meskipun pemerintah memberi izin, namun bila kyai tidak mengijinkan maka rakyat akan menurut dan mengikuti kata kyai tersebut.

Sebetulnya usaha pemerintah untuk menerima industrialisasi di Madura ini semata-mata untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Karena pertanian yang merupakan matapencaharian pokok masyarakat Madura tidak bisa diandalkan. Untuk itulah maka industrialisasi dimaksudkan di samping untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Madura juga untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun demikian alasan ini masih sulit diterima bahkan mereka ada yang lebih senang bekerja di luar Pulau Madura bahkan sampai ke luar negeri.

Apabila seorang kyai bisa menerima masuknya industrialisasi di wilayahnya maka masyarakat akan mengikutinya. Bila kyai berkata tidak bisa maka masyarakat pun akan mempunyai pendapat yang sama. Sikap-sikap seperti inilah yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak jarang menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Namun demikian seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Madura bisa menerima pihak luar yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Madura. Hal ini terbukti dengan sudah banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Madura seperti yang telah disebutkan di atas.

---

[26] *Ibid.*, hlm. 173.

[27] Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 6 - 7.

Ternyata masuknya industrialisasi di wilayah Madura inipun sedikit banyak mampu mengangkat atau menambah naiknya kehidupan masyarakat Madura menjadi lebih baik.

Untuk wilayah Kabupaten Sampang sendiri masuknya industrialisasi sedikit banyak juga sudah diterima oleh masyarakat. Hal ini nampak terlihat di pusat ibukota Sampang. Disitu terlihat sudah adanya *supermarket*, SPBU, dan pabrik-pabrik yang mengolah hasil-hasil pertanian masyarakat Sampang.

E. Madura Dalam Perubahan Zaman

Masyarakat Madura dalam proses sejarah yang cukup panjang, mengalami dinamika dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dalam rentang waktu tersebut ada perubahan dan juga kesinambungan. Dalam perubahan dan kesinambungan, ada segi-segi yang mengalami perubahan yang cepat dan juga lambat. Tingkat perubahan yang lambat seperti kondisi geografi, Madura yang tampak sekarang adalah Madura yang gersang, tanahnya berkapur dan memiliki sumber air yang sedikit. Kondisi geografi yang tandus dan kurang subur tersebut membentuk pola pertanian orang Madura pada sistem tegal. Ekologi tegal mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan ekologi yang demikian, tanah yang bisa ditanami padi hanya terbatas. Masyarakat umumnya menanam padi (setahun sekali pada musim penghujan), palawija, dan juga tembakau. Palawija yang banyak memberi kontribusi perekonomian Madura adalah jagung.

Produksi tembakau hanya dalam skala kecil. Rintisan usaha yang dilakukan oleh Belanda tersebut tidak berkembang, karena dianggap tidak memberi hasil yang memadai. Namun begitu pada tahun 1970-an usaha penanaman tembakau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik dari segi luas areal maupun luasnya jaringan pemasaran. Tembakau Madura banyak dipakai dalam industri rokok di Indonesia.

Di samping sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat Madura memenuhi kebutuhannya dengan melakukan aktivitas peternakan. Ternak yang berkembang di Madura adalah sapi. Binatang itu terutama yang dipakai sebagai binatang 'lomba karapan' selain sebagai salah satu aset ekonomi, juga

sebagai simbol status orang Madura.

Lapisan yang cepat berubah atau lapisan jangka pendek tampak antara lain dalam bidang politik. Madura sejak masa kerajaan-kerajaan tradisional pernah menjadi wilayah kerajaan-kerajaan di Jawa. Keterlibatannya dengan Belanda dimulai tatkala penguasa Sumenep meminta bantuan VOC untuk membebaskan diri dari pengaruh Mataram. Dalam perkembangannya Belanda semakin kuat bercokol di Madura. VOC dalam perkembangannya berhasil membuat Madura menjadi daerah yang berada dalam pengaruhnya. Pada paruh kedua abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda berangsur-angsur menghapus swapraja di Madura, dan kemudian membentuk Madura menjadi daerah karesidenan. Wajah Madura dilihat dari sisi politik pada periode sepuluh tahun terakhir abad ke-20, Madura tampil dalam konfigurasi politik yang cepat sekali berubah. Hal itu tampak dari silih bergantinya partai-partai yang memenangkan pemilu di daerah Madura.

Madura sekarang berbeda dengan keadaan Madura ketika masih berada dalam kekuasaan kolonial, dan bahkan juga berbeda ketika berada dalam awal pembangunan pada masa republik. Pada masa awal pembangunan di era Orde Baru Madura masih sangat sepi, suasana pedesaan masih terasa sekali. Jaringan transportasi belumlah seramai dan selancar seperti saat ini. Kondisi jalanpun masih sangat sempit dan belum sehalus sekarang. Masyarakatnya masih nampak ke tradisionalannya.

Pada awal abad ke-21 seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Pulau Madura sudah mulai terbuka. Sebagian besar masyarakatnya sudah bisa menerima hal-hal baru yang selama ini belum bisa mereka terima. Masuknya industrialisasi di Madura sedikit banyak juga membawa perubahan pada masyarakat di Pulau Madura. Banyak bangunan-bangunan, jalan-jalan, pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran, dan sekolah berdiri dengan megah, dan dapat dijumpai terutama dipusat kota kabupaten. Meskipun demikian semuanya tidak begitu saja mudah diterima oleh masyarakat. Hal-hal kecil yang mungkin bertentangan dengan adat dan tradisi mereka, sering menimbulkan hal-hal yang kurang baik seperti keresahan di lingkungan masyarakat bahkan sampai menimbulkan konflik. Hal itu di akibatkan dari proses pembangunan yang menekankan akumulasi kapital,

konfigurasi pemilahan sosial sehingga bisa berubah ke format yang lebih memudahkan timbulnya konflik.[28]

Proses masuknya industrialisasi dan pembangunan di Madura banyak membawa perubahan yang meliputi perubahan sosial, kultural bahkan struktural. Terjadinya dorongan untuk selalu memperbanyak kapital mengakibatkan adanya persaingan diantara pemilik modal, untuk memperebutkan keuntungan-keuntungan yang bisa diambil dari pulau ini. Hal ini berdampak pula pada masyarakat kecil yang juga kadang terjadi persaingan-persaingan diantara mereka terutama di dalam dunia usaha.

Persaingan-persaingan ini telah melemahkan dasar-dasar solidaritas tradisional yang meliputi ikatan intra komunal serta toleransi antarkomunal.[29] Hal ini tampak terlihat di masyarakat yang berdekatan dengan ibukota kabupaten maupun dekat lokasi pabrik-pabrik. Keberhasilan para pemilik modal baik yang berasal dari para investor maupun masyarakat Madura sendiri dapat menikmati mobilitas ekonomi ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan masyarakat yang kurang mampu biasanya mereka akan pergi meninggalkan Pulau Madura bahkan sampai ke luar negeri untuk bisa mengejar ketinggalan itu. Mereka ternyata banyak pula yang memperoleh keberhasilan. Hal yang tampak nyata terlihat pada bangunan rumah-rumah mewah yang tersebar di wilayah Madura. Ini menunjukkan pula bahwa mereka sudah tidak lagi mempertahankan tradisi dalam mendirikan rumah. Di samping adanya kelangkaan tanah, adanya globalisasi masyarakat Madura kini dalam membangun rumah tidak lagi mengikuti pola *taneyan lanjang* tetapi banyak mengikuti arsitektur Jawa.[30] Selain itu, adanya industrialisasi/pabrik-pabrik menimbulkan adanya sentra ekonomi baru bagi masyarakat sekitarnya yang juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Akhirnya, mereka pun bisa meningkatkan status sosialnya.

Kenyataan bahwa seorang kyai mampu memobilisasi pengikutnya menunjukkan bahwa rupanya kyai bertambah penting kedudukannya menjelang abad ke-20. Peranan kyai rupanya mengalami evolusi dari

---

[28] Mochtar Mas'oed, dkk., *op.cit.*, hlm. 205.
[29] *Ibid.*
[30] Muthmainnah, *op.cit.*, hlm. 25.

pemimpin ritual keagamaan ke pemimpin masyarakat, dan kemudian ke pemimpin politik. Pada masa kerajaan tradisional mereka hanyalah pemimpin ritual keagamaan semata kemudian menjadi pemimpin masyarakat pada jaman kolonial dan menjadi pemimpin politik setelah kemerdekaan yaitu, setelah belajar berorganisasi pada elit non-kyai.[31]

Meskipun di Madura sudah banyak terjadi perubahan-perubahan terutama di dalam sistem sosial, namun masyarakat Madura sampai saat ini tetap tunduk pada kyai. Hal ini berlaku bagi masyarakat Madura secara keseluruhan baik yang berada di Pulau Madura sendiri maupun yang berada atau tinggal di luar Pulau Madura.

[31] Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 592.

BAB III
KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADURA

A. Stratifikasi Masyarakat

Secara garis besar stratifikasi atau pelapisan sosial masyarakat Madura meliputi tiga lapis, yaitu *oreng kene'* atau yang disebut juga *oreng dume'* sebagai lapisan masyarakat yang paling bawah, *ponggaba* sebagai lapisan masyarakat menengah, dan *parijaji* (atau *priyayi* dalam masyarakat Jawa) sebagai lapisan masyarakat yang paling atas.[1]

Lapisan sosial masyarakat Madura yang paling bawah yang disebut *oreng kene'* (orang kecil) adalah kelompok sosial masyarakat biasa atau kebanyakan. Orang-orang yang menempati stratifikasi paling bawah ini biasanya bekerja sebagai petani, nelayan, pengrajin, dan bahkan juga orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran. Lapisan sosial menengah atau *ponggaba* (pegawai) meliputi para pegawai terutama yang bekerja sebagai birokrat mulai dari tingkatan bawah hingga tingkatan yang tinggi. Secara harfiah kata *ponggaba* berarti pegawai atau orang yang bekerja pada institusi-institusi formal, khususnya kantor-kantor pemerintah. Sedang lapisan sosial masyarakat Madura yang paling atas adalah para bangsawan, meliputi orang-orang yang secara genealogis keturunan langsung raja-raja di Madura dan orang-orang yang memperoleh *privilege* dari pemerintah kolonial masa lalu. Sebagai simbol kebangsawanan mereka, diberikan gelar mulai dari Raden Panji, Raden Bagus, Raden Ario (untuk laki-laki) atau Raden Ayu (untuk perempuan), dan Raden. Dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan dirinya sebagai keturunan bangsawan dengan kelompok masyarakat lain pada umumnya, mereka selalu membubuhkan gelar tersebut di depan namanya, bahkan kelompok dibawahnya jika menyebutkan namanya harus menyertakan gelar tersebut. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, akhir-akhir ini pencantuman gelar kebangsawanan sudah tidak populer lagi, sebab gelar-gelar tersebut dianggap sebagai lambang feodalisme, dan sekarang kebanyakan digantikan dengan

[1] Abdurrahman, *Madura Dalam Selayang Pandang*, (Sumenep: Adikarya, 1971), hlm. 5.

gelar kesarjanaan bagi mereka yang mampu menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Sementara itu, sifat pelapisan sosial di atas jika dipandang dari sudut keagamaan hanya terdiri dari dua lapisan, yaitu *santre* (santri) dan *banne santre* (bukan santri). Latif Wiyata memberikan alasan bahwa pelapisan tersebut dalam kenyataannya tidak harus diartikan bahwa kelompok *santre* identik dengan *parijaji* dan kelompok *banne santre* diidentikkan dengan kelompok *oreng kene'*.[2] Dalam konteks ini, pelapisan sosial dari sudut pandang keagamaan, *keyae* (kyai) merupakan kelompok masyarakat yang berada di lapisan sosial yang paling atas, sedang *banne santre* berada di lapisan sosial bawah. Selain kedua kelompok di atas sebenarnya masih ada satu kelompok yang berada ditengah yaitu *bindarah*.

Perlu dijelaskan pengertian ketiga kelompok masyarakat tersebut. Kyai (atau *Keaye* dalam bahasa Madura) menunjuk kepada orang-orang yang terkenal sebagai pemuka agama atau ulama karena menguasai ilmu agama (Islam). Kelompok ini mempunyai peranan dan fungsi selain sebagai pembina umat juga sebagai pengajar kepada para santri di lembaga pesantren dan juga masyarakat disekitar lingkungan pesantren. Asal-usul sosial kiai di Madura dapat dilepaskan dari proses islamisasi yang masuk ke daerah Madura. Kemunculan kiai sebagai elit sosial di dalam masyarakat sangat terkait dengan wacana dan praktek keislaman sebagai agama yang disebarkan melalui jaringan ulama.[3] Menurut Abdurrahman, proses islamisasi di Madura dimulai oleh Sunan Giri. Namun, sebelum itu sudah banyak pedagang-pedagang Islam yang singgah di pelabuhan pantai Madura, seperti di Kalianget. Bahkan terdapat interaksi dan pengaruh kebudayaan antara penduduk setempat dengan pendatang saudagar tersebut.[4]

Sebagai suatu kelompok sosial, kyai mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat desa. Tidak jauh bedanya dengan Jawa, di Madura biasanya seorang kyai meskipun tidak semua sama - dikaitkan dengan

---

[2] Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 45-50.

[3] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan Abad XVII*, (Bandung: Mizan, 1994).

[4] Abdurrahman, *Sejarah Madura Selayang Pandang*, cetakan kelima, (Sumenep: Matahari, 1988), hlm. 15.

pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan unit komunitas kecil yang di dalamnya sudah tersedia fasilitas-fasilitas serta prasarana dan sarana baik untuk kehidupan sosial maupun keagamaan.[5] Setiap *keaye* di Madura selalu mendapatkan kunjungan orang-orang baik dari lingkungan di sekitar desa setempat maupun dari berbagai wilayah di luar desa bahkan sampai luar kabupaten. Banyak pula kyai yang mempunyai "pengikut" dari luar pulau Madura. Pengikut dalam hal ini tidak semata-mata mereka yang *nyantri* di Madura, namun juga mereka yang menganggap bahwa seseorang itu mempunyai *kelebihan* yang pantas dimintai tolong.[6]

Bindarah adalah orang-orang yang telah menamatkan pendidikan pondok pesantren. Kelompok ini juga mempunyai pengetahuan agama yang cukup tinggi meskipun tarafnya belum menyamai kemampuan kiai, tetapi melampaui para santri. Dalam kehidupan masyarakat Madura, biasanya seorang *bindarah* juga sering diperlakukan hampir seperti kiai, sehingga banyak orang datang mencari berkah *(nyabis)* kepadanya.

B. Aktivitas Sosial

1. Sosial

Seringkali gambaran tentang masyarakat Madura yang diberikan oleh orang luar bernuansa atau bersifat sangat negatif. Etnik lain selalu menggambarkan masyarakat Madura sebagai kelompok orang-orang yang keras, suka membunuh, pendendam, mudah tersinggung, dan tidak toleran terhadap orang lain, seperti yang nampak dalam gambaran Elly Touwen-Bouwsma, si peneliti masalah carok yang menyebut Madura sebagai *Sisilia of Java*.[7]

Bagaimanakah sebenarnya kehidupan masyarakat Madura? Madura dapat dikatakan identik dengan Islam, meskipun tidak semua penduduk memeluk agama Islam. Kabupaten Sumenep, misalnya, pemeluk agama Islam

---

[5] Lihat Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 56.

[6] Kebanyakan mereka datang ke Madura ke tempat para kyai untuk minta tolong dalam hal kesembuhan, pangkat, dan lainnya. Salah seorang kyai memberi informasi bahwa pengikutnya ada yang berasal dari daerah Jawa Tengah juga Yogyakarta, minta untuk didoakan agar penyakitnya sembuh. Informasi diberikan oleh kyai Ahmad (bukan nama sebenarnya) dari Sampang.

[7] Elly Touwen-Bouwsma, "Kekerasan di Masyarakat Madura", dalam Huub de Jonge (ed), *Agama, Kebudayaan, Dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*, (Jakarta: C.V. Rajawali Pers, 1989), hlm. 159.

pada tahun 2000 sebanyak 968.772 orang, pemeluk agama Kristen sebanyak 916 orang, pemeluk agama Hindu sebanyak 273 orang, dan pemeluk agama Budha sebanyak 119 orang.[8] Meskipun tidak semua penduduknya memeluk agama Islam, tetapi citra "masyarakat santri" menjadi bagian dari identitas etnik Madura. Menjadi haji, misalnya, merupakan impian setiap orang Madura, dan mereka akan berusaha keras untuk mewujudkannya. Seolah-olah "kesempurnaan hidup" telah dapat dilampauinya jika bisa mengunjungi tanah suci (Mekah) untuk melaksanakan ibadah haji.

Keidentikan "masyarakat santri" juga ditunjukkan dalam segi bangunan fisik. Hampir setiap rumah orang Madura, di ujung barat halaman, pasti dibangun *langgar* atau musalla sebagai tempat keluarga melakukan sholat. Penempatan lokasi bangunan ibadah yang berada di ujung barat halaman ini dimaksudkan sebagai simbolisasi lokasi Ka'bah yang merupakan kiblat bagi orang Islam ketika melakukan sholat.[9]

Tidaklah mengherankan jika keseluruhan bangunan hidup dan kehidupan masyarakatnya tak dapat dilepaskan dari kultur keagamaannya yang teramat khas tersebut. Menarik sekali, kalau melihat prilaku dan pola kehidupan masyarakat Madura yang teramat khas itu. Kalau diamati, masyarakat Madura biasanya selalu didiskripsikan oleh etnik lain jauh berbeda dengan pandangan orang Madura tentang diri mereka sendiri.

Salah satu tradisi yang amat penting bagi masyarakat Madura adalah kesopanan yang harus dijunjung tinggi. Walau orang di luar Madura menilai mereka sangat kasar, namun bagi orang Madura penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan dijunjung sangat tinggi. Pentingnya nilai kesopanan ini nampak dari ungkapan *ta'tao batona langger* atau *ta'tao padhuna langger* (tidak pernah mengenyam sekolah atau pendidikan agama). Maksudnya, orang tersebut belum pernah masuk *langgar* dan mengaji atau belum pernah mondok di pesantren, sehingga tidak tahu tata krama kesopanan. Ungkapan ini untuk orang yang tidak tahu atau melanggar nilai-nilai kesopanan.

Ungkapan lain yang memberikan nasihat dan ajaran tentang keharusan bersopan santun adalah : *pa tao ajalan jalana jalane, pa tao neng*

---

[8] *Kabupaten Sumenep dalam Angka* 2000, hlm. 98.
[9] Lihat Latief Wiyata, *op, cit.*, hlm. 44.

ngenneng, pa tao a ca ca (yang menjadi kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, harus tahu saatnya diam, harus tahu saatnya berbicara). Pentingnya seseorang berperilaku yang baik nampak dalam ucapan yang sering dinasehatkan orang Madura kepada anaknya, *oreng bagus ariya benni enilai deri gantheng otabe radhin robana, tape deri tatakramana (tingkahlako). Sanajjan bagus ropana tape tatakramana jube', tade' argena* (meskipun bagus atau cantik kalau tata kramanya jelek, dapat membuat hati menjadi tidak enak). Hal ini bermakna bahwa orang Madura harus selalu tahu aturan, nilai dan tata krama dalam setiap tindakannya. Selain itu, setiap kewajiban harus dilaksanakan dengan mendasarkan pada aturan-aturan tata krama yang ada.

Dasar utama dari nilai-nilai kesopanan adalah penghormatan orang Madura kepada orang lain, terutama yang lebih tua. Nilai-nilai kesopanan ini mengatur hubungan antargenerasi, jenis kelamin, pangkat dan posisi sosial. Masyarakat Madura sangat mengutamakan penghormatan dan penghargaan, apalagi kepada yang lebih tua atau yang mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi, sehingga menjadikan nilai-nilai kesopanan menjadi sangat penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembicaraan tentang agama bagi masyarakat Madura adalah identik dengan Islam. Islam sangat meresap dan mewarnai pola kehidupan masyarakat. Islam merupakan hal suci yang harus dibela dan dipertahankan. Betapa pentingnya nilai-nilai agama terungkap dari ajaran *abantal syahadat, asapo' angin, apajung Allah.* Artinya, masyarakat Madura sangat religius. Masyarakat Madura tergolong pemeluk Islam yang taat. Demikian lekatnya Islam pada masyarakat Madura, sehingga akan terdengar aneh apabila ada orang Madura yang tidak beragaman Islam.

Simbol keagamaan yang seringkali digunakan adalah kyai. Itulah yang menyebabkan lapisan atas pada stratifikasi sosial ditempati oleh para kiai. Mereka bukan hanya sebagai pemuka agama namun juga sebagai pemimpin masyarakat. Para kyai dipandang memiliki kendali legitimasi dan otoritas kharismatis, sehingga buah pikirannya mudah sekali untuk disepakati. Kepemimpinan yang disandang para kyai adalah bersifat polymorphie atau berpengaruh penting dalam beberapa bidang sekaligus. Bukan hanya dalam bidang keagamaan, melainkan juga dalam kegiatan sosial, bahkan juga politik.

Harapan yang diberikan masyarakat kepada kiai sangat besar sekali. Ia dianggap sebagai personifikasi yang luas pengetahuannya tentang agama Islam, pembangkit inspirasi dan aspirasi, pembentuk kebijakan yang arif, bahkan dituntut kesanggupannya menjadi seorang politikus yang cerdik. Ciri dasar kehidupan sosial budaya tersebut merupakan ciri orang dan masyarakat Madura secara keseluruhan, tak terkecuali orang dan masyarakat Madura yang bertempat tinggal di luar pulau Madura.

2. Politik

Kehidupan politik orang Madura tidak dapat dipisahkan dari dimensi agama (Islam). Madura yang penduduknya mayoritas Islam dalam orientasi politik juga cenderung menganut partai Islam. Pada masa Orde Lama, orientasi politik orang Madura lebih condong pada Nahlatul Ulama. Namun sejak berakhirnya kudeta tahun 1965 dengan digantikan pemerintahan Orde Baru, partai politik yang pada masa Sukarno begitu banyak, oleh pemerintah difusikan menjadi tiga, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Masyarakat Madura dalam peta perpolitikan lebih condong ke PPP.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub-sub bab sebelumnya bahwa peranan kiai dalam masyarakat Madura sangatlah besar. Secara historis, kiai dalam masyarakat tradisional (baca masyarakat NU) tidak lepas dari pondok pesantren.[10] Sebagai panutan masyarakat dan simbol keagamaan, seorang kiai mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang luas. Biasanya kekuasan seorang kyai tidak hanya terbatas pada santrinya saja tetapi juga pada masyarakat disekitarnya. Apalagi jika seorang kyai juga sebagai pendukung partai politik tertentu.

Selama pemerintahan Orde Baru, Madura merupakan basis dari PPP. Hampir dalam setiap pemilihan umum perolehan suara yang terbanyak dari wilayah Madura dipegang oleh PPP. Hal ini tidak mengherankan jika dikaitkan dengan sosial budaya masyarakat Madura yang terpengaruh oleh kultur masyarakat santri. Kemenangan PPP dalam setiap pemilihan umum tidak

[10] Lihat Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kekuasaan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1999).

terlepas dari kepatuhan masyarakat terhadap kyai. Namun begitu sering kali dalam kehidupan politik masyarakat Madura sarat dengan kekerasan politik. Seakan-akan orang Madura dalam kehidupan politiknya tidak sempurna tanpa adanya kekerasan. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah perilaku politik masyarakat Madura ini dipengaruh oleh karakter orang Madura yang identik dengan kekerasan? Permasalahan itu tidak bisa dijawab dengan mudah, karena masalah tersebut sangat kompleks. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa berbagai peristiwa yang berkaitan dengan politik kekerasan sering mencuat dalam pentas politik Madura dan bahkan sampai terdengar oleh pusat.

Masih segar dalam ingatan kita tentang insiden pembakaran sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) akibat kecewa terhadap hasil pemilu 1997. Saat itu, masyarakat Kabupaten Sampang ramai-ramai menentang hasil pemilu yang dinilai penuh rekayasa dan kecurangan. Atas desakan masyarakat, pemilu pun diulang. Namun, masyarakat masih juga tidak puas lantaran pemilu ulangan hanya dilakukan di sejumlah TPS yang terbakar, bukan pada seluruh kabupaten sebagaimana yang mereka kehendaki.

Sebelumnya, tahun 1993, ratusan petani dengan tegas menolak tunduk kepada pemerintah dengan melakukan perlawanan terhadap upaya pembebasan tanah untuk sebuah proyek ambisus, berupa waduk/bendungan yang kemudian dihentikan. Insiden yang sempat menewaskan empat warga Nipah ketika bentrok dengan tentara itu kemudian mencuatkan nama daerah itu dalam pentas politik nasional dengan sebutan tragedi Nipah. Saat itu pulalah, nama kyai tokoh PPP kharismatis, KH Alawy Muhammad meroket masuk dalam daftar nama politisi nasional.

Apabila kita tengok kebelang, dalam pemilu 1982, Kabupaten Sampang yang menjadi basis PPP memperoleh kemenangan mutlak sebanyak 23 kursi dibanding partai pemerintah yang waktu itu masih bernama Golongan Karya yang hanya mendapat sembilan kursi. Pada pemilu 1987, Golkar melakukan perlawanan frontal dengan operasi birokrasinya sehingga berhasil mendongkrak suaranya hingga memiliki 16 wakil di DPRD sementara PPP tinggal punya 20 wakil. Golkar pada pemilu tahun tahun itu memetik kemenangan di beberapa kabupaten di Madura, kecuali Sampang.

Puncaknya, dalam pemilu 1992 Sampang berhasil di-kuning-kan terbukti perolehan suara PPP jauh merosot. Golkar mendominasi perolehan suara di seluruh kabupaten. Penyebab utama dari kemenangan Golkar pada waktu itu adalah kembalinya NU ke Khittah 1926 pada sidang Muktamar Situbondo. Melalui muktamar itu diputuskan bahwa NU mundur dari arena politik praktis dan akan lebih banyak berkonsentrasi pada kegiatan sosial keagamaan. Keputusan tersebut dengan sendirinya juga berarti NU melepas keterikatan dengan PPP. Keputusan tersebut sudah barang tentu membuat PPP kehilangan banyak suara baik di tingkat nasional maupun daerah. Sesudah tahun itu, kyai tidak lagi memberikan suaranya pada satu blok yakni PPP, tetapi tergantung sepenuhnya pada kyai dan massanya secara individual.

Pemilu terakhir pada masa Orde Baru, pemilu 1997, Golkar memperoleh suara paling banyak di Madura, diikuti PPP dan PDI. Apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya Golkar telah mengalami peningkatan suara yang cukup tajam, dan sebaliknya PPP mengalami penurunan yang cukup sinifikan. Kemenangan Golkar tersebut tidak lepas dari strategi dan cara-cara represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat, guna memenangkan partai yang berkuasa. Tindakan represif tersebut sekaligus berhasil meminggirkan peran ulama di Madura dari arena politik.

Perubahan konstelasi politik baru terjadi setelah Soeharto lengser dan situasi politik berubah lantaran dibebaskannya masyarakat membentuk partai politik. Masyarakat Madura yang berbasis Nahdlatul Ulama (NU) dan sifat kepatuhan pada kyai yang cukup tinggi turut mempengaruhi ketika muncul wadah baru bagi *nahdliyyin* dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Hadirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dijadikan "partai resmi" warga NU membuat ulama di Madura pecah. Sebagian masih bertahan di PPP dan sebagian lainnya berafiliasi dengan PKB. Pada tahun 1999 terjadi titik balik dalam hubungan antara ulama dan pemerintah, karena pada waktu itu ulama memberikan suaranya pada sebuah blok, yakni berpihak pada partai baru PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Kooptasi Golkar mulai surut, para ulama Madura pun, mulai masuk pada pilihannya masing-masing, akni PKB atau PPP. Dalam pemilu tahun 1999 di Madura, PKB muncul sebagai partai pemenang, diikuti oleh PPP, PDI-P, Golkar dan PAN. Dalam batas tertentu PKB, tidak lepas dari

peranan ulama yang berbasis NU, walaupun partai tersebut mendeklarasikan diri sebagai partai yang "terbuka". Dari perolehan suara tersebut tampak bahwa ulama (PKB dan PPP) kembali mendapatkan dominasinya di Madura. Artinya adalah pengaruh ulama pada masyarakat kembali berada "di atas" pemerintah.

Berakhirnya pemerintahan sentralistik ternyata berimbas pada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan lama yang nyaris tanpa ada gejolak setiap pemilihan pimpinan di daerah kini berubah drastis. Hampir setiap pemilihan bupati maupun gubernur di daerah selalu diwarnai pertarungan antarpartai politik. Sering terjadi pemilihan bupati berubah menjadi konflik horizontal seperti perang antara pendukung dan penentang. Konflik terjadi juga saat aspirasi masyarakat yang tidak setuju dengan bupati terpilih, lalu menyerang para wakil rakyat. Selain perang massa dan gesekan ditingkat horizontal antar pendukung parpol, pemilihan bupati menjadi komoditas politik parpol, yang ujung-ujungnya mencuatkan isu *money politics* ke permukaan.

Perolehan suara PKB dalam pemilu 1999 cukup membuat konstelasi politik berubah drastis. Benar kata pepatah: "dalam politik tidak ada kawan abadi". Perolehan suara PKB yang mampu menempatkan 18 wakilnya di DPRD, membuat PPP yang "hanya" kebagian 12 kursi itu seakan kehilangan kekuatan.

Hasan Asy'ari yang menjadi motor utama PPP, kemudian membuat kontak diam-diam dengan Fadhilah Budiono, seterunya pada masa lampau. Kontak itu dilakukan terutama saat konferensi daerah (konferda) PPP menjelang munculnya isu kelahiran partai-partai baru. Kebetulan pula, saat itu KH Fachrurrozy (belakangan menjadi Ketua DPC PKB Sampang) masih jadi aktivis PPP yang bersama beberapa tokoh muda lainnya ber-"oposisi" terhadap kepemimpinan Hasan. Saat itulah, Hasan bergadengan tangan dengan Fadhilah untuk mengamankan diri dari perlawanan Fachrurrozy yang bersekutu dengan 12 kiai muda lainnya. Cukup menarik perubahan politik yang begitu cepat terjadi di Madura. Masyarakat yang secara kultural mempunyai pandangan yang sama dalam hal organisasi keagamaan, yakni warga Nahdatul Ulama (NU), dalam perkembangannya muncul friksi.

3. Ekonomi

Tidak jauh bedannya dengan Jawa, penduduk Madura banyak menyandarkan kehidupan ekonominya pada pertanian. Namun karena kondisi tanah yang kurang subur menjadikan Madura kurang berhasil dalam produk pertanian dibanding dengan daerah lainnya (Jawa). Penduduk pulau Madura sebagian besar bekerja di sektor pertanian selanjutnya diikuti di sektor perdagangan, industri dan kemudian di sektor jasa kemasyarakatan. Rendahnya partisipasi angkatan kerja di sektor industri disebabkan oleh karena memang terbatasnya industri yang ada di Madura. Sedangkan pertanian yang ada sebagian besar adalah pertanian lahan kering. Oleh karenanya sangat bergantung kepada musim. Namun demikian karena tidak ada alternatif lain tentu saja mereka yang ingin bekerja terpaksa memilih sektor pertanian. Pendidikan mereka umumnya rendah oleh karenanya mereka mencoba mengadu nasib di bidang informal khususnya perdagangan dan jasa. Mereka yang tidak tertampung untuk mendapatkan kerja di Madura kemudian pergi migrasi ke luar pulau. Itulah sebabnya tingkat mobilitas orang-orang Madura cukup tinggi. Mencari alternatif pekerjaan di luar Pulau Madura banyak dilakukan oleh penduduk pulau itu. Mereka tidak hanya pergi ke Pulau Jawa, melainkan juga ke pulau Sumatra dan wilayah lain di Indonesia. Selain itu mereka juga ada yang menjadi TKI dan TKW di luar negeri. Dari berbagai negara tujuan yang menjadi harapan untuk memperbaiki tingkat pendapatan, Arab Saudi menjadi pilihan utama. Negara itu dipilih sebab selain mendapatkan uang dari negara minyak itu, mereka juga bisa melakukan ibadah haji.[11]

Penggunaan tanah di Madura menurut data BPN terdiri dari atas:

1. Baku Sawah Resmi (PU):
   - Sawah tehnis : 133.53 km^2
   - Sawah non tehnis : 38,49 km^2
   - Sawah Sederhana : 17,74 km^2
2. Baku Sawah Tidak Resmi (non PU) :
   - Sawah tehnis : 67,69 km^2

[11] Wawancara dengan kesra Banyuates, pada tanggal 30 Juni 2004 di Sampang Madura.

- Sawah non tehnis : 8,76 km^2
- Sawah sederhana : 6,68 km^2

3. Sawah Tadah Hujan : 603,70 km^2
4. Tegal : 2,463,20 km^2
5. Pemukiman : 460,11 km^2
6. Perkebunan : 354,49 km^2
7. Kawasan Hutan : 504,15 km^2
8. Kolam Ikan : 129,61 km^2
9. Lain-Lain : 100,61 km^2

Rendahnya sektor bangunan dan konstruksi menunjukkan bahwa pembangunan secara fisik di daerah Madura masih sangat terbatas, demikian pula dengan sektor pengangkutan dan perhubungan, hanya sekitar 2,60% saja mereka yang bekerja di sektor ini (lihat Tabel. 3.1).

Tabel. 3.1 Penduduk Madura
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

No.	Lapangan Pekerjaan	Presentase
1.	Pertanian	63,60
2.	Industri	9,40
3.	Bangunan	3,50
4.	Perdagangan	11,10
5.	Pengangkutan & Perhubungan	2,60
6.	Jasa Kemasyarakatan	7,60
7.	Lain-lain	2,60
	Jumlah	100,00

Sumber: *Jawa Timur Membangun 1993*

Dalam tulisan Huub de Jonge 1989, terlihat bahwa sejarah politik dan ekonomi Madura ditandai dengan tiga titik penting yaitu : [12]

1. Datangnya Kolonialisme Barat ke Pulau Madura
2. Awal Pemerintahan Kolonial secara langsung pada pertengahan abad 19
3. Kemerdekaan Indonesia tahun 1945

[12] Huub de Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam; Studi-Studi Antropologi Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia, 1998).

Ketiga peristiwa penting ini mempunyai pengaruh terhadap perubahan dalam politik dan ekonomi. Dengan peristiwa ini terjadilah perubahan pada kelakuan, hubungan dan ketergantungan politik dan ekonomi yang baru di kalangan masyarakat Madura baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya de Jonge dengan berdasarkan titik-titik ini membedakan empat periode yang berbeda secara ekonomis dan politik dalam sejarah Madura. Periode ini terdiri dari:

a. Periode pra-kolonial
b. Pemerintahan kerajaan tradisional selama waktu pemerintahan kolonial tak langsung
c. Pemerintahan Kolonial langsung
d. Periode sesudah kemerdekaan

Sejak Belanda mengambil alih kekuasaan dari tangan Mataram, kemudian Belanda menyerahkan pemerintahan sendiri kepada raja-raja di Madura. Kekuasaan ini terdiri dari pajak, hubungan-hubungan diplomatik, penggunaan dan pembagian alat-alat kekuasaan, pemerintahan dan pengadilan. Melalui raja-raja, Belanda memungut pajak dari rakyat, semula pajak yang dibayarkan berupa barang-barang. Raja tidak hanya memungut pajak dari penduduk sebesar upeti yang harus dibayarkan pada pemerintah Belanda akan tetapi juga memungut pajak lainnya yang hasilnya digunakan untuk keluarga raja sendiri, kerabat, para pamong dan pengabdi.

Periode ini berjalan kurang lebih selama 1 $^{1}/_{2}$ abad, dan mempunyai dampak terhadap keadaan Madura. Karena kebijakan Belanda yang tidak lansung menangani Madura tentu saja mempunyai pengaruh terhadap perkembangan, Madura menjadi tidak berkembang atau ketinggalan dibandingkan dengan daerah lainnya. Jawa dalam periode itu yang sudah mempunyai berhubungan dengan kerajaan lain di Mancanegara. Kepada raja, orang Madura harus membayar upeti berupa sebagian dari hasil sawahnya, selain itu juga masih harus bekerja pada perkebunan-perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda.

Pada abad ke-18 dan ke-19 mata pencaharian orang Madura adalah pertanian subsisten. Bukan hanya tanah yang bisa diairi akan tetapi mereka juga menanam di tegalan dan juga di pekarangan. Penduduk memproduksi untuk

keperluan mereka sendiri, selain bertani di sepanjang pantai utara, banyak orang menangkap ikan. Pada zaman kerajaan ini petani diwajibkan untuk membayar 1/3 atau 1/2 dari penghasilannya. Pembayaran pajak ini tidak saja dibayar dengan hasil pertanian akan tetapi juga dibayar dengan mata uang (*currencies*). Pembuatan garam yang dilakukan oleh masyarakat pantai juga memberi kontribusi yang signifikan bagi penduduk dan juga pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu sejak masa kerajaan sampai masa kolonial perdagangan garam ditangani oleh pemerintah dengan menetapkan sejumlah pajak. [13]

Dalam penelitiannya de Jonge mencatat dimana terjadi penduduk tidak mau merubah tegalan menjadi sawah karena tegalan bila sudah diairi akan disita oleh raja.[14] Pajak atas tanah sudah sejak era kerajaan ditarik demikian pula dengan pajak rumah tangga. Selain membayar pajak penduduk juga diharuskan melakukan kerja paksa.

Pada era kerajaan ini ekonomi Madura dilambangkan sebagai ekonomi model upeti dalam mana subsisten dan pengiriman barang dan jasa pada stratum atas dari masyarakat diutamakan. Ekonomi pada masa tersebut tidak saja berorientasi terhadap sistem agraris, karena perdagangan juga menempati posisi penting. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh de Jonge pada saat itu banyak pedagang bermukim di kota-kota dan sepanjang pantai.

Pada pertengahan abad ke -19 Madura mempunyai status yang sama dengan jawa, yaitu dikuasai secara langsung oleh pejabat kolonial. Raja dijadikan petugas-petugas pribumi dan digaji seperti rekan-rekannya di Jawa. Sejak itu pajak atas tanah dan pajak rumah tangga dihapuskan menurut De Jonge pajak ini diganti dengan iuran yang relatif rendah. Sistem kerja paksa dikurangi. Pada abad ke - 20 kerja paksa dihapuskan. Berbagai fasilitas untuk rakyat dbangun seperti pemeliharaan jalan raya dan pembuatan serta pemeliharaan kanal-kanal irigasi.[15] Petani menerima hak milik atas tanah menurut hukum barat, oleh karenanya pada masa itu seluruh pulau Madura di survei dan di petakan. Petani berhak atas segala hasil tanah mereka.

---

[13] Kuntowijoyo, " Agama, Islam dan Politik: Gerakan-gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura, 1913 1920" dalam Huub de Jonge (ed), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi. Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura* (Jakarta: C.V. Rajawali Pers, 1989)

[14] *Ibid.*, hlm. 59-77.

[15] *Ibid.*, hlm. 69.

Pada mulanya pemerintahan kolonial ini tidak diterima oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan sikap mereka yang pindah dari Pamekasan (1858) ke Jawa. Jumlah mereka mencapai ribuan, dan kemudian mereka baru kembali setelah menyadari bahwa keadaan tidak seburuk yang mereka duga. Masuknya pemerintahan langsung ini mengakibatkan terbukanya pulau Madura. Pemerintah memperbaiki infra struktur seperti perluasan dan perkembangan jalan. Pertanian dirangsang untuk semakin berkembang dengan dibangunnya dam, waduk dan saluran-saluran irigasi. Pemerintah kolonial juga membentuk dinas pertanian dan dinas peternakan.

Pada tahun 1806 beberapa tuan tanah Eropa datang mengadu untung ke Madura. Mereka menyewa tanah untuk membuka perkebunan tebu akan tetapi usaha mereka ini gagal, karena penduduk lokal belum siap menerima teknologi baru dalam hal penanaman tanaman tebu. Pemerintah kolonial memodernisasi produksi garam dan pada tahun 1899 membangun pabrik garam briket di Kalianget. Kemudian perusahaan swasta Belanda *Madoera Stoomstram Maatschappij* membuka jaringan kereta api antara Kamal dengan Kalianget. Jaringan tersebut dimulai tahun 1897 dan selesai pada tahun 1901. Petani pada saat itu juga mulai menanam tanaman lain selain untuk kepentingan sendiri. Pada saat itu mulailah proses komersialisasi, walaupun masih dalam skala kecil. Komoditas yang paling penting pada saat itu adalah tembakau.[16]

Mulai saat itu tampak adanya perkembangan dalam produksi, selain adanya produksi subsisten juga berkembang ekonomi marginal. Pada saat itu petani yang mempunyai tanah cukup luas memberikan kesempatan kepada petani kecil untuk bekerja sama. Mereka tidak lagi bekerja dalam keluarga akan tetapi sudah meluas. Sistem ini bukan saja terjadi di sektor pertanian akan tetapi juga di bidang perikanan yang menggunakan teknik penangkapan ikan yang baru dengan perahu yang lebih besar.

Pada saat itu pula industri tradisional dan industri-industri rumah tangga muncul. Perkembangan perekonomian ini ditandai pula dengan semakin meningkatnya jumlah dan intensitas kegiatan pelayaran.

[16] *Ibid*, hlm. 156.

Perekonomian Madura ditandai pula dengan semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan penduduk. Dalam arti seorang petani juga melakukan aktivitas menangkap ikan dan pekerjaan lain umpamanya berdagang.

Penjajahan Jepang dan usaha Belanda untuk kembali ke Indonesia, membawa pengaruh yang buruk bagi pulau Madura. Hampir seluruh Madura sering terjadi kekurangan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Beberapa desa bahkan mengalami kelaparan. Pada masa itu banyak orang-orang Madura bermigrasi ke pulau Jawa, dan sebagian penduduk laki-laki dijadikan romusha. Oleh karenanya pada pasca penjajahan, residen pertama Madura sesudah kemerdekaan R. Soenarto Hadiwidjojo menjadikan masa jabatan sebagai periode pemulihan. Langkah-langkah residen ini adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan Madura yang bisa dipakai pada masa yang akan datang. Pemerintah Daerah Madura pertama kali melakukan upaya pemberantasan buta huruf dan mendirikan sekolah-sekolah, selanjutnya langkah berikutnya adalah penghijauan dan reboisasi. Periode pemulihan kemudian diikuti suatu periode pembangunan selanjutnya pada periode orde baru pembangunan mulai direncanakan dengan Repelita. Sejak saat itu dana dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional diinvestasikan untuk pulau Madura. Sebagian dari dana tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum dan sebagian yang lain digunakan untuk proyek-proyek khusus. Komunikasi semakin lancar dan baik, listrik juga mulai masuk pedesaan Di semua desa ada sekolah dasar, di kota kabupaten sudah ada sekolah lanjutan umum dan sekolah kejuruan.

Pada sektor pertanian pembangunan dilakukan dengan memperluas areal pertanian dan juga memperkenalkan tanaman-tanaman baru seperti jambu mete dan jeruk. Demikian pula dengan perikanan, pengenalan alat tangkap baru dan penggunaan motor serta pembukaan pasar-pasar baru. Pembangunan yang dilakukan ini menimbulkan kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Hal ini bisa diukur dengan naiknya pendapatan perkapita dari tahun ke tahun baik menurut harga saat ini ataupun harga konstan.

Tembakau merupakan komoditi yang dikembangkan dan hal ini merupakan contoh yang baik. Perdagangan tembakau semakin hari semakin meningkat. Pasar dari tembakau ini hampir seluruhnya untuk komoditas di luar

pasar setempat. Pada saat itu jangkauan jaringan perdagangan tembakau mencapai lapisan yang semakin meluas.

De Jonge mencatat bahwa proses komersialisme tidak hanya di bidang pertanian tetapi pada tingkat tertentu juga terjadi di perikanan dan industri kecil. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam pemilikan dari sarana produksi dan hubungan kerja. Secara umum bila sebuah daerah diintegrasikan kedalam suatu masyarakat yang lebih luas, mekanisne non personal seperti pasar akan semakin penting. Sebaliknya bila suatu daerah kurang diintegrasikan, hubungan-hubungan personal, koalisi-koalisi atau aliansi semakin penting

Selanjutnya De Jonge berpendapat bila Madura meninggalkan status semi-periferi dalam ekonomi nasional maka karakteristik vertikal akan hilang. Salah satu cara menurut dia adalah ditimbulkannya industri yang berfungsi sebagai penggerak dalam pembangunan yang lebih luas.

Kesimpulan dari studi De Jonge menyatakan bahwa:

1. Telah terjadi banyak perubahan sosial dan ekonomi yang penting dalam periode seratus tahun ini di Madura. Komunikasi tingkat lokal, regional, propinsi dan nasional berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh karena infrastruktur yang semakin baik dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi.
2. Orang Madura masih akan tetap berorientasi terhadap pertanian subsisten. Pemilikan tanah penting sekali dan tiap pemilik mencoba mempertahankan tanahnya sekalipun tanah tersebut sempit sekali.
3. Pembangunan di Madura lebih mengarah kepada modernization, pembangunan dalam pengertian *development* belum nampak. Modernisasi mengandung arti suatu daerah mudah dipengaruhi oleh kesulitan-kesulitan yang terjadi dipusat. Oleh karenanya de Jonge selanjutnya menyarankan diperlakukannya variasi tanaman untuk memperkecil resiko bagi petani. Bagi pemerintah de Jonge menyarankan untuk memperkenalkan industri-industri ringan di setiap kota di Madura.

Pertanian sampai saat ini di seluruh kabupaten di Madura masih memberikan sumbangan yang terbesar dibandingkan dengan sektor yang lain. Namun demikian sumbangan pertanian dari data yang ada tahun 1986 sampai dengan tahun 1993 secara persentase menurun. Sektor perdagangan dari

tahun ke tahun naik sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).[17]

Penurunan sumbangan sektor pertanian ini sebenarnya harus diimbangi oleh kenaikan di sektor industri, akan tetapi dalam kenyataannya penurunan ini justru terserap oleh sektor perdagangan. Kurangnya investasi di sektor industri salah satu penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur yang tersedia di Madura. Lebih-lebih lagi hambatan transportasi melalui feri yang tentunya akan menimbulkan biaya bila dibandingkan dengan transport darat.

Oleh karena tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya untuk mendirikan industri di Madura. Pertimbangan lokasi pabrik, pasar dan pelabuhan tentu saja akan menjadi pertimbangan yang menentukan lokasi sebuah industri. Industri kecil dan kerajianan rakyat yang ada di Madura masih tidak terlalu banyak namun demikian sudah ada sentra-sentra yang dapat menghasilkan kerajianan dari batu, bambu, tali dan lain sebagainya.

Sektor pertanian lebih mudah dapat menyerap tenaga kerja, karena tidak membutuhkan ketrampilan yang terlalu tinggi. Sehingga siapa saja yang hendak masuk dalam sektor ini dapat dengan mudah mendapatkannya. Sektor pertanian juga masih menyerap paling banyak tenaga kerja, di lain pihak sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin menurun, hal ini akan menyebabkan pendapatan perkapita bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lain terutama di sektor industri.

Sektor pemerintahan di Madura ini menempati urutan ke tiga dalam sumbangannya terhadap PDRB. Sumbangan empat kabupaten di Madura terhadap PDRB tahun 1993 Jawa Timur paling tinggi dicapai oleh Sumenep (2,13%), kemudian disusul oleh Bangkalan (1,45%), Sampang (1,35%) dan Pamekasan (0,98%). Sedangkan secara menyeluruh di tingkat propinsi yang memberi sumbangan terbesar adalah Surabaya (15,27%), Kabupaten Malang (6,33%), dan Kodya Kediri (5,46%). Daerah penyumbang terbanyak pada PDRB Jawa Timur (Rp. 44.628.850,66 juta harga berlaku) adalah daerah-daerah yang mempunyai industri yang cukup banyak.

---

[17] Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 1993

Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto

SEKTOR		BANGKALAN			SAMPANG			PAMEKASAN			SUMENEP		
		1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993
1	Pertanian	234,70	249,40	284,40	236,20	265,20	300,10	154,40	165,20	184,90	348,90	386,50	422,60
2	Pertambangan dan Penggalian	4.060,00	5.162,00	5.893,00	5.684,00	6.918,00	7.841,00	3.374,00	4.159,00	4.552,00	38,09	48,95	66,84
3	Industri Pengelolahan	27,16	30,37	35,48	10,61	12,18	13,39	6.055,00	7.149,00	7.942,00	26,26	29,98	33,51
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1.655,00	1.920,00	2.034,00	843,30	992,00	1.018,00	1.489,00	1.721,00	1.774,00	1.326,00	1.499,00	1.545,00
5	Bangunan / Konstruksi	12,86	14,44	16,94	19,57	22,32	25,90	15,67	18,27	21,30	23,48	26,78	31,06
6	Perdagangan	101,70	116,90	137,30	122,60	141,30	158,30	89,32	95,58	109,70	189,60	209,70	240,80
7	Pengangkutan dan Komunikasi	14,82	17,28	21,70	15,40	16,75	19,20	25,78	28,37	33,11	26,80	29,30	35,56
8	Bank dan L.K. Lain	7.516,00	7.299,00	8.078,00	1.899,00	1.841,00	2.100,00	4.051,00	4.604,00	31.57,00	3.534,00	4.259,00	4.774,00
9	Sewa Rumah	29,10	31,25	37,29	5.345,00	5.648,00	6.333,00	4.774,00	5.147,00	5.828,00	7.064,00	7.615,00	8.613,00
10	Pemerintahan dan Pertahanan	54,82	65,07	74,13	47,03	50,65	56,99	53,59	53,99	61,04	67,90	76,76	87,07
11	Jasa-jasa	28,03	29,90	34,18	19,38	20,91	23,71	27,57	29,45	33,36	43,64	46,63	53,29
PDRB		516,50	569,10	657,50	484,60	544,80	615,00	86,10	413,60	468,70	776,40	868,00	985,70

Sumber: *Kantor Statistik Propinsi Jatim* 1994

Perkembangan PDRB di Madura sangat lambat karena sedikitnya industri dan pertanian yang masih dominan dalam kehidupan masyarakat Madura adalah pertanian lahan kering yaitu pertanian yang bergantung pada hujan. Sebagaimana dinyatakan oleh de Jonge petani-petani Madura sampai saat ini sebagian besar masih subsisten, terutama pada daerah-daerah yang tidak memiliki pengairan teknis. Pada musim kemarau mereka meninggalkan sama sekali tanahnya, mereka memilih pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya mereka yang bermigrasi ini tidak mempunyai ketrampilan untuk berkompetisi dalam kehidupan perkotaan, oleh karenanya mereka memasuki sektor jasa atau informal yang tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. Lagi pula mereka ini berkerja di tempat yang dituju hanya sementara waktu. Karena pekerjaan itu bukan merupakan pekerjaan utama.

Keharusan untuk mempertahankan hidup dalam alam yang terbatas serta tekanan-tekanan dari penguasa pada zaman kerajaan dan penjajahan berakibat pada sikap ekonomi Madura yang selalu dapat memanfaatkan tiap peluang yang mempunyai nilai ekonomis, etos kerja semacam ini tetap dimiliki

oleh orang-orang Madura sampai saat ini. Namun demikian mereka yang tidak mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang cukup, melakukan aktivitas ekonomi tanpa dibekali dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Mereka mempunyai pendirian asal mendapatkan uang dengan halal dengan melakukan usaha tanpa tergantung kepada siapapun sehingga mereka tidak terikat dan juga tidak mau terikat dengan aturan-aturan. Mereka lebih suka bekerja sendiri, daripada harus bekerja pada orang lain, dengan sistem penggajian mingguan.

Solidaritas di kalangan orang Madura sangat tinggi, hal ini ditunjukkan oleh mereka yang berhasil di Jawa atau tempat lainnya selalu akan mengajak saudara dan teman-temannya melakukan aktivitas bersama-sama, setidak-tidaknya memberikan informasi kepada mereka. Pola aktivitas di pertanian masih sangat kental di kalangan orang Madura terutama bila mereka berada di perantauan, oleh karenanya bila mereka berhasil maka mereka akan mengajak saudaranya atau teman-temannya untuk bersama-sama melakukan aktivitas ekonomi.

Keberadaan pulau Madura yang terpisah dengan Jawa, menimbulkan persoalan yang tidak kecil. Hal ini ditunjukkan betapa tidak mudahnya orang bepergian dari Jawa ke Madura atau sebaliknya. Seringkali perjalanan terganggu dengan antrian yang panjang ketika akan menyeberang dengan menggunakan kapal feri. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Madura. Oleh karena itu, Jembatan Suramadu yang rencananya akan dibangun menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

C. Budaya

Mengenal budaya masyarakat sesuatu daerah di wilayah Nusantara yang luas berarti mengenal masyarakat daerah itu sendiri. Budaya merupakan suatu hasil karya suatu masyarakat dan biasanya dikaitkan dengan tradisi. Tidak jauh dengan itu, Madura sebagai bagian dari wilayah Nusantara juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas daerah itu. Pada umumnya masyarakat di luar Madura lebih mengenal tradisi budaya Madura dengan kerapan sapinya daripada tradisi budaya lainnya. Sebenarnya masyarakat

Madura banyak memiliki tradisi kebudayaan yang lain, seperti *rokat, nyadar, mantan legah*, dan topeng dhalang.

Rokat merupakan suatu upacara kurban yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat Madura untuk meminta perlindungan kepada Yang Kuasa. Menurut Kusnadi, bentuk upacara *rokat* ada dua yaitu, yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dan masyarakat petani. Dalam masyarakat nelayan, upacara ini dilaksanakan sekitar bulan Agustus di antara musim pertama panen ikan. Upacara ini ditujukan pada penguasa laut, yaitu Nabi Chidir, dan sebagian sesaji persembahan dalam upacara tersebut juga ditujukan pada malaikat empat. Sementara dalam upacara *rokat bume*, sesaji ini ditujukan pada empat malaikat yang menguasai empat arah mata angin, yaitu Jibril yang menguasai bumi bagian timur, Mikail menguasai bumi bagian selatan, Isrofil yang menguasai bumi bagian barat, dan Israil yang menguasai bumi bagian utara. Maksud pelaksanan upacara tersebut pada dasarnya adalah untuk memohon berkah, rezeki, perlindungan, dan keselamatan bekerja di laut maupun di darat. [18]

Sementara tradisi upacara *nyadar* atau *nazar* merupakan upacara ritual yang dikaitkan dengan pemujaan roh nenek moyang dan dianggap mampu membebaskan masyarakat dari segala musibah. Hasil penelitian Budiono di Penggirpapas, menyebutkan bahwa tradisi ini berhubungan erat dengan leluhur mereka, yaitu Anggosuto, yang dianggap sebagai penemu garam pertama dan yang mengislamkan masyarakat Penggirpapas. Tujuan utama dari upacara *nyadar* adalah menjaga keseimbangan.[19]

Mantan Legah adalah salah satu jenis tata rias pengantin dari keraton Sumenep. "Legah", dalam bahasa Madura berarti "terbuka". Prosesi ini diperagakan sepasang muda-mudi yang mengenakan busana macam *dodot* Jawa dengan warna khas Madura, kombinasi kuning, merah, dan hitam. Diawali datangnya pengantin pria yang ditandu empat pemuda sambil dipayungi, diiringi beberapa putri cantik yang memakai hiasan kepala mirip gaya busana pengantin Betawi yang dipengaruhi unsur ornamen Tiongkok.

---

[18] Lihat Kusnadi, "Tradisi Rokat Pangkalan di Pasean Madura", dalam Soegianto (peny), *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, (Jember: Tapal Kuda, 2003), hlm.177.

[19] Lihat Budiono, "Tradisi Nyadar Bagi Masyarakat Penggirpapas di Madura", dalam Soegianto (peny), *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, (Jember: Tapal Kuda, 2003), hlm. 224-231.

Rombongan berikutnya adalah wakil keluarga dan pengawal. Mereka ini memasuki halaman rumah pengantin wanita. Di ambang pintu, pengantin pria diturunkan, dan berjalan berjongkok (sebagai tanda hormat) menuju pengantin perempuan yang sedang duduk di baki besar terbuat dari kuningan dan duduk dengan cara membelakangi pengunjung.

Sstelah itu, pengantin laki - laki memutar baki (tanda pengabdian wanita) ke empat penjuru angin, hingga menghadap pada dirinya. Lalu pengantin wanita dibimbing ke luar dari baki menuju pelaminan. Begitu kedua mempelai duduk di pelaminan dilakukan upacara *ngocor* yang dilakukan sesepuh. Upacara *ngocor* adalah meneteskan bunga cempaka dan melati ke ubun-ubun kedua mempelai secara bergantian. Hal itu sebagai simbol adanya restu dari para sesepuh. Selanjutnya dilakukan kirab pengantin. Lalu pengantin duduk kembali di pelaminan dengan cara duduk bersimpuh. Bagi pengunjung yang diundang, seperti lazimnya saat menghadiri upacara pengantin yaitu mengisi pundi-pundi yang disediakan keluarga pengantin wanita yang dalam bahasa Madura disebut *abubu*. Upacara pengantin seperti ini boleh dikata sudah cukup jarang dilakukan oleh pendukung budayanya, karena itu ketika disuguhkan menjadi benar-benar menarik. Apalagi didukung dengan tata rias dan tata busana yang cukup apik.

Topeng Dhalang Madura adalah suatu jenis kesenian teater lokal tradisional. Menurut Soetrisno R, topeng dhalang Madura termasuk dalam kelompok seni pedhalangan, yang telah sanggup menerobos dinding zaman berabad-abad lamanya. Dalam sebuah hasil penelitian disebutkan bahwa topeng yang menjadi atribut utama dalam pertunjukan *Topeng Dhalang*, mempunyai sejarah yang lebih tua daripada kesenian pedhalangan itu sendiri.[20]

D. Sistem Kepemimpinan

1. Formal

Sistem kepemimpinan formal dalam masyarakat Madura dipegang oleh para pejabat pemerintah. Mulai dari bupati, camat sampai kepala desa.

---

[20] Lihat hasil penelitian Soetrisno R, "Topeng Dhalang Madura", dalam Syamsuri (ed) Proyek Peningkatan Sarana Pendidikan Tinggi, *Madura V: Kumpulan Makalah Lokakarya Penelitian Sosial Budaya Madura*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1981), hlm. 195-209.

Namun dalam kalangan bawah, kepala desa (*klebun*) mempunyai peranan yang penting, baik dalam urusan administrasi maupun dalam pelaksanaan program pemerintah. Dalam birokrasi Indonesia kepala desa mempunyai kedudukan yang ambivalen. Dia dianggap sebagai wakil dari penduduk setempat, dan tidak dipertimbangkan untuk posisi lain dalam kepegawaian. Dia bukan pejabat yang ditunjuk tetapi dipilih oleh rakyat desa. Sedang dalam pembayaran kepala desa tidak dibayar dengan uang tetapi dengan sebidang tanah atau *percaton*.

Sesungguhnya dalam kenyataan, otoritas kepala desa sangatlah terbatas. Dalam banyak kasus, menurut Elly Touwen-Bouwsma dari hasil penelitiannya tentang peranan kepala desa di Kabupaten Sampang (1978), kepala desa tidak mampu mengumpulkan keseluruhan jumlah IPEDA. Sebagaian rakyat desa tidak membayar pajak tanah, dan kepala desa terpaksa menutupi kekurangannya.[21]

Hal ini sangat berbeda dengan situasi masa panembahan (feodal). Kepala desa mempunyai kedudukan yang sangat berbeda di daerah pedesaan. Peranan mereka diabsahkan oleh jabatan mereka dalam pemerintahan Panembahan. Melalui sederetan hubungan dengan pejabat-pejabat lain, lurah-lurah itu secara pribadi mempunyai hubungan dengan sang penguasa sendiri. Atas dasar hubungan ini lurah memperoleh kedudukan status sosial yang tinggi dalam pandangan para petani. Pada masa feodal salah satu tugas lurah adalah untuk menjamin bahwa jasa pelayanan untuk para pemegang *apanage* dilaksanakan.

Begitu juga ketika Madura dikuasai pemerintah kolonial, kedudukan mereka semakin kuat. Mereka mendapatkan hak istimewa dari Panembahan dengan diberikannya sebidang tanah yang bebas dari pajak, dan dalam pengangkatannya Panembahan menambahkan satu aturan di mana dia menyatakan bahwa yang disebut "kepala desa" dilarang untuk mengganggu orang-orang yang melakukan jasa pelayanan pribadi, dengan perkecualian masalah-masalah kepolisisan.[22]

---

[21] Elly Touwen-Bouwsma, "Kepala Desa Madura: dari Boneka ke Wiraswasta", dalam Huub de Jonge (ed), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 136.

[22] *Ibid*, hlm. 146.

Di Madura pada masa sekarang, kedudukan kepala desa dalam sistem kepegawaian tidak banyak berubah dan hampir sama dengan sewaktu kurun kolonial yang terakhir. Mereka masih dipilih oleh penduduk desa dan tidak mempunyai gaji tetap. Sebagaimana mereka dulu, fungsi dari kepala desa merupakan perantara antara pemerintah dan masyarakat desa. Jabatan kepala desa (*klebun)* untuk masa sekarang merupakan ajang perebutan bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial tinggi dalam masyarakat desa. Abdur Rozaki dalam penelitiannya tentang kekuasaan kaum *blater*, menyebutkan bahwa jabatan kepala desa menjadi ajang untuk meningkatkan status dan menambah ketenaran.[23]

2. Non Formal

a. Kyai

Orang luar Madura selalu menilai orang Madura sangat taat dan patuh kepada figur atau tokoh tradisional (ulama atau kyai) daripada kepada figur atau tokoh formal. Sebutan kyai merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pondok pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Selain gelar kyai, mereka sering pula disebut orang alim, yakni orang yang mendalami ajaran agama. Di Madura, sebutan untuk ulama atau kyai seperti di atas adalah *keyae.* Seorang kyai biasanya mempunyai sebuah pondok pesantren, selain itu mereka juga mempunyai darah keturunan dari seorang *keaye.*

Perlu diketahui bahwa kepatuhan serta ketaatan orang Madura kepada figur ulama atau kyai sangat bersifat personal oleh karena itu sifatnya sangat lokal. Artinya, setiap kelompok orang Madura, bahkan secara lebih ekstrem, tidak tertutup kemungkinan setiap keluarga, cenderung mempunyai referensi terhadap figur tertentu sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak cukup hanya itu, referensi ini sangat terkait pula dengan faktor lokalitas di mana mereka berdomisili. Oleh karenanya, sangat mungkin terjadi figur ulama atau kyai ini bukan referensi dari kelompok masyarakat yang lain yang tempat domisilinya

[23] Lihat Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rejim Kembar di Madura,* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004).

kebetulan jauh.

Bila demikian halnya, mudah dimengerti apabila dalam kasus Sampang terjadi pertikaian antarkelompok pada tingkat *grass root* yang secara sosio-kultural mereka merupakan kaum nahdliyin dan bahkan sama-sama berafiliasi pada partai politik Islam.[24] Namun demikian partai politik yang dipilihnya berlainan, hal itu sesuai dengan pilihan dari tokoh panutannya. Sebab, sudah menjadi rahasia umum, sejak proses "demokratisasi" digulirkan, beberapa ulama atau kyai di Madura menjadi pengurus dari partai-partai politik baru sehingga secara "institusional" dan "personal" mereka mensosialisasikan pilihannya kepada para pengikutnya.

Kepatuhan masyarakat kepada kyai, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Islam di Madura. Islam sebagai identitas keagamaan di Madura terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang. Proses pengislaman penduduk Madura mulai intensif ketika raja-raja lokal di Madura mulai memeluk Islam. Seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan antara Madura dengan daerah lain, penyebaran agama Islam juga semakin meluas. Daerah Madura seperti Sumenep yang mempunyai potensi perdagangan yang cukup penting, tumbuh menjadi daerah Islam yang cukup signifikan.

Ulama atau *keaye* mendapat tempat yang cukup penting dalam kehidupan masarakat Madura, tidak hanya melalui proses sejarah saja, tetapi juga didukung oleh kondisi ekologi tegal dan struktur pemukiman penduduk yang menyebar dalam satuan-satuan kecil (*kampong*). Bebarapa *kampong* kemudian membentuk desa. Dalam setiap rumah penduduk Madura, umumnya ada surau dan setiap desa mempunyai masjid desa. Kepala masjid desa atau kyai desa berada di puncak hierarki sosial pedesaan. Kuntowijoyo menyebutkan bahwa pola pemukiman dan ekologi tegal yang demikian menyebabkan ulama tumbuh sebagai perekat solidaritas dan kegiatan ritual. Oleh karena itu, ulama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan orang Madura. Kyai yang mempunyai akar ke bawah, dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada seorang kepala desa yang hanya bersifat hubungan administratif ke atas. [25]

---

[24] Wawancara dengan Sutrisno, pada tanggal 28 Mei 2004 di Sampang, Madura.

[25] Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 588-589.

Penghormatan yang tinggi dari masyarakat Madura terhadap ulamanya dapat dilihat dari budaya orang Madura melalui ungkapan *buppa'-bhabbhu',guru,rato* yang dalam bahasa Indonesia berarti 'bapak-ibu, guru, ratu'. Makna ini menunjukkan hierarki kepatuhan dan ketaatan orang Madura pertama-tama kepada kedua orangtua yang telah melahirkan dan mengasuhnya. Penghormatan berikutnya kepada guru (figur ulama atau kyai) yang telah mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya, dan terakhir kepada figur *rato* (pemimpin formal). Sebutan itu muncul karena pada masa lalu di Madura berdiri beberapa kerajaan tradisional.

Sebagian besar mereka yang dibesarkan di pulau Madura pernah mendapatkan sentuhan pendidikan dari para kyai baik di pondok-pondok pesantren ataupun di tempat pengajian. Oleh karenanya mereka pada umumnya tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban-kewajiban ritual dalam hidupnya. Kyai atau guru dalam kehidupan masyarakat Madura tidak hanya tampak dalam masalah urusan sehari-hari saja, seperti perjodohan, pengobatan penyakit, mencari rezeki, mencari pekerjaan dan lainnya, tetapi juga dalam kehidupan yang akan datang, berupa ilmu agama. Dengan begitu sosok sang guru yang disebutnya kiai sangat dominan dalam kehidupannya kelak. Kepemimpinan formal tidak dapat mengalahkan dominasi para kyai dalam hidup mereka. Kyai telah memberikan bekal untuk kehidupan mereka saat ini dan kelak di kemudian hari, bukan saja semasa hidup di dunia akan tetapi juga kehidupan akhirat hal ini berbeda dengan pimpinan formal yang dibebani misi pemerintah sehingga dalam tugas-tugasnya banyak memberikan beban daripada memberikan hak. Kedudukan sosial kyai yang cukup tinggi dalam masyarakat Madura dapat dilihat dari pernyataan seorang informan, sebagai berikut.

> "Orang Madura selalu mendengarkan apa yang dikatakan kyai, apalagi kyai yang mempunyai kharisma yang besar. Mereka para kyai itu akan didatangi oleh masyarakat dan juga para pejabat untuk minta barokahnya, ada juga yang datang kesana kerena minta kesembuhan dan sebagainya. Pokoknya apa yang dikatakan kyai akan diikuti oleh pengikutnya, baik itu menyangkut pembangunan ataupun partai politik. Kalau ada program dari pemerintah sebaiknya kyai diajak

ngomong dulu, karena kalau tidak masyarakat akan susah untuk menerimanya. Saya yang berasal dari luar Madura, ketika ditugaskan disini (Madura) pertama saya mencari tahu tentang masyarakat sini dari staf saya, dan informasi yang saya tangkap mereka sangat patuh kepada kyai. Oleh karena itu saya pun mencoba untuk bersilaturahmi kepada para kyai disini agar keberadaan saya diterima dan itu akan sangat membantu dalam pekerjaan yang saya lakukan".[26]

Seringkali juga ada aparat yang kurang simpatik dalam *personal approach*-nya sehingga pemimpin yang menganut gaya demikian akan dijauhi atau dimusuhi oleh masyarakat. Sayangnya keberadaan kyai yang istimewa ini dalam kehidupan orang Madura tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah. Masih tampak adanya sikap yang terlalu ego sehingga banyak program-program pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara mulus atau malah tidak mengenai sasaran, yang walaupun bukan satu-satunya sebab namun cukup memberi warna dalam sejarah Madura, adalah karena pemerintah mengabaikan kedudukan ulama setempat.

b. ***Blater***

Dalam konteks Madura, pemimpin non formal tidak hanya pada figur seorang kyai. Tokoh non kyai yang secara sosio-kultural juga juga dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Madura (di Bangkalan dan Sampang) adalah figur *blater*, atau *jago, angko,* dan sebagainya.[27] Abdur Rozaki dalam tesisnya menyebutkan kelompok pemimpin non formal selain kyai yaitu *blater* sering luput dari perhatian para peneliti. Kaum *blater* atau yang sering disebut dengan kaum bajingan di Madura memiliki pengaruh sosial yang cukup besar. Dunia ke-*blateran*-an sangat terkait dengan aktivitas yang bernuansa kekerasan dan kriminalitas. Pekerjaan *blater* merupakan pekerjaan yang dianggap di luar kebiasaan masyarakat pada umumnya, seperti mencuri, merampok dan melakukan perjudian. Bahkan pekerjaan tersebut bisa dikatakan sebagai profesi sosialnya. Namun demikian, profesi yang dianggap sebagai perilau yang menyimpang masyarakat umum, justru membawa sosok *blater* sebagai

[27] A. Latief Wiyata diambil dari Muthmainnah, *Jembatan Suramadu. Respon Ulama terhadap Industrialisasi* (Yogyakarta : LKPSM, 1998), hlm. 26.

tokoh yang disegani dalam masyarakat Madura.[28] Dengan demikian kepatuhan etnik Madura kepada pemimpin non formal ada dua garis, yakni garis agama yang diwakili kyai, dan garis sosio-kultural yang muncul dalam sosok *blater*. Figur *blater* dipatuhi dalam kaitannya dengan masalah keduniawian.

Dalam perspektif historis, fenomena ke-*blater*-an dalam banyak hal seringkali merujuk pada sosok jago, yaitu orang kuat dari kebanyakan masyarakat pada umumnya. Karena itu kontruksi ke-*blater*-an sangat terkait pula dengan kontruksi jagoanisme di dalam masyarakat. *Blater* adalah orang kuat di Madura, baik secara fisik maupun spiritual. Seorang *blater* dapat mengumpulkan pengikut, anak buah dan kekuatannya bergantung tidak saja pada kemampuannya dalam mengelola kekerasan, juga pada jumlah anak buah yang dimilikinya.

Sistem pertanian tegalan dengan tanah yang tandus dan curah hujan yang sangat terbatas, secara langsung mengkondisikan para petani Madura pada kemelaratan dan kemiskinan. Pertanian yang tidak menghasilkan produktivitas yang tinggi dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, secara tidak langsung pola kehidupan masyarakat untuk mengatasinya. Solusi yang dianggap strategis atau jalan pintas bagi orang Madura adalah masuk ke dunia *blater*. Meskipun, dalam kenyataannya, ada sebagian warga yang melakukan migrasi. Namun, keterikatan pada tanah dan leluhur menjadikan mereka tetap bertahan.

Kaum *blater* bagi masyarakat umum sangat ditakuti karena jagoanisme dengan kekuatan supranatural menjadikan saingan utama para kyai dalam perebutan pengaruh di dalam masyarakat. Perebutan pengaruh kekuasaan ini biasanya nampak dalam pemilihan kepala desa. Bagi seorang *blater* yang mempunyai jaringan luas, tidak hanya terbatas dalam lingkup regionalnya (desa atau kabupaten) tapi juga ke luar wilayahnya, dalam setiap pimilihan kepala desa, jika dia mencalonkan diri bisa dipastikan akan menang. Apalagi jika seorang *blater* itu pernah mengenyam pendidikan di salah satu pesantren yang terkenal. Ikatan seorang santri dengan sang kyai tetap dipertahankan meskipun dia menjadi *blater*. Hubungan antara kyai dan *blater*

[28] *Ibid*, hlm. 107-116.

dalam sosok kyai yang *blater* atau *blater* yang kyai, dapat dilihat dari pernyataan yang keluar dari keluarga kyai yang mantan *blater*.

> "Kyai di Madura banyak juga yang berasal dari *blater* atau sebaliknya, dan mereka itu sangat dipatuhi oleh pengikutnya. Orang akan terangkat martabatnya kalau dia bisa dinikahi oleh seorang kyai apalagi kyai itu mempunyai kesaktian".[29]

Tradisi dunia keblateran sangat berbeda dengan kyai. *Blater* memiliki tradisi tersendiri yang cukup mewarnai dinamika sosial. Bila kebiasaan kyai dibentuk melalui tafsir keagamaan yang disesuaikan dengan kondisi sosial yang berkembang, maka tradisi ke-*blater*-an yang berkembang merupakan bentuk dari perpaduan antara pemenuhan kepentingan yang sedang dibutuhkan dengan sentuhan kreativitas melalui media permainan dan sering kali dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat di dalam lingkungannya. Misalnya, karapan sapi atau adu ayam (*sabung ajem*). Aktor utama yang menjadi pelaku sekaligus pendukung dari pagelaran arena tersebut adalah para *blater*. Pagelaran tersebut memiliki makna tidak saja sebagai tempat hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mambangun pertemanan, bahkan sampai pada proses memperoleh status sosial di kalangan komunitas *blater*. Dengan pengertian lain jika seorang *blater* dalam setiap permainan selalu menang, dengan sendirinya dia memperoleh pengakuan status sosial berupa penghormatan.

Seorang *blater* apabila bepergian memiliki kebiasaan mambawa *sekep*, yakni pisau kecil atau clurit yang disembunyikan dibalik bajunya. Dengan membawa *sekep* menunjukkan bahwa dirinya siap bertarung jika diganggu dan merupakan simbol keberanian. Beda dengan orang-orang kebanyakan, jika orang yang tidak membawa *sekep* baik dalam bepergian maupun dalam arena perkumpulan *blater*, dia akan dianggap sok jagoan atau sok kebal (*sok teggu*).

Dalam perkembangannya sekarang, tradisi *blater* atau acara *remo* yang bersifat menonjolkan kekuatan untuk mencari popularitas dan pengaruh

[29] Wawancara dengan Sodik (nama samaran) pada tanggal 28 Mei 2004 di Sampang.

kekuasaan, sudah terkikis. Masyarakat Madura sekarang lebih berorientasi pada pencarian ekonomi dengan jalan menjadi tenaga kerja di luar negeri. Tak heran jika dilihat dari segi bangunan fisik, sekarang nampak perkembangan yang sangat mencolok, dan pada akhirnya tradisi-tradisi semacam *remo* dan *blater* yang bersifat jagoanisme sudah terkikis.

E. Harga Diri

Ketika mendengar kata 'Madura', mungkin akan terbayang di sebagian besar orang akan dunia kekerasan yang dimanifestasikan dengan carok, clurit yang tajam dan meneteskan darah. Carok sering menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab secara tuntas. Di sisi lain, penilaian orang tentang carok sering terjebak dalam stereotip orang Madura yang keras perilakunya, kaku, menakutkan, dan ekspresif. Stereotip ini sering mendapatkan pembenaran ketika terjadi kasus-kasus kekerasan dengan aktor utama orang Madura. Padahal, peristiwa itu sebenarnya bukan semata-mata masalah etnis, melainkan juga menyangkut masalah ekonomi, sosial, dan politik yang ujung-ujungnya adalah kekuasaan.[30]

Harga diri atau martabat adalah nilai yang sangat mendasar dalam masyarakat Madura. Harga diri harus selalu dipertahankan agar tidak diremehkan orang lain.Dasar utama dari harga diri adalah rasa malu (rasa *malo* atau *todus*). Orang Madura selalu menekankan bahwa *tambhana todus mate'* (obatnya malu adalah mati), lebih bagus *apote tolang etembang apote mata* (lebih baik mati daripada malu tidak dapat mempertahankan harga diri). Nilai-nilai harga diri bagi masyarakat Madura selain berkaitan dengan ego, wanita dan agama juga berkait erat dengan masalah tanah dan air.

Tanah dan air selalu dipertahankan dengan cara kesopanan dan penghormatan. Pengambilalihan tanah yang tidak didasarkan pada tatakrama dan penghormatan menjadi persoalan penggerogotan terhadap martabat dan harga diri. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan sumber kehidupan yang utama, terdapat ikatan emosional, religi dan kosmologis dengan pemiliknya. Bagi orang Madura nilai tanah akan semakin besar dalam

[30] Lihat Kajian Elly Touwen Bouwsma, *op, cit.*, hlm.159-180.

kehidupan jika di dalam tanah tersebut dikubur para leluhur mereka.[31] Tanah yang dapat diolah merupakan kekayaan yang berarti. Kekerabatan dapat putus hubungan hanya karena masalah pembagian warisan tanah dan masalah air. Persaingan ekonomi sering menimbulkan masalah terhadap harga diri. Jika seseorang merasa direndahkan oleh kekalahan dalam persaingan ekonomi, harga dirinya juga terancam. Tanah di Madura merupakan unsur yang dapat menimbulkan konflik sosial. Apabila konflik sosial melibatkan pihak lain seperti negara atau pemerintah, biasanya terjadi karena adanya klaim historis bahwa tanah tersebut merupakan milik leluhur mereka, seperti ditunjukkan dengan adanya kuburan para leluhur. Hal seperti itu sebagaimana terjadi dalam kasus "waduk Nipah dan di ladang-ladang garam", karena di atas tanah itu terdapat makam leluhur sehingga tidak dapat di gusur untuk lokasi pembangunan fisik, atau karena nilai ganti rugi yang kecil.

Dengan kondisi alam yang tandus dan kering, air menjadi sumber daya alam yang sangat langka di Madura. Air memiliki makna simbolik dan kedudukan sosial yang penting sebagai sumber kehidupan orang Madura. Secara simbolik air identik dengan eksistensi kehidupan orang Madura. Oleh sebab itu, gangguan terhadap air merupakan ancaman terhadap eksistensi mereka, dan bisa menimbulkan konflik sosial dalam bentuk *carok*. Dalam perspektif simbolik, perempuan, tanah, dan air merupakan kesatuan integral dan menjadi sumber kehidupan utama masyarakat.[32]

Harga diri orang Madura juga terbentuk oleh adanya kesamaan dalam pembentuk identitas etnik, yakni agama. Dengan demikian sebagai sebuah unsur pembentuk identitas etnik, agama menjadi bagian yang penting dalam kehidupan orang Madura dan menjadi bagian dari harga diri mereka. Oleh karena itu, pelecehan terhadap agama atau perilaku yang tidak sesuai dengan agama,dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap harga diri mereka. Sebagai contoh adalah tindakan mengganggu kehormatan perempuan; mengkritik kyai, serta mengkritik perilaku keagamaan.

Orang Madura tidak mau diremehkan, namun demikian penonjolan diri juga tidak dihargai. Sifat yang demikian termasnifestasikan dalam

[31] Wawancara dengan Bambang Samsu di Jember pada tanggal 13 Juli 2004.
[32] Andang Subaharianto, dkk., *op.cit.*, hlm. 66 - 67.

ungkapan *madu ben dara* (madu dan darah), yang berarti bila orang Madura diperlakukan secara baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan penghormatan, maka balasannya adalah kebaikan pula. Sebaliknya, bila ia diperlakukan secara sewenang-wenang dan tidak adil, maka balasannya jauh lebih berat bahkan dapat menimbulkan pertumpahan darah. Hubungan sosial masyarakat Madura selalu saling menghormati dan menghargai sebagai sesama manusia dan menjaga untuk tidak saling menyakiti. Hal ini sangat nampak dari ajaran *ja' nobi' oreng mon aba'na e tobi' sake'* (janganlah menyakiti orang lain, kalau diri-sendiri merasa sakit jika disakiti orang).

Pengertian carok paling tidak harus mengandung lima unsur, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antarlaki-laki, pelecehan harga diri terutama berkaitan dengan kehormatan perempuan (istri), perasaan malu (*malo* atau *todus*), adanya dorongan, dukungan, persetujuan sosial disertai perasaan puas, dan perasaan bangga bagi pemenangnya.[33] Carok sebagai media kultural untuk menunjukkan kejantanan dengan kekerasan fisik menjadi tidak jelas jika dihubungkan dengan *nyelep* (menyerang musuh dari belakang atau samping ketika musuh sedang lengah). Carok itu sendiri berarti berkelahi. Dengan carok suatu permasalahan yang berhubungan dengan harga diri diselesaikan melalui senjata tajam. Hal ini biasanya didahului dengan perjanjian dan dilakukan dengan cara ksatria, yakni saling menantang duel pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Orang lain yang menonton tidak ada yang membantu pihak yang kalah.[34]

Carok sebagai pembelaan terhadap harga diri yang terlecehkan menjadi 'tuna makna' kalau hanya dihubungkan dengan kehormatan perempuan. *Carok* bukan hanya penegakan kehormatan yang berhubungan dengan penghinaan terhadap istri, melainkan juga berhubungan dengan gangguan terhadap mantan istri yang telah dicerai, air, rumput, dan pelecehan agama. *Carok* dipandang oleh sebagian pelakunya sebagai suatu alat untuk memperoleh kekuasaan. Analisis tentang respon masyarakat terhadap *carok*, pelaku *carok*, dan pemicu *carok*, semuanya dikonstruksi secara homogen.

---

[33] Latief Wiyata, *ibid.*, hlm. 184 - 185.

[34] Wawancara dengan Usman, tgl. 27 Mei 2004, di Banyuates. Lebih lanjut dikatakan bahwa carok kemudian banyak juga yang dilakukan dengan cara menelikung dari belakang.

Respon masyarakat terhadap penyelesaian konflik cenderung sama, yaitu dengan cara *carok* dan *nabeng* (merekayasa proses pengadilan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada oknum agar hukuman menjadi ringan, atau mengganti terdakwa dengan orang lain). Implikasi lebih lanjut dari konstruksi kebudayaan generik adalah diidentikkan pelaku *carok* nya dengan orang kecil, petani dengan kebudayaan mapas (menggunakan bahasa kasar). Pelakunya selalu laki-laki yang mengenakan *pesa'* dan *gombor*baju dan celana tradisional untuk laki-laki dan mengenakan *benggel* (gelang kaki) untuk perempuan sebagai simbol bahwa istri selalu berada dalam pengawasan yang ketat dari suami, dan lokasinya relatif terpencil. Padahal, salah satu kasus *carok* adalah seorang pegawai negeri yang tidak dijelaskan lebih lanjut karena hanya bersifat kasuistik.[35] Pemicu *carok* selalu dikaitkan dengan harga diri dan rasa malu. Harga diri dan penggunaan kekuatan fisik mempunyai relasi yang sangat erat dalam masyarakat Madura, karena penampilan fisik diyakini sebagai penjelmaan dari harga diri. Dengan demikian, menghina harga diri sama artinya dengan melukai seseorang secara fisik.

Dalam konteks kekinian, orang Madura menerapkan kebudayaan hibrid dan diferensiasi. *Carok* bukan satu-satunya institusionalisasi kekerasan dan penyelesaian konflik. Terjadinya carok tergantung dari pengaruh timbal balik antara alasan, konteks, situasi setempat, waktu, dan sifat-sifat orang yang terlibat. Interaksi antarkondisi memang seringkali mengakibatkan terjadinya *carok*. Akan tetapi, tindakan kekerasan ini kadang-kadang dapat dihindari atau tidak terjadi sama sekali. Latief Wiyata menyatakan bahwa sebagian kecil korban *carok* dikubur di halaman rumah.[36] Bekas pakaian yang dipakai korban ketika *carok* berlangsung tetap disimpan. Ini adalah salah satu simbol dalam proses transmisi kekerasan untuk balas dendam bagi keturunannya (reproduksi kekerasan).

Pengungkapan bukti, bukankah benda-benda yang digunakan *carok* dijadikan sebagai barang bukti, termasuk baju-baju itu oleh aparat penegak hukum? Kejanggalan yang lain adalah terjadinya reproduksi kekerasan yang berhubungan dengan meningkatnya pelaku *carok*. Padahal, data statistik mutakhir menunjukkan adanya kecenderungan penurunan penyelesaian

[35] *Ibid.*, hlm. 51
[36] *Ibid*, hlm. 210.

kekerasan dengan *carok*.

Kehadiran ulama tidak mampu mencegah *carok*. Setelah *carok* selesai, barulah kyai mendamaikan pelaku *carok* itu. Meskipun kyai, sebagai figur pemimpin informal, memiliki peran polymorphic, tetapi *carok* tetap saja berlangsung. Artinya, otoritas dan kewibawaan kyai kurang efektif untuk meredam terjadinya *carok*. Berkaitan dengan itu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah posisi dan peran kyai pada masyarakat Madura? Bagaimanakah peran keyakinan keagamaan, dan di manakah keberadaan Islam? Keberadaan keluarga pelaku carok baik sebagai 'pemenang' maupun 'korban', membutuhkan kajian lebih lanjut. Bagi istri dari korban *carok* akan terjadi perubahan dalam rumah tangganya, yaitu kehilangan kepala rumah tangga. Begitu pula bagi istri dari pemenang *carok* yang suaminya berada di penjara. Setelah peristiwa itu, masing-masing istri berperan sebagai kepala rumah tangga.

Menurut sebuah sumber diungkapkan bahwa soal *carok* adalah cara orang Madura merespon amarah biasanya berupa tindakan resistensi yang cenderung keras. Keputusan perlu tidaknya menggunakan kekerasan fisik dalam tindakan resistensi ini sangat tergantung pada tingkat pelecehan yang mereka rasakan.

Pada tingkat ekstrim, jika perlu mereka bersedia mengorbankan nyawa. Sikap dan perilaku ini tercermin dalam sebuah ungkapan: *Ango'an poteya tolang, etembhang poteya mata* (artinya, kematian lebih dikehendaki daripada harus hidup dengan menanggung perasaan malu). Sebaliknya, jika harga diri orang Madura dihargai sebagaimana mestinya, sudah dapat dipastikan mereka akan menunjukkan sikap dan perilaku *andhap asor*.

Mereka akan amat ramah, sopan, hormat dan rendah hati. Bahkan, secara kualitatif tidak jarang justru bisa lebih daripada itu. Contohnya, ada ungkapan, *oreng ddadi taretan* (artinya, orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa akan diperlakukan layaknya saudara sendiri). Suatu sikap dan perilaku kultural yang selama ini kurang dipahami oleh orang luar.

Jadi, soal carok itu bukanlah suatu kebiasaan atau budaya struktural. Sebab,belum tentu seorang yang dulu jagoan dan dikenal suka *carok*, lalu turunannya otomatis juga *carok*, artinya *carok* lebih banyak lebih didominasi

pada masalah harga diri. Misalnya, menyangkut soal *pagar ayu* (pelecehan terhadap perempuan). *Carok* itu bisa terjadi kepada siapa saja. Artinya, meski *carok* itu bukanlah tradisi atau menganut garis turunan, tapi kalau menyangkut harga diri,martabat keluarga yang dilecehkan, maka *carok* bisa jadi cara terbaik untuk menyelesaikan. Contohnya, ada satu keluarga yang tidak *carok*, namun suatu ketika kepala keluarga itu tewas gara-gara di-*carok*. Hampir bisa dipastikan sang anak ketika kejadian masih kecil, pada saat dewasa akan melakukan perhitungan dengan si pembunuh orangtuanya.

Apa yang dilakukan si anak yang sudah dewasa itu bukanlah sikap balas dendam. Tetapi, merupakan pembelaan atas nama keluarga. Hal seperti ini bisa terjadi sampai mengakar. Karena itu, sering kali masalah *carok* yang terjadi antar keluarga menjadi suatu cerita yang berkepanjangan. Hal seperti itu, pernah terjadi beberapa waktu lalu, yang sampai melibatkan antar keluarga dan kampung. Bahkan untuk mendamaikan kasus ini, agar tak terjadi *carok* massal H. Mohammad Noer, mantan Gubernur Jatim yang juga sesepuh Madura, turun tangan langsung. *Carok*, lebih pas kalau dikatakan merupakan cerminan sikap pelakunya yang menjaga harga diri dan tak mau dilecehkan atau dipermalukan.

Berdasar catatan *Jawa Pos*, beberapa bulan terakhir ini di Sampang dan Bangkalan memang sering terjadi kasus pembunuhan. Ada Kades dibunuh warganya lantaran anaknya dikawinkan dengan pria lain, ada juga tindakan balas dendam, seperti pembunuhan terhadap Mat Sawi, 16 tahun, remaja asal Desa Serambeh, Kecamatan Proppo, Pamekasan. Madholi nekat membunuh Mat Sawi, karena Pak Sin, ayahnya, 20 tahun lalu, dibunuh H Wahab yang juga kakek Mat Sawi. Kasus pembunuhan seperti ini biasanya orang awam mengatakan korban mati di-*carok*. Menurut Suroso dari LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Madura), pengertian itu amat menyimpang dari arti dan makna *carok*. Sebab, kata dia, arti *carok* itu sendiri adalah persambungan diri sebagai komunikasi akhir dengan mempergunakan senjata tajam yang berupaya menjatuhkan lawan masing-masing untuk merebutkan sosial prestise sabagai imbalan dari simpanan tekanan perasaan yang dimiliki masing-masing pelaku. Jadi *carok* itu perkelahian satu lawan satu atau kelompok lawan kelompok. Waktunya direncanakan bersama dan

membawa senjata serta tidak ada wasit. Masyarakat Madura mempunyai pandangan adat bahwa *carok* itu lambang kepahlawanan dan kebanggaan. Pelaku *carok* bermaksud menghilangkan aib akibat pola tingkah laku seseorang yang mungkin dianggap mencemarkan martabat harga diri keluarga dan pribadi.

F. Tanah dan Makam Leluhur

Tanah dalam suatu masyarakat agraris tidak hanya menjadi salah satu faktor produksi, tetapi juga memiliki arti penting lainnya baik menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya maupun politik Oleh karena itu masalah tanah bukan semata-mata merupakan hubungan antara manusia dengan tanah, tetapi juga merupakan manifestasi antara antara hubungan manusia dengan manusia, dan disebagian wilayah juga antara manusia dengan leluhurnya. Dalam setiap daerah atau masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam mengatur hubungan antarmanusia. Terkait dengan masalah hubungan tersebut adalah bahwa seseorang bisa menolak orang lain menggunakan tanah miliknya tanpa adanya izin dari si pemilik.

Tanah sesuai dengan sistem sosial politik dan ekonomi manapun merupakan faktor produksi yang utama. Di samping itu tanah juga mempunyai nilai lain sesuai dengan budaya yang berkembang di masing-masing wilayah. Oleh karena itu yang membedakan antara sistem yang satu dengan yang lainnya adalah fungsi, mekanisme dan cara pandang terhadap tanah itu sendiri. Dalam sistem feodal, tanah adalah simbol status kekuasaan para bangsawan, dan petani tidak lebih dari seorang penggarap. Dalam sistem kapitalisme, tanah dan faktor produksi lain merupakan unsur yang dapat mendatangkan keuntungan dan sebagai modal. Dalam sistem ini, tanah dikuasai oleh para pemilik modal, sedangkan petani adalah pekerja. Adapun pada sistem sosialisme, tanah tidak dimiliki secara perseorangan, namun secara kolektif.[37] Gambaran itu menunjukkan pentingnya pemilikan tanah dalam setiap kehidupan. Di Indonesia banyak slogan-slogan yang berkembang dalam masyarakat yang menunjukkan arti penting tanah dalam kehidupan

[37] Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni, *Petani dan Konflik Agraria* (Bandung: Akatiga, 1998), hlm. 1-2.

masyarakat. Seperti *tanah tumpah darah* juga slogan yang berbunyi *sadumuk bathuk senyari bumi, ditohi pecahing dhadha lan wutahing ludira* yang artinya sekecil apapun tanah yang dikuasai, keberadaannya sudah menyatu dengan petani, sehingga orang akan mempertahankan tanah miliknya dengan taruhan nyawa. Pentingnya penguasaan tanah bagi seseorang atau masyarakat dengan sendirinya akan mendorong munculnya upaya untuk mempertahan hak-hak tanah dari setiap intervensi pihak luar. Hal ini pada gilirannya selalu menimbulkan konflik, baik konflik terbuka maupun tersembunyi.

Di Madura tanah memiliki nilai produktif dan non-produktif. Tanah produktif biasanya berupa tanah-tanah sawah, tegalan, juga tanah-tanah di ladang garam yang diolah dan dijadikan sumber pendapatan keluarga. Tanah non-produktif, pada umumnya, berupa tanah pekarangan untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal, dan di samping itu biasanya dipakai sebagai makam bagi keluarga. Kondisi tanah di Madura pada umumnya kurang subur, karena mengandung kapur, selain itu juga termasuk kering karena langkanya sumber air. Dengan kondisi tanah yang demikian, maka tanaman yang cocok ditanam di tegalan berupa tanaman palawija, seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan, singkong, dan lainnya. Tanah di Madura mempunyai dimensi yang amat luas, hal itu terkait dengan nilai budaya yang berkembang di wilayah tersebut. Tanah tidak hanya terkait dengan nilai ekonomi, tetapi juga terkait dengan dimensi lain, seperti agama dan juga kekerabatan.[38] Bagi masyarakat Madura, tanah dianggap sebagai tanah *posaka atau pusaka* (*heirloom land*). Secara umum bisa dikatakan pandangan orang Madura terhadap tanah, pada dasarnya merupakan gambaran kosmologi yang terkait dengan semua bidang kehidupan masyarakat.

Tanah dianggap mempunyai ikatan dengan roh nenek moyang dan selain itu, tanah juga merupakan bagian dari kekuasaan. Menurut kepercayaan orang Madura, roh nenek moyang datang pada setiap malam Jumat untuk melihat keadaan rumah, tanah pekarangan, dan tanah tegalan.[39] Tanah pada dasarnya secara gaib juga masih dikuasai oleh arwah para leluhur yang dahulu memiliki hak atas tanah tersebut. Masyarakat Madura memandang bahwa

[38] Wawancara dengan Bambang Samsu, pada tanggal 13 Juni 2004 di Jember.
[39] Andang Subaharianto, dkk., *op. cit.*, hlm. 72.

antara ketaatan dalam melaksanakan ajaran agama Islam dan melestarikan kepercayaan asli dapat berjalan bersama. Orang Madura sangat percaya bahwa arwah yang sudah meninggal akan menyatu dengan tanah, sehingga seseorang yang menguasai tanah harus tahu asal-usul pemilik tanah sebelumnya. Hal itu terkait dengan pengiriman doa dan permohonan berkah.

Hubungan tanah dengan arwah leluhur juga terkait dengan kebiasaan yang berkembang di wilayah tersebut dalam hal penguburan jenazah. Setiap keluarga luas umumnya memiliki keburan keluarga sendiri yang terletak di sekitar pekerangannya atau di tanah tegalnya. Oleh karena hubungan antara arwah leluhur dengan tanah yang begitu kuat dalam konsep budaya masyarakat Madura, maka muncul anggapan menjual tanah sama saja dengan menjual roh nenek moyang. Bagi mereka menjadi pantangan menjual tanah kepada pihak luar yang bukan saudara. Selain malu terhadap tetangga, penjualan tanah itu dapat mengakibatkan *ecapok tola* atau *kenneng tola*, yakni akan terkena sial atau tidak selamat.[40] Dengan adanya nilai budaya yang demikian, maka tanah-tanah yang ada kuburannya akan sangat susah apabila di tempat itu akan dipakai untuk pembangunan fisik, seperti gedung, waduk, dan lainnya. Karena hal itu menurut adat pantang dilakukan. Makam, kuburan atau *buju'* sangat dihormati oleh masyarakat. Penghormatan itu juga tergantung siapa yang dikubur di dalam makam. Hal itu ada tingkatannya, dari masyarakat biasa atau keluarga, makam orang yang semasa hidupnya banyak menolong orang, makam para keluarga bangsawan, makam para pembuka tanah, atau makam orang sakti.[41] Hubungan antara arwah nenek moyang dengan tanah juga tampak dalam upacara ritual pembuatan sumur dan pembuatan rumah. Perlengkapan dan doa yang dipanjatkan pada saat pembuatan sumur ataupun rumah, pada dasarnya adalah permohonan berkah dari Allah, Nabi Muhammad, dan para leluhur yang menjaga tanah, agar tidak ada gangguan apapun terhadap bangunan yang akan dibangun.

Dalam pandangan orang Madura, rumah dan tanah merupakan sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan, karena rumah berdiri di atas tanah.

---

[40] Bambang Samsu, "Rumah, Tanah, dan Leluhur di Madura Timur" dalam Soegianto (ed) *Kepercayaan, Magis, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura* (Jember : Tapal Kuda, 2003), hlm. 77

[41] Wawancara dengan Bambang Sambu di Jember 13 Juli 2004.

Pola pemukiman yang berupa *tanean lanjang* menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tanah dan kekerabatan. Bukan sembarang orang yang tinggal dalam *tanean lanjang,* mereka yang tinggal di dalamnya adalah anak-anak perempuan dari sebuah keluarga inti bersama suami dan anak-anaknya. Dengan begitu tanah bagi masyarakat Madura merupakan sesuatu yang dianggap sakral yang penuh makna dalam kehidupan manusia. Tanah tidak dapat diperlakukan sembarangan, karena di dalamnya terkandung kekuatan dan kekuasaan yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup manusia. Selain itu, tanah juga mempunai daya pengikat hubungan keluarga yang sangat kuat, maka ada pantangan bagi masyarakat untuk menjual tanahnya pada pihak luar. Apalagi tanah pekarangan yang di dalamnya telah ada *tanean lanjang,* jelas itu sangat tertutup dan pantang dimasuki oleh orang luar.

BAB IV
PEMBANGUNAN WADUK NIPAH: PROYEK YANG MENIMBULKAN GEJOLAK DI MASYARAKAT

Membicarakan masalah kerusuhan identik dengan adanya tindakan kekerasan. Kekerasan, segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri, namun penghalang tersebut sebenarnya dapat disingkirkan sehingga kekerasan dapat dihindari. Kekerasan dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok pelaku kepada pihak lain, sedangkan kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang terbentuk dalam suatu struktur. Kekerasan struktural dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan alat kekerasan dan 'terjadi begitu saja', tidak ada aktor tertentu yang melakukannya. Suatu misal adanya penderitaan sekelompok penduduk akibat dari struktur sosial ekonomi yang timpang dan tidak adil.[1] Dan kerusuhan dapat terjadi di mana-mana termasuk di Madura, khususnya daerah Kabupaten Sampang.

Sampang termasuk salah satu wilayah kabupaten yang ada di Madura diapit oleh Kabupaten Bangkalan sebelah barat dan Kabupaten Pamekasan di sebelah timurnya, di samping Kabupaten Sumenep yang paling timur. Adapun di sebelah utara daerah Sampang adalah Laut Jawa, sedangkan di sebelah selatan berbatas Selat Madura. Kota Sampang sendiri letaknya berdekatan dengan pantai Madura sebelah selatan.[2] Di Madura sebagian tanahnya berbukit-bukit, terdiri dari jenis tanah mediterian berwarna merah kuning dan jenis aluvial yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Hutan di Madura sangat jarang maka akibatnya jika musim hujan terjadi banjir, sedangkan sumber mata airnya sangat minim, maka hasil pertanian hanya mengalami dua kali masa panen. Sehubungan dengan hal itu maka sistem pertanian menggunakan areal pertanian lahan kering.[3] Hasil pertanian selain padi,

---

[1] Mohtar Mas'oed, dkk. (ed.) *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu* (Yogyakarta: P3PK UGM, 2001), hlm.5.
[2] A.R.Udin Adinegoro,dkk., *Atlas Indonesia dan Semesta Dunia*, (Jakarta:Djambatan,2002), hlm.41.
[3] Muthmainnah, *Jembatan Suramadu Respon Ulama terhadap Industrialisasi* (Yogyakarta:LKPSM,1998), hlm.18

jagung juga palawija, jambu mete,dan tanaman lainnya. Khususnya hasil padi sawah di Kabupaten Sampang pada tahun 2002 dari luas panen bersih 22,517 ha rata-rata produksinya 50,02 kw/ha sehingga produksinya ada 112,621 ton. Adapun padi ladang atau lahan kering di Kabupaten Sampang, luas panen bersih ada 10,657 ha, rata-rata produksi ada 35,54 kw/ha, sehingga produksinya ada 37874 ton pada tahun 2002.[4] Dalam catatan DPU Bidang Pengairan Jawa Timur yang dikutip oleh BPS sungai-sungai di Madura antara lain Sungai Sumber Pucung, 11 km., Semajid, 17 km., Torbeng, 17 km., Tambak Boyo, 19 km., Pohlo Seng, 20 km., Klampis, 24 km., Pangarengan, 29 km., Rogung, 30 km., Sampang, 32 km., dan Sungai Sokrak, 35 km.[5] Tanah Madura juga mempunyai beberapa sungai kecil, di antaranya yang dapat dikatakan mempunyai arti penting yaitu Sungai Bangkalan, Balega, Sampang dan Saroka. Sungai-sungai tersebut sangat bermanfaat bagi dataran sekitarnya, walau demikian di antara sungai-sungai tadi hanya Sungai Sampang yang alirannya panjang sampai ke pedalaman dan dapat dilayari. Sungai-sungai kecil dengan aliran-alirannya tersebut kebanyakan bersumber di dataran sentral yang terdiri dari campuran tanah liat dan kapur yang gundul, lalu mengalir melalui jurang-jurang sempit di punggung-punggung kapur yang rendah sampai di pantai aluvial dan ke laut. Apabila musim kering tiba maka sungai-sungai tersebut menjadi kering dan penduduk mencari air minum dengan membuat sumuran di beberapa palung sungai.[6] Adapun di bagian selatan, lahan-lahan yang tidak subur digunakan untuk pembuatan garam yang memang sudah sejak lama ada, dan Madura sejak dulu dikenal sebagai penghasil garam.[7]

A. Latar Historis Pembangunan Sarana Irigasi di Madura

Pada masa pendudukan Belanda, di Madura sebenarnya telah ada upaya untuk mengatasi kekurangan air di musim kemarau, di samping untuk

---

[4] *Jawa Timur Dalam Angka 2002*. (Surabaya: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur-Katalog BPS:1401.35), hlm.168-169.

[5] *Ibid.*, hlm.11.

[6] Huub de Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman:Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi*, (Jakarta:KITLV-LIPI-Gramedia,1989), hlm.9.

[7] *Ibid.*, hlm.8.

mengendalikan air banjir di musim hujan, yaitu dengan pembuatan bendungan. Di wilayah Sampang bagian utara, air tersedia cukup melimpah, sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan lokal, dan selebihnya disalurkan ke tempat-tempat lain. Sesudah tahun 1900 pemerintah memberi perhatian penuh terhadap masalah irigasi di Madura. Penanganan dan perencanaan masalah irigasi oleh pemerintah menjadi sebuah program yang dikembangkan secara berkesinambungan. Tahun 1907 pemerintah kolonial mengatur 12 areal irigasi agar dapat menyuplai air di bagian selatan dan barat Madura. Dua belas areal irigasi tersebut adalah: a) Braji, Batudinding, dan Bunjeru, b) Marengan, c) Persanga, d) Saronggi, Jepun, dan Turus, e) Sungai-sungai kecil di sepanjang pesisir, f) Samiran, Klampar, Blumbungan, dan Jumbang, g) Omben, h) Sampang, I) Panyiburan dan Klampis, j) Balega, k) Bangkalan, dan l) Arosbaya. Selain itu, sungai-sungai kecil di pesisir utara menyuplai air untuk areal yang kecil, dan hanya Sungai Montor yang penting.[8]

Di seluruh wilayah Madura, Sumenep merupakan daerah yang mempunyai saluran irigasi yang paling besar. Daerah tersebut mempunai areal tanah seluas 4. 577 *bau* sawah yang mendapat suplai air.[9] Di Bangkalan irigasi dibangun untuk mencegah meluapnya aliran sungai memasuki kota pada musim penghujan. Irigasi di Bangkalan sudah dikerjakan mulai tahun 1910, air yang didapat dari saluran irigasi mampu untuk mencukupi kebutuhan penanaman padi *gadu* selama musim kemarau. Irigasi di Sungai Traga yang di bangun pada tahun 1928 mampu mengairi tanah seluas 1000 *bau.* [10]

Di *afdeeling* Sampang terdapat bendungan di Sungai Toronan yang berkapasitas sekitar 100 *bau* (dalam *Memori Residen Madura, 5 Desember 1923* disebutkan bahwa bendungan ini baru selesai dibangun). Dataran Sampang pada masa iu mendapat air dari bendungan-bendungan di Sungai

---

[8] Data diambil dari Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris. Madura 1850 - 1940.* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 42 - 43.

[9] *Ibid.*

[10] *Ibid.*

Samiran,[11] Klampar dan Toronan yang ketiga bendungan tersebut mempunyai kapasitas sekitar 3.500 *bau*. Selain itu terdapat bendungan kecil Pilan dan Polagan, sedangkan bendungan Bulai pada tahun 1920 rusak berat karena bagian bawahnya pecah.[12] Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, keperluan sehari-hari, juga di bidang pertanian, maka sudah sewajarnya apabila pada masa kini di antara kebijakan pemerintah membangun sarana-sarana pendukungnya.

B. Pembangunan Waduk Nipah

1. Lokasi dan Legenda Nipah

Lokasi pembangunan Waduk Nipah meliputi kawasan termasuk wilayah Kecamatan Banyuates, yang di tempat tersebut mengalir Sungai Nipah atau Sumber Lonjong dengan anak-anak sungainya. Daerah Kecamatan Banyuates termasuk Kabupaten Sampang menempati posisi lintang selatan : 6°.5' - 7°.13' dan bujur timur : 113°.8-113°.39' dengan ketinggian 0 sampai dengan 290 m dari permukaan air laut.[13] Kecamatan Banyuates yang luas wilayahnya sekitar 5.087 ha., terdiri dari desa-desa; Trapang, Jatra-Timur, Banyuates, Masaran, Batioh, Nepa, Asemjaran, Kembangjeruk, Marbatoh, Montor, Tebanah, Tlagah, Terosan, Tapa'an, Nagasareh, Olor, Planggaran-Barat, Planggaran-Timur, Tolang dan Lar-Lar.[14] Pembuatan waduk di daerah ini akan mengenai desa-desa Planggaran-Barat, Planggaran-Timur, Tolang, Nagasareh, Lar-Lar, Tapa'an, Montor dan Tebanah.[15] Dari kesemua desa itu, Nagasareh merupakan dataran yang paling rendah, sehingga kelak desa tersebut akan tenggelam.

Kata 'Nipah' menjadi terkenal semenjak adanya rencana pemerintah untuk membangun waduk di tempat tersebut. Dalam catatan lama sering

---

[11] Daerah Samiran di *afdeeling* Pamekasan, bendungannya dieksploatasi sejak tahun 1900, luasnya 3.417 *bau*. Bangunan-bangunan pengairan daerah Samiran berasal dari bangunan-bangunan tua yang dibuat oleh penduduk, kemudian diperbaiki. Lihat Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan) Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No.10* (Jakarta:Arsip Nasional Republik Indonesia,1978), hlm.CLV,CLVI.

[12] *Ibid.*,hlm.CXL.

[13] Andik Hardiyanto,dkk., *Insinden Nipah: Sengkok Cinta Tang Disa Ma'e Tembak*, (Surabaya:Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Surabaya-Direktorat Operasonal YLBHI Jakarta,1995), hlm.8

[14] Deskripsi Peta Kecamatan Banyuates milik kecamatan setempat.

[15] Andik Hardiyanto,dkk.,*loc.cit.*

terbaca tulisan *Nepa, Nipa,* dan ini juga tertulis dalam keterangan peta lama.[16] Akan tetapi setelah berita tentang daerah itu mencuat, maka kata-kata *Nepa* kadang-kadang terucap *Nipa* dan untuk gampangnya sering terucap *Nipah*, dan kemudian menjadi umum. Sebenarnya Nipah atau Nepa sendiri letaknya di desa pantai utara yang namanya pun Pantai Nepa atau Nipah.

Di wilayah ini beredar cerita rakyat yang diyakini kebenarannya.[17] Adapun cerita rakyat tersebut mengkisahkan bahwa ada seorang putri Raja Gilingwesi dari Medangkamulan, Jawa, bernama Dewi Ratna. Putri kerajaan yang cantik itu juga dipanggil dengan sebutan Putri Koning. Pada suatu saat Dewi Ratna diketahui mengandung, padahal belum bersuami. Di sisi lain dikisahkan bahwa Dewi Ratna bermimpi kejatuhan bulan sehingga menjadikan kehamilannya. Baginda sangat masgul dan marah. Diutuslah patihnya, Kyai Poleng untuk menyingkirkan putrinya yang dinilai memalukan keluarga kerajaan itu. Namun ternyata sang patih tidak sampai hati jika harus melenyapkan Dewi Ratna. Oleh karena itu patih mencari cara agar Sang Prabu tidak mengetahui siasat yang akan dilakukannya. Sang patih kemudian mengajak pergi putri kerajaan. Konon berangkatlah Kyai Poleng mengantarkan Dewi Ratna yang tengah hamil itu keluar dari kotaraja, menuju ke tengah laut. Akhirnya perahu Kyai Poleng bersama Dewi Ratna mendarat di tepi pantai yang masih berupa hutan, yang kemudian diketahui bahwa tempat tersebut adalah pantai hutan Nepa (masyarakat kemudiaan menamakan Pulau Nepa).

Dengan berat hati dan rasa kasihan Patih Kyai Poleng meninggalkan Dewi Ratna sendirian di tengah hutan itu. Patih sendiri setelah melaksanakan tugas raja kemudian kembali ke kerajaan, dan melaporkan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya. Ada sementara dugaan bahwa ayah anak yang dikandung Dewi Ratna adalah anak Patih Kyai Poleng sendiri. Setelah cukup usia kandungannya, Dewi Ratna melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Segoro (*segara* = laut). Dewi Ratna kemudian moksa dan Raden Segoro hidup bersama kera besar yang setia menemaninya bahkan dapat dikatakan mengabdi. Di Pulau Nepa itulah dipercaya sebagai 'kerajaan'

---

[16] Wawancara dengan H.Abdul Azis juru kunci Makam/Petilasan Raden Segoro Pantai (Pulo) Nepa tanggal 28 Mei 2004 di rumahnya yang mengatakan bahwa 'Nipah' menurutnya ucapannya; *nepa*, karena memang ada pohon nepa di hutan Nepa.

[17] Wawancara dengan H.Abdul Azis, yang mengisahkan tentang legenda setempat.

Raden Segoro. Kera-kera yang ada di 'kerajaan' Raden Segoro terbagi dalam dua kelompok, yakni kera-kera yang bertugas di luar dan di dalam. Sampai saat ini, menurut beberapa informan dari penduduk setempat kera-kera itu (dari luar dan dalam) tidak mau bercampur. [18]

Pada suatu hari, kerajaan di Jawa mendapatkan serangan dahsyat dari negeri Cina. Pertahanan kerajaan lumpuh. Karena tidak mampu bertahan, baginda menyuruh patihnya untuk mencari bantuan ke kerajaan lain. Patih Kyai Poleng pun berangkat melaksakan titah baginta pergi mencari bantuan. Orang yang dianggap oleh patih mampu menandingi kekuatan musuh adalah anak Dewi Ratna, maka patih kemudian mencari Raden Segoro yang berada di Pulau Nepa. Dengan membawa Raden Segoro, Patih Kyai Poleng kembali ke kerajaan dan melaporkan adanya bantuan yang dibawa. Setelah melihat Raden Segoro, baginda sangat terharu, merasa bahwa pemuda itu adalah cucunya sendiri. Akhirnya Raden Segoro dapat mengalahkan tentara Cina, sukalah hati baginda. Setelah selesai melakukan tugasnya Raden Segoro pun kemudian minta diri untuk kembali ke Pulau Nepa dan akhirnya di tengah hutan tersebut ia moksa.

[18] Informasi diberikan oleh beberapa penduduk setempat (di sekitar hutan Nepa) tatkala mengantar peneliti memasuki wakasan hutan Nepa.

Photo 1: Kawasan Hutan Nepa

Sampai sekarang masyarakat mempercayai tempat moksa Raden Segoro tersebut, dan mudah dikenali karena terdapat tanda-tanda khusus, yaitu adanya bekas altar (fragmen batu), sebatang pohon besar yang diberi balutan kain oleh para peziarah. Di sekitarnya pun banyak kera dibiarkan berkeliaran. Orang percaya bahwa kera-kera tersebut masih keturunan pengikut (pasukan) Raden Segoro, yang terbagi menjadi dua bagian ; pengikut bagian luar dan bagian dalam. Ada yang percaya dengan melaksanakan nadzar di tempat tersebut; melakukan kenduri dan sebagainya.[19] Masyarakat meyakini tempat moksa Dewi Ratna dan anaknya, yakni Raden Segoro, sebagai *buju'* yang keramat. Tempat itu termasuk *buju'* yang sering dikunjungi peziarah.

Cerita rakyat tentang Dewi Ratna dan 'kraton' Raden Segoro tersebut, Nepa mungkin sudah tua. Perkiraan ini berkaitan dengan adanya temuan-temuan arkeologis di sekitar Desa Nepa, terutama di pantai barat daya Ketapang. Pada tahun 1936 Dr. F. Weber menemukan 19 kapak batu halus dari zaman neolithikum yang pada umumnya berukuran panjang 103 mm, lebar 50

[19] *Ibid.*

mm, tebal 11 mm.[20] Cerita rakyat Nepa yang diyakini kebenarannya hingga melegenda sampai kini. Sekelompok kera yang hidup di kawasan (orang menyebut dengan Pulau) Nepa masih dapat disaksikan para wisatawan, peziarah yang berkunjung ke sana.

Cerita rakyat di sekitar Sampang lainnya yaitu tentang adanya sumber air besar di dekat Omben. Dikisahkan bahwa perjalanan Jokotole bersama istrinya, Putri Retnadi yang cantik jelita, dari Majapahit sampailah di sebuah sumber air yang besar. Di tempat tersebut Putri Retnadi mandi dan kainnya hanyut. Kain itu disebut *omben*, maka tempat tersebut dinamai Omben. Oleh karena besar sumber air ini, maka mulai tahun 1926 oleh pemerintah dimanfaatkan sebagai air minum bagi penduduk daerah Sampang dan Pamekasan, selanjutnya tangki-tangki air pun dibangun di tempat tersebut.[21]

2. Rencana dan Konsep Pembangunan Waduk

Seperti telah diuraikan terdahulu berkaitan dengan kondisi geografis Madura umumnya, khususnya daerah Sampang yang memang memerlukan sarana pengairan, maka sudah sejak masa pendudukan Belanda telah ada upaya pembuatan waduk, bendungan, dam dan bangunan sejenisnya . Di daerah Sampang pada masa itu sudah ada beberapa bendungan dan bahkan ada pula yang telah rusak. Dalam *Memori Residen Madura, J.G.van Heyst, tanggal 9 April 1928*, disebutkan bahwa ada perencanaan pembangunan pengairan dari waduk penampungan air hujan di Klampis. Pembangunan pengairan ini dibuat pada masa itu karena daerah tersebut setiap tahun mengalami musim kering yang merugikan penduduk, baik untuk keperluan pertanian maupun hewan ternaknya. Gagasan untuk membangun pengairan masa itu timbul pada tahun 1925, sedangkan pada tahun 1927 dilakukan penelitian geologisnya. Dalam pelaksanaannya maka harus diadakan pemindahan jalan Kedundung-Tambalangan, sebab jalan yang dipakai pada saat itu akan tergenang air waduk.[22]

---

[20] Pranata Ssp. "Peninggalan Purbakala Madura", *Berita Buana*, 26 April 1975, hlm.3.
[21] Pranata,Ssp.,"Purbakala Sampang", *Berita Buana*, 8 Juli 1975, hlm.3.
[22] Arsip Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm.CLXI-CLXII.

Dari catatan sejarah dan pengalaman penduduk wilayah daerah Sampang yang mengalami kekeringan bertahun-tahun mengajarkannya bagaimana mengolah tanah untuk pertanian. Sementara itu pada masa kini Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memahami betul akan kondisi setempat. Pemerintah memandang perlu adanya prasarana pertanian di daerahnya, yang dalam hal ini pentingnya dibangun waduk, khususnya daerah Nipah (sebutan untuk Nepa). Konsep demikian sudah sewajarnya dimiliki jajaran penguasa pemerintah setempat, mengingat pada musim hujan, curah hujan di Nipah cukup tinggi, demikian pula debit airnya. Akan tetapi air yang demikian banyaknya itu mengalir langsung ke laut sehingga dinilai sia-sia oleh pemerintah. Maka sebuah pemikiran untuk dapat membuat waduk yang dapat menampung air dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh penduduk. Mengingat pentingnya sarana pengairaan untuk menunjang keberhasilan pertanian di daerah tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini DPU Pengairan Daerah Propinsi Jawa Timur membuat proposal. Isinya tentang rencana pembangunan Waduk Nipah yang diharapkan akan dapat meningkatkan produksi pangan dan penghasilan petani.[23]

Rencana pembangunan Waduk Nipah sudah dijalankan sejak Tahun Anggaran 1981/1982 dan selanjutnya dilaksanakan sampai Tahun Anggaran 1985/1986 dengan sumber dana APBN melalui Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Sedang Kecil Jawa Timur. Setelah sempat terhenti karena keterbatasan dana rencana pembangunan waduk dijadwalkan kembali pada Tahun Anggaran 1986/1987. Pembangunan waduk ini melalui Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Nipah kemudian diusulkan lagi pada Tahun Anggaran 1993/1994 oleh DPU Pengairan Daerah, Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang.[24] Sudah barang tentu pembuatan waduk yang akan melewati sejumlah desa dengan sendirinya harus membebaskan tanah milik warga. Langkah-langkah pembebasan tanah rencana pembuatan waduk sudah seharusnya melibatkan berbagai pihak yang saling terkait, baik pihak petugas pemerintah dengan jajarannya maupun penduduk yang tanahnya terkena pembebasan. Pembebasan tanah penduduk akan

[23] Andik Hardiyanto,dkk., *op.cit.*, hlm.4.
[24] *Ibid.*,hlm.10.

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 1982/1983 sampai Tahun Anggaran 1985/1986. Untuk sisa yang belum dibebaskan diusulkan lagi dan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum yang kemudian ditetapkan dalam Surat Pembantu Gubernur Wilayah VI di Pamekasan No. 092/3134/440.11/1989, tertanggal 10 Mei 1989.[25]

3. Gejolak Dalam Pembangunan Waduk

Pembangunan Waduk Nipah di daerah Kabupaten Sampang yang bertujuan positif ternyata pelaksanannya tidak mulus seperti yang diharapkan. Terjadi gejolak masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunannya yang kemungkinan karena kurangnya sosialisasi atau komunikasi antara pihak penguasa dengan masyarakat pemilik tanah, atau kurangnya pendekatan terhadap penduduk. Akibatnya masyarakat belum dapat menerima adanya rencana pembangunan tersebut. Mereka para petani pemilik dan penggarap khawatir dengan adanya waduk tempat tersebut maka tanahnya akan hilang tenggelam tergenang air. Bagi orang Madura tanah mempunyai nilai suci, *posaka*, yang tidak semudah itu dipindahtangankan kepada orang lain. Maka bicara masalah tanah haruslah dibangun adanya komunikasi. Tentang perlunya komunikasi dan tindakan hati-hati ini pada suatu kesempatan seorang tokoh ulama setempat mengatakan tentang pembebasan tanah itu demikian,

> "...Ya diajak berembug, kemudian di beli dulu, jangan kok tahu-tahu tanah itu diukur, lalu dibangun. Katanya pak, pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi caranya itu, main paksa, harus, itukan macam diktator...sudah begitu militer bergabung, nah siapa yang berani pak, masyarakat berada di bawah tekanan...."[26]

Kedua pihak antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini yang memiliki kebijakan dalam hal pembangunan waduk, masing-masing mempertahankan kebenaran pendapatnya. Sehingga terjadinya puncak konflik yang kemudian terkenal dengan sebutan insinden Nipah tanggal 25

---

[25] *Ibid.*

[26] Wawancara dengan KH. Alawy Muhammad (Ponpes At-Taroqi) tanggal 27 Mei 2004, di Sampang.

September 2003. Peristiwa itu menelan korban tewasnya 4 orang warga desa sekitar lokasi waduk.[27] Mereka yang tewas adalah Mutirah, 51 tahun, Nindin bin Musa, 14 tahun yang tengah bermain, Simuki alias P.Supriadi, 24 tahun dan Muhammad, 38 tahun meninggal setelah dirawat di RSUD Dr. Soetomo.[28]

Dahulu gejolak dalam masyarakat ini pernah mewarnai Sampang pada masa pemerintahan Amangkurat I karena masyarakat sangat kecewa, yang memandang bahwa penguasa pada masa itu hanyalah mengejar nafsu untuk kepuasan diri sendiri.[29] Menurut pengamat sosial Sampang, KH Sholahur Robani,SE, mengibaratkan binatang sapi bagi tanah Madura, sedangkan Sampang berada di bagian perut, dan perut inilah sebagai pusat penyakit dan nafsu. Sebagai jalan keluar dari gangguan tersebut semua orang, terutama pejabat pemerintahan harus bisa berpuasa dari godaan nafsu kekuasaan dan harta. Tanpa upaya tersebut maka situasi Sampang akan mudah bergejolak dan akan mengurangi rasa damai, sehingga masyarakat bawah yang akan menjadi korban. Masyarakat Sampang mempunyai karakter sangat menjaga gengsi dan harga diri, ada pepatah Madura; *é tembang poté mata lebbi bagus poté tolang* yang artinya lebih baik mati dari pada menanggung malu, masih dilanjutkan demikian, *péréng é tompok mesté akramangan*, artinya piring ditumpuk pasti berbunyi. Sehingga dianjurkan bahwa sebagai mahluk sosial yang hidup dengan sesama dengan berbagai macam karakter dan watak, maka masing-masing harus saling mengkoreksi diri, mempunyai rasa lapang dada, saling menolong dan maaf-memaafkan agar tidak saling baku hantam dan demi persatuan bangsa.[30]

Mengenai konflik di Indonesia ini menurut Cribb genealogi kekerasan di sini dapat dilacak ke belakang. Beberapa bukti kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tanah air, namun jarang yang dapat diselesaikan dengan serius.[31] Ada beberapa alasan kenapa suatu negara berpotensi konflik yaitu,

---

[27] Ody, "Pengukuran Tanah Sepihak Resahkan Warga Banyuates", *Kompas*, 17 September 1994. Lihat juga Pown,"Four Madurese farmers Return to Seek Justice", *The Jakarta Post*, 20 Desember 1994.

[28] Andik Hardiyanto,dkk., *op.cit.*, hlm. 38-41.

[29] Moh.Anshori-Taufiq Rizqon, "Mengapa Sampang Rentan Konflik Kepentingan", *Jawa Pos/Radar Madura*, 12 September 2000.

[30] *Ibid.*

[31] P. Bambang Wisudo, "Catatan Akhir Tahun Di Bidang Politik dan Hukum-Konflik dan Kekerasan yang Tak Kunjung Padam", *Kompas*, 16 Desember 2003, hlm.39.

> "...negara dengan pendapatan dan pembangunan manusianya rendah, negara yang pernah terlibat dalam konflik serius dalam 30 tahun sebelumnya, negara dengan tingkat perbedan horizontal yang tinggi, dan negara yang rezim yang lebih demokratis. Indonesia serta-merta bisa masuk dalam keempat kategori itu sekaligus..."[32]

Kiranya kebijakan pemerintah misalnya di bidang pembangunan memerlukan pembicaraan matang, komunikasi berimbang antara atas dan bawah atau pihak-pihak yang saling terkait. Memang harus sangat hati-hati karena menyangkut masyarakat yang beragam. Untuk mengantisipasi kekerasan dan sebagainya menurut Stewart yang juga dirujuk oleh P. Bambang Wisudo dalam mencegah adanya konflik diperlukan langkah-langkah bijak sebagai berikut,

> "...yakni koreksi untuk memperkecil perbedaan horizontal, memperkecil fungsionalitas konflik, dan mempromosikan pembangunan adil dan imprasial. Dari aspek ekonomi, upaya mengurangi perbedaan horizontal itu dapat dilakukan dengan *landreform* dan kebijakan untuk mempromosikan akses yang seimbang pada set industrial dan ketenagakerjaan. Pemberian akses seimbang ini termasuk kebijakan kredit perbankan yang memberikan akses kepada kelompok dalam masyarakat..."[33]

Menyimak keterangan tersebut, sebenarnya konflik dapatlah dihindari apabila komunikasi terjaga. Demikian pula akan adanya pembangunan Waduk Nipah di wilayah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, yang beritanya mewarnai banyak media pada masa itu, sehingga memberi kesan tegang yang ironisnya justru pada kebijakan pembangunan dengan tujuan akan menyejahterakan rakyat. Seperti diketahui bahwa di daerah agraris, yang kondisi alamnya kurang mendukung, di antaranya beberapa fasilitas, maka prasarana waduk sangat diperlukan. Demikian pula desa-desa di kawasan Banyuates Kabupaten Sampang yang memang memerlukan irigasi untuk peningkatan produksi pertaniannya.

---

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*

a. Kronologi Pembebasan Tanah dan Kerusuhan

Pembangunan Waduk Nipah pada awal tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, mengatasi kekeringan lahan pertanian daerah setempat. Dengan tersedianya waduk maka diperkirakan akan bisa menambah sejumlah lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian yang menggunakan sistem pengairan teknis. Untuk pembangunan waduk tersebut maka harus mengorbankan tanah penduduk paling tidak seluas 170 hektar. Tanah seluas itu sebagian untuk konstruksi dan sebagian lainnya untuk genangan air waduk.[34] Dalam laporannya, DPU Pengairaan Daerah Pemerintah Prop. Jawa Timur, Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Waduk Nipah dengan sumber air Sungai Nipah (mempunyai debit maksimum rata-rata 33,30 m^3/det, normal 3,50 m^3/det dan minimum rata-rata 0,25 m^3/det), direncanakan untuk mengairi tanah pertanian seluas 1.150 hektar. Hal demikian yaitu; merubah areal irigasi semi teknis di Desa Montor luasnya 225 hektar menjadi areal teknis dengan pola tanam : padi padi polowijo. Selain itu; merubah areal tadah hujan yang luasnya 925 hektar menjadi areal irigasi teknis dengan pola tanam: padi-polowijo-polowijo.[35] Untuk pelaksanaannya mau tidak mau harus membebaskan tanah penduduk yang akan digunakan untuk waduk.

[34] Mochtar Mas'oed,dkk.,ed., *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu*, (Yogyakarta:P3PK UGM,2001), hlm.175.
[35] Andik Hardiyanto,dkk., *op.cit.*, hlm.10.

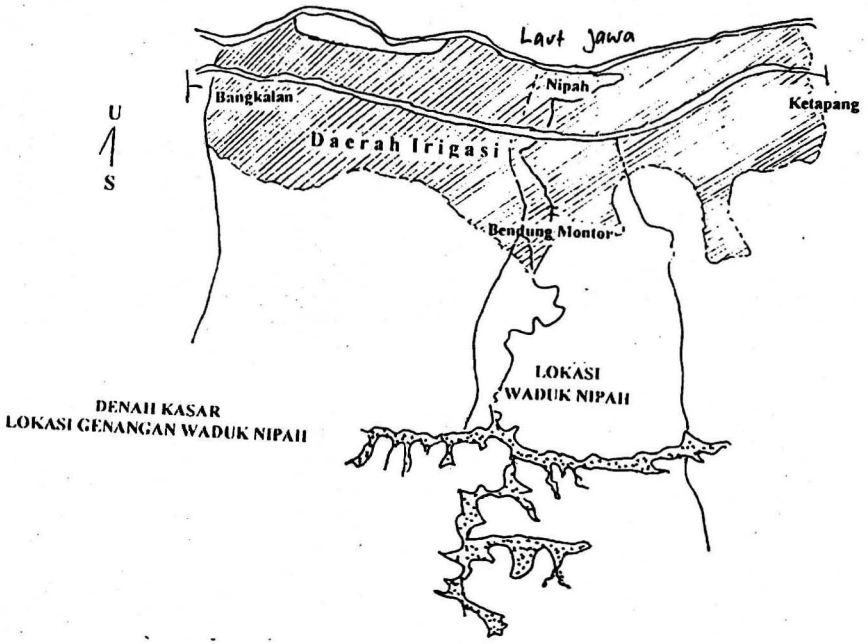

Photo 2 : Lokasi Genangan Waduk
Sumber: Andik Hardiyanto, dkk., *Insiden Nipah: Sengkok Cinta Tang Disa Ma'e Tembak* (Surabaya:LBH Surabaya dan YLBHI Jakarta, 1995).

Seperti telah diuraikan di bagian depan, rencana pembangunan Waduk Nipah sebenarnya sudah lama, yakni sejak Tahun Anggaran 1981/1982, namun karena keterbatasan dana maka proyek tersebut terhenti. Baru kemudian setelah proyek akan dilanjutkan, maka pemerintah setempat berbenah mengambil prosedur langkah-langkah pelaksanaannya.

Pelaksanaan pembebasan tanah Waduk Nipah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan dasar hukum Permendagri

No.5 Tahun 1974 dan Permendagri No.15 Tahun 1975. Projek itu didahului dengan penyuluhan dan musyawarah, namun di lapangan pelaksanaannya lain. Proses pelaksanannya, pada tanggal 5 April 1993 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Jawa Timur mengajukan izin pembebasan sekitar 120 hektar tanah di Kecamatan Banyuates Kabupaten Dati II Sampang. Surat tersebut ditanggapi dan mendapat rekomendasi pada tanggal 30 April 1993 dengan surat No.593.82/914/442.11/1993. Bupati menyetujui proposal DPU akan pembebasan tanah seluas sekitar 120 hektar di desa-desa Nagasareh, Montor dan Tapa'an untuk pelaksanaan Waduk Nipah. [36]

Untuk pembebasan tanah tersebut, bupati membuat panitia dari instansi Pemerintah Kabupaten Sampang dan instansi-instansi lain tempat yang terkait. Panitia Pembebasan Tanah itu diketuai oleh Bupati, wakilnya adalah Kepala Kantor Pertanahan. Sedangkan anggotanya adalah Kepala bagian Pemerintahan Setwilda, Kepala DPU, Kepala Kepala kantor Pelayanan PB Pamekasan, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sampang, Staf Pelaksana Proyek Irigasi Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas Pengairan Daerah Pamekasan di Pamekasan, Camat Banyuates, Kepala Desa Montor, Kepala Desa Tapa'an, Kepala Desa Nagasareh dan PLT Kasi HHAT Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang. Di antara tugasnya mengadakan inventarisasi, penelitian setempat, musyawarah dengan pemegang hak atas tanah bangunan dan tanaman, menaksir biaya ganti rugi, membuat berita acara pembebasan tanah disertai fakta atau pertimbangan dan menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada yang berhak. [37]

Bupati Sampang, Kolonel Bagus Hinayana pada tanggal 30 April 1993 membentuk Panitia Pembebasan Tanah (PPT) yang diketuainya sendiri. Untuk membantu PPT ini, Bupati juga membentuk Tim di Banyuates yang tercantum dalam surat keputusannya tertanggal 19 Mei 1993. Di dalam Tim tersebut masuk aparat keamanan, termasuk Komandan Kodim 0828 dan Kapolres Sampang. Selanjutnya pada bulan Juni dan Juli 1993 dilakukan penandatanganan kontrak. Kemudian segera mulai diadakan survey pada tanggal 5 Juli 1993 dan

[36] *Ibid.*, hlm. 23.
[37] *Ibid.*

pada tanggal 31 Juli 1993 Bupati Sampang Kolonel Bagus Hinayana meresmikan pengerjaan proyek pembangunan Waduk Nipah.[38]

Pencanangan tanda dimulainya kerja besar oleh bupati mungkin informasinya kurang merata ke seluruh penduduk desa-desa yang terkena proyek. Selanjutnya dimulai langkah pembebasan tanah, berawal dengan pengukuran-pengukuran tanah yang mulai tanggal 10,14 Agustus 1993 dan 6, 8 September 1993 oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sampang. Namun ternyata penduduk desa-desa Planggaran Barat, Planggaran Timur, Tolang, Nagasareh dan Lar-Lar tidak mengetahui rencana pengukuran dan pembebasan tanah. Mungkin pembicaraan dilakukan dengan kepala desa (*klebun*). Mereka tidak diajak bicara masalah tersebut, sehingga kejadian itu sangat mengejutkan. Masalahnya menjadi sulit, karena dalam hidup mereka ada hal-hal yang menjadi status simbol harga diri yang harus dipertahankan, misalnya wanita (istri), tanah pusaka, makam leluhur. Jika tanah mereka diambil begitu saja tanpa pembicaraan lebih dahulu, ini telah menyinggung harkatnya sebagai manusia.

Kurang intensifnya sosialisasi proyek tersebut juga tidak adanya penjelasan yang memuaskan dari pemerintah menjadikan kebingungan penduduk pemilik tanah. Selanjutnya sebagian dari mereka pada tanggal 2 Agustus 1993 mendatangi Kantor DPRD Sampang untuk mencari keterangan tentang adanya proyek Waduk Nipah yang akan mengenai tanahnya. Mereka kembali dengan hampa, karena tidak menerima keterangan kejelasannya.

Penduduk juga menolak ketika petugas dari Badan Pertanahan Nasional Sampang akan melakukan pengukuran tanahnya.[39] Oleh karena kedua belah pihak tetap bertahan pada kebenaran masing-masing, maka muncul adanya keresahan dan kerusuhan. Menurut penuturan H.Cholil staf BPN tentang pengukuran tanah tersebut demikian,

> "...Sepengetahuan saya itu, dalam pengalaman saja Pak ya, itu penduduk Planggaran (maksudnya desa Pelanggaran Barat dan

[38] Mohtar Mas'oed, dkk.(ed.)., *loc.cit.* Peresmian pembangunan waduk itu disiarkan oleh sebuah stasiun televisi.
[39] *Ibid.*

Timur) itu hampir 100% (hampir selesai pengukuran daerah itu) itu lancar, terus sampai tinggal, itu bebepara orang kalau tidak salah tiga orang atas nama Pak Tahid, Pak Sliep, dan milik seorang lagi saya lupa namanya, lha itu mulai muncul isu-isu di masyarakat, katanya tanah itu ada kuburannya, juga ada yang bilang belum tahu untuk apa, kok sudah diukur-ukur. Lha kita di BPN kan memang hanya mengukur tanah itu, baru dari situ orang punya bukti kepemilikan tentang luas tanah, baru nanti ditentukan dia mendapat ganti rugi berapa rupiah besarnya..."[40]

Dari informasi di atas ternyata memang ada perbedaan 'cara pandang' antara pemerintah dengan masyarakat. menurut pihak pemerintah untuk menentukan ganti rugi haruslah ada bukti kepemilikan tanah dan itu juga haruslah dilakukan pengukuran dahulu. Setelah itu harganya baru dihitung. Sementara masyarakat meminta penjelasan dahulu tentang rencana yang akan dilakukan pemerintah. Belum lagi isu tentang akan adanya proyek yang akan menggusur wilayah tempat tinggal masyarakat. Sementara itu sebuah budaya yang sangat menghargai makam leluhur, berkembang dan dihormati masyarakat. Penggusuran tanah berarti juga akan menggusur tanah tempat leluhurnya dimakamkan, dan itu sebuah bentuk pelecehan terhadap adat istiadat yang telah lama diyakini masyarakat.

[40] Wawancara dengan H. Cholil, tanggal 27 Mei 2004 di kantor BPN Sampang. H. Cholil, seorang staff BPN Sampang yang pada tahun 1993 ikut mengukur tanah di daerah yang kemudian menjadi tempat munculnya insiden Nipah. Walaupun dia berada di lokasi, namun menurut penuturannya, dia tidak mengetahui secara pasti kalau pada saat terjadinya demonstrasi memprotes adanya pengukuran itu, ada masyarakat setempat yang meninggal akibat terkena tembakan. Menurutnya setelah penduduk bertambah banyak dan mulai berteriak-teriak, para petugas dari BPN ditarik dari lokasi, dan pengukuran dihentikan.

Secara bertahap tanah yang akan dibebaskan menurut rencana yang terdapat dalam peta di BPN adalah sebagai berikut.

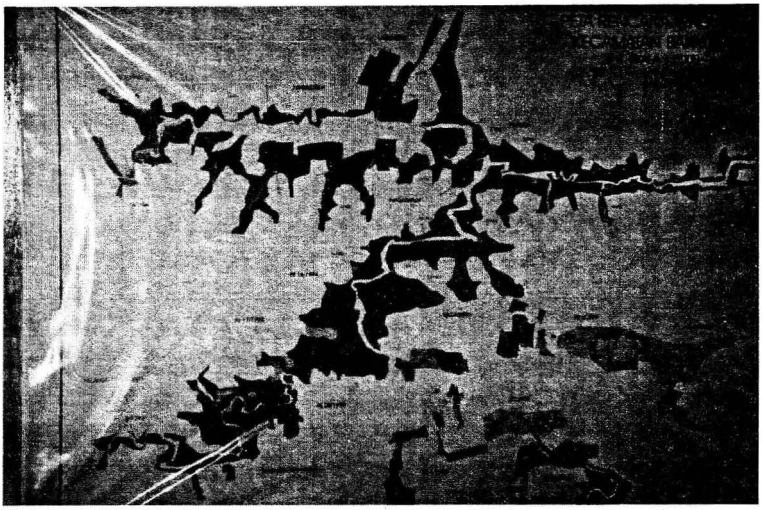

Photo 3: Tanah yang akan dibebaskan.
Sumber: BPN Sampang

b. Pemicu / Penggerak

Pembangunan Waduk Nipah membawa korban manusia. Empat orang meninggal saat mereka melakukan unjuk rasa menolak pengukuran tanah untuk lahan waduk. Sebelumnya, pada tanggal 31 Juli 1993 waktu Bupati Sampang, meresmikan pengerjaan proyek, banyak penduduk yang tidak tahu, maka pada tanggal 2 Agustus 1993 mereka mendatangi DPRD Sampang memprotesnya.[41] Proyek tetap dilanjutkan, dan tanggal 8 September 1993 ketika tim dari BPN yang didampingi oleh Kepala Desa Planggaran Barat tetap melakukan pengukuran, mereka mendapatkan protes dari penduduk. Bupati Sampang selaku Ketua Tim Pembebasan Tanah kemudian mengadakan rapat koordinasi terbatas yang menduga bahwa adanya protes penduduk tersebut ada kemungkinan-kemungkinan; kekhawatiran orang-

[41] Andik Hardiyanto, *op.cit.*, hlm.18.

orang kehilangan eksistensi, kehilangan pekerjaan, kepala desa yang kurang mampu menyampaikan segala sesuatunya mengenai pembebasan tanah, sikap tim survey yang kurang berkenan di hati masyarakat, pemborong setempat yang tidak dilibatkan dalam proyek atau adanya provokator atau dalang kerusuhan.

Untuk menjaga adanya hal-hal yang tak diinginkan, selanjutnya dilakukan antisipasi dengan langkah-langkah, misalnya mengamankan orang yang diduga sebagai dalang kerusuhan yang diduga bukan pemilik tanah, mengadakan penyuluhan, pendekatan pada tokoh dan ulama, mempercepat pembebasan tanah dan menentukan biaya ganti rugi.[42] Kemungkinan sosialisasi rencana pembanguan kurang maksimal, sehingga penyuluhan tersebut dapat dikatakan gagal. Penduduk masih tetap ada yang menolaknya. Maka pada tanggal 25 September 1993 saat tim dari BPN yang kemudian didampingi para aparat keamanan, 8 orang polisi dan 12 orang tentara Koramil sekitar pukul 11.30 mengukur tanah calon waduk, penduduk desa berkumpul di lokasi waduk, melakukan aksi memprotes pengukuran tersebut.[43]

Secara kronologis, sebelumnya penduduk desa berkumpul di sebuah rumah salah seorang 'penggerak' aksi unjuk rasa dan diberi semacam 'pengarahan'. Selanjutnya massa bergerak menuju lokasi calon waduk dan berteriak "Hidup Khudori... hidup Khudori.... Lebih baik mati kena peluru daripada mati tenggelam". Khudori adalah salah seorang pengunjukrasa yang menolak pembangunan Waduk Nipah.[44] Khudori dan 3 orang temannya yaitu Ma'ruf, Masruki dan Mari'i yang dianggap sebagai pemicu protes setelah dipanggil Koramil Banyuates memberi keterangan bahwa ia tidak bermaksud menentang adanya waduk. Ia, Khudori, hanya ingin mempertahankan tanahnya, seluas 2 ha. yang ditanami cabai, padi kering dan jagung.[45] Ia menolak jika dirinya dikatakan sebagai penghasut massa, menurut dia langkahnya hanya ingin mempertahankan tanah pusaka yang kemudian diketahui masih atas nama orangtuanya, Rifai, dengan demikian ia dapat

[42] Andik Hardiyanto, *op.cit.*, hlm.29,30.
[43] Mochtar Mas'oed, dkk., *op.cit.* hlm.176.
[44] Toriq Hadad, dkk., "Nyo'on Odik, Lalu Robohlah Mereka", *Tempo*, 9 Oktober 1993, hlm.32.
[45] Toriq Hadad, dkk., "Harga Satu Nyawa dan Sepuluh Waduk", *Tempo*, 16 Oktober 1993, hlm.34.

melakukan ziarah ke makam orang tuanya.[46] Mereka banyak yang membawa senjata, misalnya pedang, clurit juga bambu runcing. Suasana tak terkendali, baik pihak pengunjuk rasa maupun aparat.[47]

Pelaksanaan pembebasan tanah Waduk Nipah yang dilakukan oleh BPN menggunakan dasar hukum Permendagri No.5 Tahun 1974 dan Permendagri No.15 Tahun 1975, yang didahului oleh penyuluhan dan musyawarah, namun di lapangan pelaksanaannya lain. Proses pelaksanannya, pada tanggal 5 April 1993 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Jawa Timur mengajukan izin pembebasan sekitar 120 hektar tanah di Kecamatan Banyuates Kabupaten Dati II Sampang. Surat tersebut ditanggapi dan mendapat rekomendasi pada tanggal 30 April 1993 dengan surat No.593.82/914/442.11/1993. Bupati menyetujui proposal DPU akan pembebasan tanah seluas sekitar 120 hektar di desa-desa Nagasareh, Montor dan Tap'aan untuk pelaksanaan Waduk Nipah.

Untuk pembebasan tanah tersebut, bupati membuat panitia dari instansi Pemerintah Kabupaten Sampang dan instansi-instansi lain tempat yang terkait. Panitia Pembebasan Tanah itu diketuai oleh Bupati, wakilnya adalah Kepala Kantor Pertanahan. Sedangkan anggotanya adalah Kepala bagian Pemerintahan Setwilda, Kepala DPU, Kepala Kepala kantor Pelayanan PB Pamekasan, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sampang, Staf Pelaksana Proyek Irigasi Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas Pengairan Daerah Pamekasan di Pamekasan, Camat Banyuates, Kepala Desa Montor, Kepala Desa Tapa'an, Kepala Desa Nagasareh dan PLT Kasi HHAT Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang. Di antara tugasnya mengadakan inventarisasi, penelitian setempat, musyawarah dengan pemegang hak atas tanah bangunan dan tanaman, menaksir biaya ganti rugi, membuat berita acara pembebasan tanah disertai fakta/pertimbangan dan menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada yang berhak. [48]

Mengenai gerakan massa ini ada pendapat-pendapat yang berbeda. Menurut Mayor Jenderal Haris Sudarno, Panglima Kodam Brawijaya, begitu

---

[46] *Ibid.*
[47] Andik Hardiyanto, *op. cit.*, hlm.23.
[48] *Ibid.*

massa bergerak maju, maka dari jarak 100 meter Komandan Koramil Letnan Dua Sujak memberikan peringatan dengan melepas tembakan ke atas, selanjutnya tembakan dari jarak 75 meter sampai jarak 15 meter.[49] Dalam suasana panas itu tanpa adanya perintah, beberapa petugas melepaskan tembakan yang mengakibatkan adanya korban, dan menyisakan beberapa selongsong peluru di tempat tersebut.

Aksi unjuk rasa ini diduga ada orang yang dianggap sebagai penggeraknya. Peringatan yang ditujukan kepada pengunjukrasa dengan tembakan ke atas ini juga dibenarkan oleh Wajahari (35 tahun), penduduk Tebanah, sebagai penjaga barang-barang. Menurutnya penyebab kerusuhan itu Khudori, di samping Ma'ruf. [50]

Berbeda dengan keterangan Mayor Haris Sudarno, menurut KH Ali Jauhari, seorang ulama Sampang, mengatakan bahwa hari Sabtu pagi sekitar pukul 08.00 setelah berkumpul, penduduk tanpa senjata bergerak dari arah Desa Nagasareh menuju Desa Planggaran Timur, melalui lereng ke tempat para petugas BPN pengukur tanah calon waduk, didampingi oleh aparat keamanan yang bersenjata, juga *klebun* atau kepala desa setempat. Penduduk mengangkat tangan sambil berkata, "*Nyo'on odik, nyo'on odik*" = ingin hidup, ingin hidup. Mereka khawatir, apabila waduk menggenangi tempat tinggalnya, kemudian mereka akan hidup di mana. Mereka menolak tawaran Pemda setempat yang telah menyediakan tanah pengganti.[51] Di samping belum adanya kejelasan lebih jauh tentang segala sesuatunya dari pihak pemerintah, ada beberapa orang,'oknum' perantara yang seolah memaksakan pengambilalihan tanah penduduk.[52]

Tentang pembebasan tanah ini menurut Matsari, 35 th berkata demikian, "...Ditapsir berapa harganya, hendak dibeli meteran kan harus di ukur dulu, baru nanti dibeli berapa.(selanjutnya mengatakan tentang tanah yang dibebaskan)...Iya, tanah itu kan sudah jadinya berapa misalnya..."[53] Bahkan mereka, penduduk Nagasareh resah karena pernah disuruh cap

---

[49] Toriq Hadad, dkk., "Nyo'on Odik, Robohlah Mereka", *Tempo*, 9 Oktober 1993, hlm.32.
[50] Wawancara dengan Wajahari pada tanggal 27 Mei 2004 di Sampang.
[51] Toriq Hadad, dkk. *loc.cit.*
[52] Jalil Hakim,dkk. "Sang Calo dan Ganti Rugi Pak Bupati", *Tempo*, 23 Oktober 1993,hlm.28.
[53] Wawancara dengan Matsari tanggal 28 Mei 2004, di lokasi waduk Nipah, Banyuates, Sampang

jempol. Mereka diberi tahu kalau sudah cap jempol maka tanahnya tidak akan diukur, tak tahunya bahwa cap jempol tersebut adalah tanda'setuju' atas pengukuran atau penjualan tanah miliknya.[54] Hal ini juga menambah keengganan penduduk atas bebasnya tanah miliknya, sehingga mendorong mereka untuk melakukan protes. Akibatnya terjadilah peristiwa penembakan yang membawa korban penduduk, 4 orang meninggal pada Sabtu tanggal 25 September 1993. Seorang di antaranya meninggal setelah di rumah sakit.

Peristiwa tersebut banyak mengundang unjuk rasa di sana-sini dari berbagai lapisan. Di Yogyakarta, penyair dan budayawan Emha Ainun Najib beserta ratusan mahasiswa melakukan aksi protes di lingkungan kampus Gajah Mada. Aksi protes atas nasib warga Banyuates dilakukan dengan cara pembacaan puisi. Bebarapa orang maupun organisasi lain, menuntut dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan atas kasus itu. Rakyat setempat juga melakukan tindakan dengan alasan untuk mencari keadilan. Mereka yang tidak lagi mempercayai lembaga formal yang ada di Madura ataupun di tingkat propinsi Jawa Timur, kemudian mengadukan nasibnya ke Jakarta. Lembaga yang dituju adalah Komisi Nasional Hak Azazi Manusia.[55]

Tim Kodam Brawijaya selanjutnya melakukan pengusutan. Di jajaran aparat pemerintah, orang yang dianggap turut bertanggungjawab adanya peristiwa meninggalnya penduduk di Nipah, Sampang adalah empat orang pejabat angkatan bersenjata setempat. Mereka yang dianggap bertanggungjawab terhadap peristiwa itu kemudian dilepas dari jabatannya. Keempat orang itu adalah Letnan Kolonel Sugeng Wiyono Komandan Kodim 0828/Sampang, Letnan Kolonel (Pol.) Siswinarto Kapolres Sampang, Letnan Dua Sujak Komandan Koramil Banyuates dan Komandan Polsek Banyuates Sersan Mayor (Pol.) Ali Wafa.[56]

Pencopotan jabatan dan mutasi kerja yang dilakukan oleh pemerintah, ditanggapi secara dingin oleh warga Sampang. Masyarakat kalangan atas menganggap mutasi dan pencopotan bukan solusi yang tepat untuk

---

[54] Andik Hardiyanto,dkk., *op.cit.*,hlm.27, Toriq Hadad, dkk., *loc.cit.*

[55] Lihat "Warga Nipah Mengadu ke Komnas HAM. Aparat Keamanan Harus Bisa Menahan Diri", *Merdeka*, 20 Desember 1994.

[56] Ahmed K.Soeriawidjaja,dkk., "Setelah Pertemuan dengan Jenderal Tanjung" *Tempo*,23 Oktober 1993, hlm.22.

"menyembuhkan" luka warga Sampang. Proses hukum yang jelas terhadap mereka yang dianggap bertanggungjawab haruslah dilakukan. Warga intinya menuntut suatu kejelasan dan keadilan. Berikut komentar seorang tokoh yang punya pengaruh yang cukup besar di wilayah Sampang.

> "Yang penting itu bagaimana pemerintah melakukan pengusutan terhadap mereka, tidak kok terus dicopot dan dipindahkan. Itu bukan solusi namanya..."[57]

Dengan mencermati petikan wawancara itu, dapatlah diketahui bahwa yang penting dan hendak diketahui oleh penduduk adalah sebuah proses hukum menyangkut kasus yang telah terjadi. Dari sebuah pengusutan diharapkan akan didapat titik terang tentang siapa yang jadi korban dan siapa pelakunya. Dengan kata lain transparansi dari pemerintah dalam menyikapi 'insiden Nipah' tetap menjadi harapan masyarakat.

c. Kondisi Pasca Kerusuhan

Setelah terjadi adanya kerusuhan, untuk pembangunan kembali waduk Nipah, ada upaya-upaya penyelesaian yaitu pertemuan antara para tokoh masyarakat, ulama Madura dengan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman didampingi Ketua MUI Jawa Timur KH Misbach mengadakan pertemuan pada tanggal 5 Oktober 1993. Para ulama prihatin dan menyampaikan beberapa pokok pikiran untuk penyelesaian yang baik. Antara lain tindakan hukum bagi pelaku penembakan, minta pada pemerintah agar diciptakan kerjasama positif antara ulama dan umaro atau pemerintah, serta mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali rencana pembangunan waduk.[58] Tidak hanya dengan gubernur, namun lebih lanjut juga diadakannya pertemuan antara ulama dengan para pejabat instansi terkait misalnya DPU Pengairan Daerah Propinsi Jawa Timur dan aparat keamanan, Angkatan Bersenjata dan Kepolisian, yang pada kesempatan itu Bupati Sampang minta maaf. Setelah terhenti, pembangunan Waduk Nipah dimulai lagi, Proyek

[57] Wawancara dengan K.H. Alawy di Sampang, pada tanggal 28 Mei 2004.
[58] Andik Hardiyanto, dkk., *op.cit.*, hlm.55.

Pembangunan Jaringan Irigasi Nipah oleh DPU Pengairan Daerah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang diajukan melalui Tahun Anggaran 1993/1994.[59]

Pada bulan September dan Desember 1994, setelah setahun lebih dari peristiwa unjuk rasa yang menewaskan empat warga Banyuates, petugas kembali ke lokasi memasang patok-patok di tanah tempat rencana waduk dibangun yang telah dibebaskan. Para petugas pengukur tanah kembali didampingi aparat keamanan. Mereka mengukur tanah dan memasang patok di tiga desa yakni, Lar-Lar, Tolang, dan Nagasari (Nagasareh). Aktivitas dari BPN dan aparat keamanan itupun kembali membuat warga resah. Warga masyarakat masih mengharap penyelesaian peristiwa tahun lalu yang tak pernah mereka lupakan.[60] Mereka tetap mengharapkan pemerintah melakukan proses pengadilan terhadap oknum yang melakukan penembakan. Seorang petugas dari BPN memberikan komentarnya terkait dengan proses pengadilan tersebut.

> " Saya waktu peristiwa itu sedang tugas ke lapangan, walaupun begitu tidak tahu persis kejadiannya. Dan agar semuanya jelas memang sebaiknya ada proses hukum, biar masyarakat juga tahu. Ya yang salah ketahuan salah, yang memang tidak salah ya jangan di hukum atau disalahkan"[61]

Lima belas tahun lebih setelah peristiwa 'naas' di Banyuates, kondisi yang terasa 'tenang' di sekitar lokasi waduk sempat kami rasakan. Saat itu tanggal 28 Mei 2004 keadaan di lokasi waduk sudah mulai dibersihkan, tumbuh-tumbuhannya mulai ditebangi, tanahnya yang tidak rata mulai digali dan diratakan. Penduduk setempat dilibatkan sebagai pekerja dalam proyek ini dan melakukan pekerjaan dengan sikap biasa, tidak tampak adanya gejolak. Akan tetapi kedatangan orang luar daerah yang terasa asing masih

---

[59] *Ibid.*,hlm. 10.

[60] Ody, "Pengukuran Tanah sepihak Resahkan Warga Banyuates", *Kompas*, 17 September 1994,lihat juga SG/FN, "Warga Nipah Mengadu ke Komnas HAM "Aparat Keamanan Harus Bisa Menahan Diri", *Merdeka*, tanggal 20 Desember 1994.

[61] Wawancara dengan H. Cholil di Sampang pada tanggal 27 Mei 2005.

mengundang kecurigaan dan dalam waktu relatif singkat cepat diketahuinya.[62]

Setelah tenggang waktu yang cukup, masalah antara penduduk pemilik tanah dengan pemerintah mengenai proyek pembangunan waduk sudah lebih mencair. Artinya, masyarakat sebagian besar sudah bisa diajak 'bersahabat'. Salah seorang dari petinggi bagian pelaksana proyek yang sedang mengawasi di lokasi mengatakan demikian,

> "...Seperti pembangunan jalan ini yang melibatkan masyarakat, mereka kita suruh kerjasama, lha jembatan ini kepunyaan Pak Cori namanya, nah perumahan (maksudnya rumah yang ada di lokasi) ini kepunyaan kepala desa dan ini ada tumpukan bata ya dari masyarakat sini, yang sebelah sana (sambil menunjuk agak jauh) juga penduduk sini yang tanahnya terkena proyek, ya silahkan saja, istilahnya terbuka, kalau Waskita-nya ini untuk teknis yang besar-besar untuk bikin bangunan yang besar-besar seperti jembatan,[63] terowongan, ya seperti yang sedang dilakukan di atas itu, mereka sedang melakukan pengukuran untuk membuat terowongan. Tugas dan pekerjaan yang seperti itu kami yang melakukan, warga setempat ya seperti yang ibu lihat (menebang pohon, mengangkut bata, batu, pasir dan juga keamanan)..."[64]

Menurutnya ganti rugi tanah dianggap sudah beres semua.

> "...Nggak ada masalah cuman kalau ada isu istilahnya kalau sampai ke pusat orang yang mau mempunyai proyek di sini, istilahnya pimpronya seperti di Sampang itu. Cuma itu, lainnya nggak ada lagi. Tapi masak iya zamannya otonomi daerah masak orang luar yang mau mengerjakan di sini. Nggak mungkin Mas...!" Terhadap pembangunan waduk orang sudah menyadari manfaatnya kalau urusan ganti rugi

[62] Ketenangan dan keramahan penduduk yang sempat kami rasakan ketika memasuki lokasi waduk, tidak berapa lama menjadi sebuah 'ketakutan'. Kami berenam ditambah beberapa orang penunjuk jalan, tiba-tiba di sambut oleh puluhan penduduk. Jalan yang kami lalui sudah penuh dengan pohon-pohon yang ditebangi. Mereka tetap waspada dengan orang luar. Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada sikap waspada masyarakat, maka dengan berbagai pertimbangan tim tidak melanjutkan ke desa berikut yakni Nagasareh dan Pelanggaran Timur yang *nota bene* masih ada orang yang belum bisa menerima proyek itu dengan tulus. Pesan yang kami terima sewaktu mengurus perijinan agar berhati-hati membuat kami harus melakukan berbagai strategi agar diterima oleh semua pihak.

[63] Jembatan yang berada di pintu air Montor, menurut Ir. Agus akan menghubungkan Gunung Batu Putih dengan bukit atau gunung di sebelahnya, yaitu Gunung Gebang.

[64] Wawancara dengan Ir. Agus, tanggal 28 Mei 2004 di lokasi waduk Nipah, Banyuates, Sampang, Madura.

tanah dan lainnya belum beres, pihak pemborong jadi pihak Waskita Karya, ya belum berani untuk memulai pembangunan phisiknya, tapi ya memang di daerah sana (maksudnya desa di balik bukit yakni Nagasareh), masyarakatnya ada yang belum rela, tapi itu tidak banyak, dan pembangunan yang ini untuk pintu air"[65]

Tentang pembangunan Waduk Nipah ini dan sikap orang setelah dimulai pengerjaan, dalam keterangannya salah seorang yang ada di lokasi pembangunan waduk mengatakan demikian,

"...Jadi sekarang sudah bersatu dengan pemerintahnya ya sudah beres semua ya dari ini semua...." (Menurutnya keberadaan waduk banyak manfaatnya bagi masyarakat seperti yang dikatakan demikian),"... Karena ini kepentingan masyarakat luas yang untuk saluran itu yang membutuhkan banyak yang sebelah timur tempatnya tlogo Nepa, *banyu soko* empat desa itu Pak. Yang di sebelah barat Montor, Batioh, Morbatoh, pertamanya tanah kering, kan bisa diairi kalau sudah terlaksana dan pembangunan selesai, ini kan bisa jadi irigasi Pak, kan gitu memang ini sementara waktu, memang pemerintah itu mengorbankan yang jadi genangan tapi kan bukan dikembangkan cuma-cuma tapi manfaatnya untuk masyarakat luas, *ndak* masalah ini Pak jangan istilahnya ada gini gitu isu-isu yang *ndak* karuan..."[66]

Bangunan Waduk Nipah dalam rencananya mempunyai luas wilayah genangan sekitar 170 hektar dan volume efektifnya 2.500.000 m^3. Bangunan waduk bertipe : urugan batu / rock fill, elevasi mercu bendungan : + 50.00 (M.S.L.), tinggi bendungan : 19,00 m., elevasi muka air maksimum : ± 48.00 (M.S.L.), elevasi air rata-rata : ± 45.00 (M.S.L.), luas genangan waduk : ± 170 ha., volume waduk : ± 3.000.000 m^3, volume efektif waduk : ± 2.500.000 m^3, type pelimpah : type gergaji, lebar pemicu pelimpah : 24,00 m., daerah pengaliran : 83,00 km^2, lebar puncak : 5,00 m., panjang puncak : 85,00 m.[67]

---

[65] *Ibid.*

[66] Wawancara dengan Matsari tanggal 28 Mei 2004, di lokasi waduk, Banyuates, Sampang.

[67] Andik Hardiyanto, *op.cit.* hlm.11.

4. Sikap dan Pandangan Masyarakat

Pembangunan irigasi di Kabupaten Sampang Madura menghadapi sandungan-sandungan dan mengundang perhatian banyak orang dari berbagai kalangan, antara lain ulama, mahasiswa, LBH, Komnas HAM dan lain-lainnya, baik dari Madura sendiri maupun dari luar Madura. Muncul solidaritas, empati masyarakat yang mendengar beritanya. Pendapat maupun pandangan masyarakat pun bermacam-macam, khususnya mengenai kebijakan pembangunan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Media massa pun dihiasi dengan berita-berita tentang pembangunan waduk, tentang peristiwa Nipah yang kemudian terkenal dengan sebutan "insiden Nipah'.

Berikut sikap dan pandangan masyarakat tentang seputar pembangunan Waduk Nipah, juga peristiwa yang meninggalkan goresan di hati mereka yang terluka, mengemukakan pendapatnya menurut sudut pandang masing-masing. Dengan melihat struktur sosial masyarakat Madura, maka secara garis besar masyarakat Madura dibedakan menjadi dua kelompok, yakni ulama (*santre*) dan non ulama (*bane santre*). Golongan non ulama dibagi lagi ke dalam golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah.

a. Sikap dan Pandangan Ulama

Pada umumnya para ulama menyayangkan peristiwa yang menelan korban tersebut. Bahkan ulama Sampang mengirim surat yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Sampang tertanggal 27 September 1993 M atau 10 *Rabiul Akhir* 1414 H. Adapun isinya merupakan pernyataan keprihatinan dan penyesalan sedalam-dalamnya terhadap peristiwa penembakan terhadap sejumlah anggota masyarakat. Diminta pula agar kepada pelaku penembakan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Surat tersebut juga dilampiri dengan tanda tangan keduapuluh orang ulama dan dikirim ke- 17 pimpinan lembaga terkait sebagai tembusan di tingkat pusat (Jakarta), tingkat propinsi (Surabaya), tingkat kabupaten (Sampang) para ulama se-Jawa Timur juga LBH/LSM Surabaya dan Jakarta. Dalam buku laporannya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan Direktorat Operasional YLHI yang mengumpulkan data lapangan memuat

para ulama Sampang yang bertandatangan yaitu; KH. Alawy Muhammad, KH. Zayyadi, KH. Bushiri Nawawi, KH. Hamiduddin, KH. Syamsudin, KH. Abd.Syakur Djunaidi, KH. Muhaimin Bin Abd.Bari, KH. Abdul Malik, KH. Abu Ahmad M.Dhovier Shah, KH. Madkur Rasyad, KH. Mansur Said, KH. Ghozali MF, KH. Wajihuddin, KH. Shodiq, KH. Fauzi, KH. Abdullah, KH. Zainal Alim dan KH. A. Munib Masra'ie.

Ulama Jawa Timur yang pada umumnya dekat dengan rakyat itu juga mengirim surat kepada Presiden sepanjang 8 halaman, antara lain isinya demikian,

> "... Kami merasa tak sanggup untuk menunggu dan menanggung kesedihan lebih lama lagi sehingga penghargaan akan hak-hak rakyat sebagai warga negara dan sebagai manusia merdeka diberikan sepenuh-penuhnya. Tak sanggup lagi kami menahan kepiluan menyaksikan kekerasan menimpa rakyat, lebih-lebih atas nama negara. Kami ingin rakyat dimanusiakan. Kami ingin kekerasan dihentikan..."[68]

Terhadap pelaksanaan program pembangunan, KH Alawy Muhammad (ulama Sampang) menyarankan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, disosialisasikan sampai benar-benar dapat dimengerti oleh rakyat, alasannya, juga manfaatnya. Ia memberikan keterangan demikian,

> "... Seandainya beliau [pihak pemerintah] yang baik tak ada masalah, kan semua mayoritas di sini umat Islam, jadi jangan langsung semata-mata membuka tempat wisata, tanpa pengertian dan penjelasan ha itu mungkin ya apa jadi ada keganjalan...(selanjutnya menjelaskan)...Ya begitu misalnya antara lain digunakan untuk pengairan, di samping itu untuk tempat wisata, banyak-banyak tempatlah, di samping akan diadakan industri banyak macam lalu, masalahnya pengertian seandainya ini waduk panjagaan pertanian 1) ini pembelian tanah dengan cara yang baik, 2) orang yang punya tanah ini... seumpama didistribusi tanah ini tanah kering ini basah, kenaikan pajak dan

[68] Data diambil dari, "Setelah Mereka Belajar Dari Peristiwa Dili", *Tempo*, 16 Oktober 1993, hlm. 30,31.

sebagainya, seumpamalah cepat-cepat diberi tempat pendidikan....[69] (Ia juga mengatakan)...Yang utama yang mesti dilakukan aparat keamanan adalah menuntaskan dulu penanganan peristiwa berdarah itu. Ini yang penting, supaya masyarakat yang sudah terlanjur luka bisa pulih. Jika tragedi yang telah merenggut nyawa manusia bisa diselesaikan dengan tegas, Insya Allah, saya menjamin keamanan akan bisa pulih. Setelah itu, silakan proyek itu dilanjutkan. Saya mendukung segala perbuatan yang membawa manfaat dan kemasylahatan umat. Saya jamin penduduk tidak akan berkeras menolak proyek Pemerintah apa pun, asal mereka diberi pengertian yang benar. Sampaikanlah manfaat apa saja yang didapat masyarakat. Setelah mereka mengerti, mereka pun ikhlas terhadap rencana proyek itu. Rakyat itu istilahnya ya nurut aja kok, tapi mereka ya harus dimanusiakan.[70]

Tokoh ulama di Madura sangat disegani dan ditaati oleh rakyat, maka kebijakan pemerintah akan lebih lancar jika melalui pendekatan dengan ulama. Beliau juga mengibaratkan hubungan antara kyai dengan pejabat pemerintahan harus terjalin dengan baik. Dalam suatu kesempatan lain KH Alawy mengatakan,

"...Kyai di tanah Madura ini ibaratnya *selender*. Kalau jalan rusak, *selender* dipakai. Kalau jalan sudah halus, *selender* masuk gudang...[71]

Sikap senada juga diambil oleh para ulama Pamekasan dan Sumenep, mereka juga membuat surat kepada beberapa pimpinan di sejumlah lembaga, Forum HAM, LBH, Ulama se-Jatim, dan disertai lampiran tanda tangan sejumlah ulama masing-masing daerah. Dalam surat tersebut juga berisi penyesalan atas peristiwa penembakan yang mengakibatkan tewasnya penduduk, dan minta supaya pelaku ditindak tegas, diselesaikan sampai tuntas.

KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Umum PB NU) menilai, tragedi Sampang terjadi karena tindakan dan keputusan sepihak dari pemerintah dan seharusnya tidak usah melibatkan ABRI. Pembangunan Waduk Nipah harus ada kearifan pemerintah untuk mengoreksi cara-cara lama yang sudah lepas

[69] Wawancara tanggal 28 Mei 2004 dengan KH.Alawy Muhammad di Ponpes At-Tarroqi Sampang.
[70] Data diambil dari "Zaman Berubah Tuntutan Berubah", *Tempo*, 16 Oktober 1993, hlm.38.
[71] "Ketika Kiai Jadi Selender", *Tempo*, 16 Oktober 1993, hlm.35. Selender = mesin penghalus jalan.

dari zamannya. Zaman sudah berubah, tuntutannya pun berubah. Ini soal perasaan. Kita harus arif menahan diri, tetapi kalau Nipah, KH Abdurrahman Wahid setuju yang terlibat penembakan diperiksa secara tuntas. Di situ Pemerintah melakukan politik pembangunan secara sepihak. Tak berunding secara tuntas.[72]

Apabila dicermati, komentar dari kyai- kyai Sampang, Pamekasan, Sumenep maupun para ulama Jawa Timur dan juga KH Abdurrahman Wahid terdapat kesamaan. Mereka menuntut agar pemerintah arif dalam menyikapi pembangunan Waduk Nipah dan mereka juga minta agar ada proses hukum yang jelas terhadap pelaku penembakan. Secara *gamblang* KH Alawy Muhammad menuding pemerintah tidak membangun komunikasi yang baik antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Manfaat apa yang akan diterima masyarakat Sampang dengan adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah juga menjadi perhatian dari tokoh Sampang tersebut.

b. Sikap dan Pandangan Non Ulama

b.1. Masyarakat Golongan Atas

Rencana pembangunan Waduk Nipah dan tragedi yang menyertainya juga mendapat tanggapan dari masyarakat non ulama (*bane santre)* baik dari kalangan atas, menengah maupun dari kalangan rakyat kecil. Masyarakat yang berada di luar Pulau Madura namun mempunyai ikatan dengan Madura, baik secara genealogis, kultural, struktural, maupun meraka yang menaruh perhatian terhadap Madura dimintai tanggapannya. Namun begitu, masyarakat Madura khususnya warga Sampang menjadi prioritas.

Mengenai nama waduk yang kemudian disebut Waduk Nipah, H. Abdul Azis, pengusaha yang sukses dan juga seorang juru kunci Makam atau Petilasan Pulau Nipah (ditempati sejumlah kera) mengatakan bahwa yang berhak memakai sebutan itu adalah orang Pulau Nipah. Sebagai juru kunci tempat yang dikeramatkan ia mengatakan bahwa apabila nama tersebut digunakan, maka seharusnya 'minta izin' dahulu dengan pemilik nama. Pemakaian sebutan yang tidak seizin pemiliknya akan mengakibatkan hal-hal

[72] Tempo 16 Okt.1993, *ibid.*, hlm.37.

yang tidak diinginkan (kualat terhadap leluhur Nepa) seperti yang telah terjadi pada pembangunan Waduk Nipah.[73] Lebih lanjut disebutkan

> "...pembangunan proyek pembuatan waduk itukan rencananya untuk memakmurkan rakyat, makanya ya rakyat diajak ngomong dulu, juga kyai-kyainya, baru kemudian diadakan pembangunan, jangan asal merasa kuat terus memaksakan kehendak, jadinya malah menimbulkan persoalan yang pelik di masyarakat. Kalau masyarakat sini itu, pada nurut kok apa yang dikatakan kyai, jadi asal mereka setuju pasti rakyat mendukungnya. Mereka juga tidak minta izin kesini, padahal orang sini kan yang ber hak memakai nama itu. Orang lain daerah saja ada dan bahkan banyak yang datang ke petilasan kok malah ini memakai nama tidak izin"[74]

Terlepas dari benar tidaknya pembangunan Waduk Nipah membawa malapetaka karena *kualat* terhadap yang *mbaurekso* atau penjaga Pulau Nipah, setidaknya ada dua hal yang bisa dicermati dari ucapan H abdul Aziz. Pertama adalah perlunya dialog atau komunikasi dan yang kedua adalah peran kyai.

Lantaran protes datang dari dalam dan luar negeri, perorangan maupun organisasi non-pemerintah, lembaga hak azasi manusia, lembaga hak azasi internasional, yang menuntut supaya mengusut tuntas masalah Nipah. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang bekerjasama dengan Direktorat Operasional YLBHI Jakarta bekerja keras untuk menelusuri lebih jauh tentang peristiwa pembangunan Waduk Nipah, diharapkan dari materi yang dikumpulkan di lapangan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan / masukan bagi pengambil kebijakan. Menurut DR. Adnan Buyung Nasution, ketua dewan pengurus YLBHI, hasil materi yang telah disusun dan diterbitkan sebenarnya merupakan bentuk gugatan rakyat terhadap kemandegan sistem hukum kita, yang hingga ini, tidak mampu menjawab pertanggungjawaban hukum dari para pelaku kasus tewasnya petani Sampang. [75]

---

[73] Wawancara dengan H.Abdul Azis tanggal 28 Mei 2004 di rumahnya.
[74] *Ibid.*
[75] Andik Hardiyanto, dkk.,1995, hlm.iii

Dalam peristiwa penembakan di Nipah, menurut Pangab Jenderal Feisal Tanjung menilai bahwa pasukan yang terlibat dalam insiden itu sebagai tentara yang tidak profesional. Munculnya aparat bersenjata di sana karena perintah Bupati Sampang. Ketika itu, Pemerintah Daerah ingin mengukur tanah di Banyuates untuk pembangunan Waduk Nipah. Namun bupati dinilai melakukan kesalahan fatal, karena tak mengikutsertakan tokoh masyarakat yang berpengaruh.[76]

Basofi Sudirman (Gubernur Jawa Timur), menanggapi tentang pembangunan Waduk Nipah adalah upaya baik yang tidak diatur dengan baik. Akan tetapi upaya buruknya yang diatur dengan baik, akibatnya rakyat yang menjadi korban, ABRI juga, ditambah ada yang mau *nyatut* lagi, minta bupati diganti. Masalahnya tidak semudah itu mencopot bupati. Kabupaten Sampang adalah wilayah daerah Propinsi Jawa Timur. Sebagai gubernur ia mengatakan, "...Kalau bupati dicopot, *alunga aku ae sing dicopot*...(Kalau bupati dicopot, lebih baik saya saja yang dicopot)". Mengenai kasus ini ia mengatakan ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,

> "...Sering orang pada numpang. Semua membangun namanya sendiri. Jangan lakukan *maachtvorming* (pembentukan kekuatan) dengan sok manusiawi, sok demokrasi. Di Indonesia kan ini dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pakai beking, pakai surat, katebelece. Ini brengsek, kurang ajar. Kedua, pakai wong cilik, menggunakan kesengsaraan, peristiwa, dalih demi ini-itu. Ketiga, dengan menggunakan sentuhan emosi, demi hak asasi manusia, demi demokrasi..." [77]

Menurut H.Mohammad Noer antara pemerintah dan ulama harus kerjasama, karena hubungan ulama dengan rakyat erat sekali. Apapun yang dikerjakan jangan sampai melupakan ulama,

> "...Apa pun yang ingin kita kerjakan, apalagi itu menyangkut kepentingan rakyat, jangan lupa ulama. Umara (penguasa) jangan

[76] Ahmed K.Soeriawidjaja,dkk.,"Setelah Pertemuan Dengan Jenderal Faisal Tanjung", *Tempo*, 23 Oktober 1993, hlm. 23.

[77] Jalil Hakim, dkk., "Nek Rakyat Njaluk Adu Medun", *Tempo*, 23 Oktober 1993, hlm.27.

jalan sendiri. Ulama dan umara adalah satu. Di samping karena rasio, kita ajak ulama sebagai orang yang memegang rohani rakyatnya. Ini intinya. Saya tahu, rencana pembangunan Waduk Nipah adalah proyek terhormat, yang bertujuan meningkatkan kehidupan rakyat yang serba miskin di Madura. Ulama sudah sepakat bahwa kemiskinan adalah musuh agama. Jelas itu. Pengukuran tanah itu seharusnya bisa diatur tanpa harus menyinggung perasaan rakyat. Pengukuran di lapangan mestinya dilakukan setelah rakyat benar-benar mengerti maksud dan tujuan proyek itu..."[78]

Tanggapan dari H. Mohammad Noer, senada dengan yang diucapkan oleh KH Alawy Muhammad dan juga H. Abdul Aziz, yakni hubungan yang dekat antara ulama dan rakyat. Di samping itu pembangunan waduk hendaknya juga dilakukan setelah semuanya jelas bagi rakyat. Pemerintah dalam hal ini tidak melakukan komunikasi secara optimal dengan ulama. Padahal dalam karakteristik masyarakat Madura, para ulama memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat.

Salah seorang staf Kecamatan Banyuates yang enggan disebut namanya berkomentar sebagai berikut.

" Pada dasarnya masyarakat Madura itu mudah diajak untuk melakukan hal-hal yang baik, apalagi untuk kemaslahatan orang banyak, tapi ya itu, semua haruslah dijelaskan dulu pada mereka. Mereka itukan orang kecil, tanah itu dari segi ekonomi, memang tidak produktif dan lagi secara hukum memang ada yang tidak mempunyai sertifikat, namun karena ada pihak luar yang memberi informasi yang salah, jadinya seperti itu, mereka menolak. Pada awal proyek itu memang banyak warga yang tidak setuju dengan pembangunan waduk. Keadaan itu sekarang ini telah berubah, setelah semuanya jelas, banyak orang yang minta agar tanahnya dibebaskan. Dan pembangunan itu ya sangat penting bagi kecamatan sendiri, karena akan memajukan daerah ini. Tapi semua tidak lepas dari faktor ekonomi, bagi orang yang langsung mendapat keuntungan secara finansial ya sangat mendukung seperti orang yang berada di daerah Montor, karena daerah itu merupakan pintu masuknya proyek. Kepala desa disitu diuntungkan. Sekarang semua sudah bisa dikatakan menerima pembangunan itu". Dan mengenai peristiwa yang

[78] Ahmed K.Soeriawidjaja, "Zaman Berubah, Tuntutan Berubah", *Tempo*, 16 Oktober 1993, hlm.36.

memakan korban itu, hendaklah kita semua arif, dan melupakannya, tapi memang ya jangan terulang lagi. Kita sebagai staf kecamatan itukan istilahnya semua rakyatnya, kalau satu diuntungkan ya yang lain mestinya juga begitu, tapi semua tergantung pemerintah yang di atas.[79]

Sebagai seorang staf birokrat yang menjadi *agent* dari pemerintah, ucapan itu termasuk cukup hati-hati. Ketika kami akan meminjam daftar pemilik tanah yang terkena proyek, dengan sangat santunnya, tidak diberikan. Informasi yang diberikan di atas pun dengan *wanti-wanti* agar namanya tidak dicantumkan. Seperti yang tampak di lapangan, memang ada daerah yang mendapat keuntungan yang sangat memadai dari adanya proyek tersebut. Daerah Montor seperti yang disebutkan, menjadi pintu masuk proyek. *Klebun* daerah itu menyediakan tempatnya untuk penginapan para pegawai proyek, juga memasok beberapa material untuk keperluan proyek. Dengan melihat kondisi tanah dan juga kondisi sosial ekonomi warga, proyek yang dilakukan pemerintah itu dinilai sangat menguntungkan daerahnya. Dengan adanya waduk, maka warga Banyuates akan mendapat irigasi, dan orang yang terkena proyek mendapat ganti yang sesuai dengan harga tanah yang berlaku di pasaran.Tentang oknum yang diindikasikan sebagai pembawa berita yang salah adalah para profokator. Mereka katanya bukan penduduk Banyuates. Ucapan senada juga diberikan oleh para pekerja yang ikut menjadi pekerja di proyek pembangunan waduk.[80]

Terkait dengan istilah "hendaknya kita melupakan peristiwa itu" yang diucapkan oleh staf dari kecamatan adalah suatu karakter orang Madura yang digambarkan oleh seorang pengamat masalah Madura. KH Sholahur Robbani, SE, seorang pemerhati sosial mengatakan bahwa, karakter masyarakat Madura, khususnya Sampang, sangat menjaga gengsi dan harga diri. Sehingga ada pepatah, lebih baik mati dari pada menanggung malu (*Madura é tembang poté mata lebbi bagus poté tolang*). Oleh karena itu masing-masing komponen masyarakat harus mengkoreksi diri dan haruslah mempunyai rasa *tasamuh*-lapang dada, *ta'awwun*-saling menolong, dan *ta'affu*

[79] Wawancara dengan salah seorang staf Kecamatan Banyuates pada tanggal 29 Mei 2004.
[80] Wawancara dengan beberapa pekerja di lokasi proyek waduk, tanggal 28 Mei 2004.

saling memaafkan demi keutuhan dan persatuan bangsa.[81] Tanpa tendensi lain kecuali untuk persatuan, sikap memaafkan dan lapang dada seperti yang diberikan KH Sholahur Robbani, mungkin itu juga yang diharapkan oleh staf dari kecamatan itu. Tentunya tanpa mengurangi rasa prihatin bagi keluarga yang terkena musibah.

b. 2. Masyarakat Golongan Menengah

Mereka yang termasuk dalam ketegori golongan menengah berasal dari masyarakat kampus atau paling tidak mengenyam pendidikan di tingkat SMA. Oleh karena latar belakang pendidikan yang diterimanya, komentar dan sikapnya atas pembangunan waduk yang membawa korban nyawa warga Banyuates, lebih terasa "pedas", namun juga rasional dan demokratis. Secara umum pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat itu baik namun menurut mereka rakyat juga harus diajak berdialog. Seperti yang diucapkan seorang warga Sampang yang saat ini menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi di Jember.

> " Pembangunan berupa sebuah waduk yang nantinya bisa dipakai untuk *supply* air di Banyuates dan juga daerah lain di Madura memang diperlukan. Melihat kondisi tanah di Madura yang kering, proyek itu bukan sesuatu yang aneh. Namun dampak dari pembangunan itu juga mesti dipikirkan apalagi masyarakat sini sangat memegang teguh nilai-nilai agama dan adat istiadat. Yang kemudian menjadi tidak enak dan bahkan melukai warga adalah proses sosialisasi yang tidak tuntas dan lagi ada pihak-pihak yang tidak dilibatkan, tidak diajak berdialog, terutama para ulama.[82]

Ada beberapa kata kunci yang terdapat dalam kata-kata yang diucapkan, yakni pembangunan, dan sosialisasi. Dengan melihat kondisi Madura yang kering, maka pembangunan sarana irigasi itu memang diperlukan. Dengan adanya waduk, maka daerah-daerah yang tadinya hanya

[81] Seperti yang dikutip oleh Moh.Anshori dan Taufiq Rizqon, "Mengapa Sampang Rentan Konflik Kepentingan", *Jawa Pos*, 12 September 2000.
[82] Wawancara dengan Usman, pada tanggal 27 Mei 2004 di Sampang.

menggantungkan pengairan pada musim hujan akan dapat diairi. Setiap pembangunan tentu akan ada dampaknya, oleh karena itu dengan latar belakang masyarakat Banyuates yang sangat menjunjung tinggi agama dan adat istiadat upaya meminimalis dari dampak negatif sebuah pembangunan haruslah dipikirkan. Adapun sosialisasi itu bisa dilakukan di awal proses pembangunan, tokoh-tokoh setempat yang sangat dihormati rakyat menurutnya haruslah diajak berbicara. Lebih lanjut dia berkomentar bahwa kekerasan yang mewarnai proyek itu seharusnya tidak perlu terjadi, seandainya pemerintah mau mendengarkan rakyat dan memahami karakter masyarakat.[83]

Peristiwa adanya korban Waduk Nipah ditanggapi dengan protes keras dari kalangan kampus perguruan tinggi. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta kira-kira 1.500 orang mengadakan demonstrasi di sekitar bunderan pintu masuk kampus Universitas Gadjah Mada. Unjuk rasa tersebut diprakarsai oleh kelompok mahasiswa, Gerakan Masyarakat Purna Orde Baru atau Gepur Deru, yang menuntut agar Pemerintah membentuk komisi nasional yang indipenden untuk menangani peristiwa "Madura Berdarah". Peristiwa-peristiwa serupa yang telah terjadi di tanah air diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk menjalankan pembangunan yang lebih bermoral dan beradab. Gubernur Jawa Timur dianggap ikut bertanggungjawab. Hal ini tampak pada saat aksi unjuk rasa yang disertai dengan digelarnya poster bertuliskan, "Basofi... Mengapa kau tembak bangsa sendiri, abo...abo...".[84] Aksi dibarengi dengan orasi dan puisi yang dibacakan oleh penyair Emha Ainun Najib yang mengenakan pakaian serba hitam, judulnya *Nipah-Nipah*, "*...Nyatakan kebenaran, betapa pahit pun rasanya. Maka, kami duduk dan berdiri di sini, agar kami telan juga rasa pahit hati saudara-saudara kami di Banyuates, Sampang, Madura...*"[85] Aksi di budaran UGM itu masih dilanjutkan pada malam hari di Gelanggang Mahasiswa UGM. Acara malam hari itu berupa salat gaib, pembacaan doa (membaca Surat Yasin), dan acara ditutup dengan tahlil.

---

[83] *Ibid.*
[84] Agus Basri, dkk.,"Setelah Mereka Belajar Dari Dili", *Tempo*, 16 Oktober 1993, hlm.30.
[85] *Ibid.*

Photo 4: Aksi protes mahasiswa di Yogyakarta atas tragedi di Nipah
Sumber: "Setelah Mereka Belajar dari Peristiwa Dili", *Tempo,* No. 33 Th. XXIII, 16 Oktober 1993.

c. Masyarakat Golongan Bawah

Masyarakat golongan bawah menyikapi dan memberi komentar tentang pembangunan waduk dengan lebih pragmatis. Mereka umumnya melihat pembangunan yang bakal menenggelamkan beberapa desa itu dalam batas "kekinian". Dalam arti mereka menangkap keuntungan dan kegunaan serta kerugian dengan adanya waduk itu dalam konteks waktu yang pendek. Kelompok ini terbagi dalam dua bagian yakni yang menolak dan yang menerima. Mereka yang menolak, adalah yang umumnya lahan mereka nantinya bakal tenggelam oleh genangan air. Mereka ini pula yang mempertanyakan soal pengukuran tanah yang sepihak dan juga mereka melakukan protes terhadap aparat yang melakukan pengukuran, sehingga sampai muncul 'insiden Nipah'. Para petani Banyuates, yang menolak adanya pengukuran tanah, tetap mempertanyakan pada pemerintah akan kejelasan proyek itu. Setahun setelah peristiwa berdarah itu beberapa petani mengadu

ke Komnas HAM di Jakarta. Mereka (Junaidi, P. Hudhori, Zaini, dan M. Makruf) ditemui oleh Baharuddin Lopa, Bambang W. Soeharto dan Clementino Dos Reis Amaral.[86] Pengaduan itu sudah yang kedua kalinya, setelah sebelumnya yakni pada bulan April 1994, mereka juga mengirimkan utusannya ke Komnas HAM. H. Rusdi, seorang warga Nagasari, memberikan komentarnya di harian *Kompas* sebagai berikut, *"nganiaja oreng sampe kasaleo bei nika eokom napa pole sampek mate'e empa' oreng, neka kudu eokom kiya"* (membuat orang keseleo saja bisa dihukum, apalagi sampai membunuh (empat orang), harus dihukum juga).[87] Kini ketika pembangunan phisik mulai dibangun di daerah Montor, beberapa orang yang berasal dari Kecamatan Banyuates ketika kami temui di kantor kecamatan enggan berkomentar tentang pembangunan waduk yang menelan korban nyawa manusia itu.

Kelompok yang lainnya adalah mereka yang mendukung adanya pembangunan waduk. Mereka itu saat ini ada yang menjadi pekerja di proyek pembangunan waduk. Beberapa anggota masyarakat yang ikut terlibat dalam pembuatan proyek pembangunan waduk memberikan komentar yang hampir sama. Mereka umumnya berpendapat bahwa pembangunan itu sangat menguntungkan masyarakat, karena tanah yang dipakai untuk genangan air itu tanah yang tandus dan tidak menghasilkan apa-apa secara ekonomi. Disamping itu, waduk itu nantinya akan membuat masyarakat luas bisa menikmati panen yang lebih baik, juga kalau untuk pariwisata, masyarakat bisa mendapat keuntungan dari parkir dan lainnya. Mereka memberikan contoh bahwa mereka bisa langsung mendapat tambahan pemasukan uang karena turut bekerja pada pembangunan waduk selain uang yang telah diterimanya sebagai ganti rugi tanah milik mereka.[88]

Walaupun demikian, ada juga penduduk yang sampai saat pembangunan dimulai tetap 'belum' bisa menerima dengan 'ikhlas', munculnya proyek tersebut, dan tetap belum mau menyerahkan tanahnya untuk diukur. Mereka tetap belum mau pindah. Namun proses 'negoisasi' antara berbagai pihak terus dilakukan, seiring dengan pembangunan waduk

---

[86] "Four Madurese farmers return to seek justice" *The Jakarta Post*, 20 December 1994

[87] Ody, "Pengukuran Tanah Sepihak Resahkan Warga Banyuates", *Kompas*, 17 September 1994.

[88] Wawancara dengan Matsari dan Sahil pada tanggal 28 Mei di Banyuates Sampang.

yang telah berjalan.

Pembangunan Waduk Nipah, sebuah proyek yang berusaha mensejahterakan rakyat, namun "memakan korban" itu menuai pro dan kontra menurut sudut pandang masing-masing atas dasar alasan yang berlainan. Namun yang perlu dicatat di sini bahwa perlunya dibangun komunikasi yang baik dalam mengerjakan pekerjaan besar sehingga betapa pun pentingnya suatu proyek pembangunan, sejauh mungkin dijauhkan dari konflik, keresahan maupun kerusuhan.

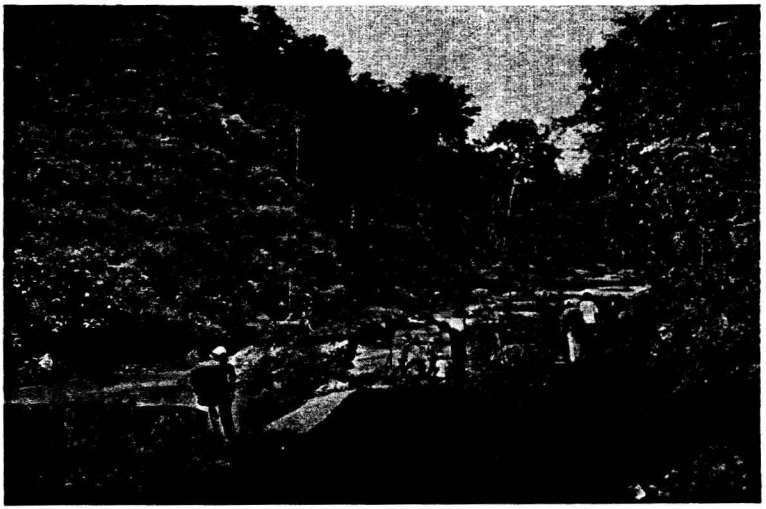

Photo 5: Lokasi Pintu Air di Montor

BAB V
KERUSUHAN DI LADANG GARAM TORJUN: *SEBUAH SENGKETA YANG TAK KUNJUNG USAI*

A. Latar Historis Pembuatan Garam

Pembuatan garam di Madura telah berlangsung lama. Sejak zaman kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja lokal, Madura sudah dikenal sebagai daerah penghasil garam. Sejak zaman VOC, raja-raja di Madura telah mempunyai cara tersendiri dalam meng-eksploitasi garam. Di daerah penghasil garam, menurut Kuntowijoyo, akumulasi modal bisa terjadi, sedangkan di daerah pedalaman hal itu tidak terjadi. Ekonomi dari pembuatan garam di desa-desa pantai selatan membuka jalan bagi pertambahan uang yang beredar. Pada akhir abad XIX, penjualan ladang garam sudah menjadi suatu hal yang lazim. Penjualan ladang garam itu hampir sama tingkatnya dengan pewarisan.[1] Penjualan ladang garam sudah menjadi kegiatan yang menghasilkan uang. Lintah darat baik Cina maupun pribumi, muncul di daerah penghasil garam. Harga tanah yang menghasilkan garam lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah tegalan maupun sawah. Oleh karena hasil dari garam bisa lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dari sawah.[2] Pembuatan garam bagi orang Madura merupakan usaha ekonomi yang penting. Di daerah penghasil garam, sejumlah penghasil garam pribumi telah menjadi tuan-tuan tanah dan menjadi orang - orang kaya yang makmur.[3]

Dalam hal pemasaran hasil produksi para penghasil garam telah kehilangan hak untuk menjual produk mereka secara bebas sejak zaman pemerintahan dipegang oleh para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi merampas hak tersebut dari tangan para pembuat garam dan memaksa mereka untuk menjual garam kepada pemegang monopoli, yakni pedagang Cina.

---

[1] Diambil dari Kuntowijoyo, "Agama, Islam, dan Politik: Gerakan-gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura, 1913 1920" dalam Huub de Jonge (ed), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi. Studi studi Interdisipliner tentang Madura.* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1985), hlm. 40.

[2] *Ibid.*, hlm. 41.

[3] Rumah-rumah para produsen beratap genting, pintu-pintunya diberi hiasan, dan di pendapa terdapat tempat tidur. Para perempuan memakai berbagai perhiasan, banyak membeli pakaian untuk pesta. Produsen garam dari Sampang yang kaya-kaya terkenal sebagai penghisap candu dan peminum.Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris. Madura 1850-1940.* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 406.

Kemudian tatkala pemerintahan jatuh ke tangan kolonial Belanda, pemegang monopoli adalah pihak pemerintah yakni ke tangan pemerintah kolonial.[4]

Raja-raja Madura pada masa lalu menggadaikan penjualan garam kepada orang Cina, dan mereka memperoleh bagian 2.000 gulden setiap tahunnya. Berhubung dengan adanya pembelian gadai, garam Madura pembeli gadai hanya dibeli dengan harga sekitar 5 - 6 gulden.[5] Harga tersebut termasuk biaya pengangkutan dari tempat pembuatan hingga pantai. Karena pengangkutan garam dari Madura ke Jawa tidak dikenai bea pajak, maka keuntungan yang diperoleh para pembeli gadai sangatlah besar. Selain keuntungan dari penjualan garam, para pembeli gadai masih memperoleh berbagai pungutan berupa pajak dari penduduk di daerah garam tersebut. Pajak tersebut antara lain pajak tegal dan pekarangan, pajak perikanan, pajak kepala dan sebagainya.

Pada masa pemerintahan berada di tangan Inggris, Raffles menghapus kebiasaan gadai daerah-daerah garam di Madura. Pengelolaan garam yang tadinya berada di tangan Cina kemudian diambil-alih. Atas persetujuan raja-raja Madura, Raffles memberikan kompensasi sebesar 5000 gulden per tahun dan memberikan garam sebanyak 50 koyang kepada para raja. Pemberian garam ini dipergunakan untuk keperluan raja sendiri. Sementara sejumlah uang hasil kompensasi sebagian digunakan untuk keperluan raja sendiri dan sebagian lagi digunakan untuk membayar para pembuat garam. Raffles juga mengangkat seorang pengawas sebagai Kepala Dinas Pengelolaan garam di seluruh Jawa dan Madura ntuk menangani pengelolaan garam. Daerah pembuatan garam di Madura dibagi menjadi tiga bagian dan masing-masing bagian dikepalai oleh seorang agen. Sedangkan masing-masing bagian masih dibagi menjadi beberapa tempat dan pengelolaannya dibebankan kepada para agen.[6]

---

[4] Kuntowijoyo, "Agama,...", *loc.cit.*

[5] P.H. van der. Kemp. *Handboek tot de Kennis van's Lands zuotmiddel in Nedhertalndsch-Indie: Eene Economisch-Hisierische studie.* (Batavia : G Kolff & Co 1894) (lihat juga) Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940* .(Yogyakarta: Matabangsa, 2002).

[6] W. van. Braam. "Een en Ander over de Zoutaanmaak der Bevolking op Madoera" *Koloniale Studien* 1916-1917.

Pengelolaan pada masa pemerintahan Inggris dilaksanakan secara terpusat dan para agen praktis hanya sebagai pelaksana. Mengingat pemerintahan Raffles berlangsung dalam waktu yang singkat, maka ketika pemerintahannya berakhir cara pengelolaan garam dengan cara di atas tidak dapat dilanjutkan. Sepeninggal Raffles, pengelolaan garam dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini dasar-dasar pengelolaan garam yang diletakkan oleh Raffles yang bersifat monopolistik dikembangkan.

Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda mengambil alih pengelolaan garam dari Raffles hampir selama seratus tahun (1818 -1915), pengelolaan garam menjadi tidak menentu. Antara pengelolaan terpusat yang diurusi oleh *Departement van Onderwijs Eeredienst Nijverheid* dan desentralisasi di bawah kewenangan Residen setempat selalu silih berganti. Pergantian antara kedua sistem ini dilakukan dengan alasan adanya krisis garam.[7] Pada tahun 1882 muncul Undang-undang Monopoli Garam dari pemerintahan Hindia Belanda, akan tetapi di sisi lain pengelolaan garam masih diwarnai penanganan yang silih berganti. Berdasarkan Undang Undang Monopoli tahun 1882, surat izin untuk memproduksi garam diberikan kepada para pembuat garam, dan tidak kepada pemilik tanah. Pada bulan April dan Mei, produksi tiap-tiap plot direncanakan, dan diadakan suatu pertemuan dengan para pemilik plot, pembuat garam, kepala desa, kepala distrik, dan kepala subdistrik. *Pepel* (surat izin) , suatu bentuk kontrak produksi, diberikan kepada para pembuat garam. Pada waktu itu dibuat perjanjian tersendiri antara pemilik tanah dengan pembuat garam, kecuali kalau pemilik tanah itu sekaligus sebagai pembuat garam.[8]

Baru pada tahun 1909 ketika terjadi krisis garam, maka muncul pemikiran untuk membentuk suatu badan yang akan mengelola garam sehubungan dengan *zoutregie*. Usaha ini dapat tercapai pada tahun 1915 dengan ditetapkannya dinas regie secara definitif.[9] Dengan terbentuknya dinas tersebut, organisasi pusat telah bekerja kembali dan telah dipisahkan dari urusan Pemerintahan dalam Negeri. Selain itu, jika dilihat dari segi

---

7 *Ibid.*
8 Kuntowijoyo, Perubahan Sosial..., *op.cit.*, hlm. 410.
9 W. van Braam, *loc.cit.*

organisasinya telah terjadi penyempurnaan dan sistem administrasinya dikelola seperti administrasi perusahaan.

Dalam administrasi produksi garam pemerintah, pegawai rendahan sejak awal diambil dari penduduk pribumi. Posisi yang lebih tinggi diduduki oleh pegawai bangsa Belanda. Pada tahun 1912 terdapar empat kepala gudang, dan empat belas pengawas (*opzichter*). Pegawai-pegawai pribumi dengan pangkat mantri ada sebelas orang, dengan gaji antara 50 -75 gulden per bulan, dan mereka bergelar, *raden, kyai,* serta *mas.* Pegawai pribumi ada juga yang bertugas sebagai penjaga, dan untuk menambah jumlah pegawai dari penduduk pribumi diusulkan ada pengawas ladang garam atau *mandor.*[10] Sistem administrasi seperti itu pada dasarnya bersifat sangat etnis, dengan etnis Eropa (Belanda) diatas dan pribumi di bawah.

Pengelolaan garam yang dilaksanakan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya bersifat monopolistik. Sebagai konsekuensi dari sistem pengelolaan ini, di sana hanya ada satu pemegang tunggal dalam penjualannya yakni pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda, bahkan termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi dan pendistribusiannya. Segala sesuatu yang menyangkut masalah produksi kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu. Pembuatan garam dilakukan di ladang-ladang yang bahan bakunya adalah air laut, sehingga ladang-ladang garam di Madura pada umumnya terletak di dekat (pinggir) pantai. Pembuatan garam pada prinsipnya sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Di Madura terdapat dua musim yaitu musim kemarau yang berlangsung pada bulan Mei hingga Oktober dan musim penghujan yang berlangsung pada bulan November hingga April. Pada musim kemarau kristalisasi garam waktunya jauh lebih pendek akibat adanya angin kemarau yang disebut dengan angin *gending.* Berhubung pembuatan garam sangat dipengaruhi faktor musim, yakni musim kemarau, maka pada bulan Mei hingga Oktober orang-orang Madura melakukan aktivitas pembuatan garam.[11] Waktu penguapan dalam sekali pembuatan garam berkisar antara 25 sampai 28 hari, dan garam telah

[10] Kuntowijoyo, Perubahan Sosial..., *op.cit.*, hlm. 402 - 403.

[11] Parwoto. "Monopoli Garam di Madura 1905 1920." *Thesis* S2, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 1996 (unpublished)

siap dikumpulkan dan diangkut ke tempat yang kering. Setelah itu garam masih memerlukan waktu pengeringan lagi antara 4 sampai 10 hari di bawah terik matahari dan diangin-anginkan, baru setelah itu siap dikirim ke depot depot pemerintah.

Perlu dipahami bahwa pembuatan garam di Madura terdapat di tiga tempat yakni: Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Dalam penelitian ini lebih memfoskuskan wilayah Sampang khususnya di Kecamatan Torjun. Pembuatan garam, selain dilakukan di ladang garam milik pemerintah, juga di ladang garam milik rakyat. Berhubung aktivitas pembuatan garam, terutama yang menyangkut ladang garam rakyat terkait dengan adanya monopoli pemerintah, rakyat (pemilik ladang garam) tidak bebas untuk memproduksi karena terdapat sejumlah aturan pembatasan sebagaimana termuat dalam *Staatblad van Nederlandsch-Indie* No. 73 Tahun 1882 ayat 1 yang terjemahan bebasnya berbunyi :[12]

> Bilamana tidak dapat izin dari Pemerintah, dan garamnya bukan bagi negeri kecuali yang tersebut dalam pasal berikut maka dilaranglah membuat garam: 1. Jawa dan Madura; 2. Di pemerintahan pantai barat Sumatera; 3. Di Residensi Bengkulu, Distrik Lampung, dan Palembang; 4. Dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam peraturan tersebut, beberapa daerah yang mempunyai ladang garam berkewajiban untuk membuat garam. Pada waktu musim pembuatan garam, semua ladang garam yang ada diwajibkan membuat garam untuk keperluan pemerintah. Dalam hal pembuatan garam pada prinsipnya pemilik ladang garam dibebaskan apakah mereka akan membuat garam di ladang garamnya atau tidak. Jika mereka menentukan untuk membuat garam, maka mereka terikat dengan sejumlah aturan yang terkait dengan monopoli garam. Para pembuat garam yang telah menentukan sikapnya, mereka segera mengurus surat izin ke kantor regie garam setempat. Surat tersebut merupakan bukti secara resmi bahwa yang bersangkutan berhak sebagai pembuat garam. Selain memuat berbagai aturan yang harus dilak-sanakan, surat

[12] *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 1882, No. 73.

yang disebut *pepel* ini juga memuat rekening koran dari pembuatnya.

Sehubungan dengan politik liberalisasi yang ditandai dengan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, tetapi pada kenyataannya pemerintah Hindia Belanda tidak konsisten. Hal ini terbukti dengan masih diterapkannya politik monopoli, khususnya yang menyangkut monopoli garam.[13] Sikap mendua tampak jelas terutama setelah tahun 1882 dengan munculnya Undang-Undang Monopoli sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pada prinsipnya tidak akan melepaskan suatu kebijakan sekalipun bertentangan dengan politik kolonial yang sedang berlaku selama kebijakan itu menguntungkan. Yang perlu diingat bahwa alasan kebijakan monopoli senantiasa diselaraskan dengan politik yang sedang berlangsung. Pada masa *Cultuur Stelsel*, Pemerintah Belanda memandang monopoli garam merupakan bagian dari pelayanan kerja, semacam *Cultuur Diensten* yang berlangsung di Jawa. Setelah pelayanan kerja dan pelayanan menanam dihapus, monopoli dipandang sebagai bagian dari sistem pajak.[14]

Sebagai konsekuensi dari sistem pengelolaan terpusat setelah munculnya Dinas Regie, dilakukan koordinasi antara jumlah produksi dan kebutuhan garam. Keterpaduan dua sektor ini amat penting, karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Der Kemp mengenai krisis garam, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya keterpaduan antara kedua sektor. Keterpaduan kemudian diusulkan dan harus dapat dilaksanakan pada tahun 1915 oleh Dinas Regie. Selain adanya keterpaduan dua sektor, hal lain yang dianggap penting adalah perlunya persediaan garam selama 4 tahun sebagai persediaan untuk menanggulangi adanya krisis garam.[15]

Kebijaksanaan tersebut pada prinsipnya memerlukan pengawasan yang ketat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembuatan dan penjualan secara ilegal, karena apabila terdapat pembuatan di luar ketentuan monopoli akan mempengaruhi keseimbangan. Untuk menghindari adanya penyimpangan, hampir semua aparat birokrasi dalam Dinas Regie mempunyai

---

[13] Sartono Kartodirdjo, dkk., *Memori Serah Jabatan 1921 1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*. (Jakarta :Arsip Nasional RI. 1978), hlm, 196 - 201.

[14] Kuntowijoyo, Perubahan Sosial..., *op. cit*, hlm. 399.

[15] Van Braam, *loc. cit.*

tugas pengawasan. Selain pengawasan terhadap penyimpangan, juga pengawasan terhadap pencurian garam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, mereka dibantu oleh polisi garam.[16] Dinas Regie juga bertugas untuk menjaga agar garam yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik, garam yang kotor akan sulit untuk dijadikan garam briket. Munculnya garam briket tidak lepas dari penyalahgunaan yang sering muncul di antara petugas gudang sehubungan dengan penggunaan ukuran jumlah untuk menghitung banyaknya produksi garam. Yang dimaksud ukuran jumlah adalah sistem pengukuran yang digunakan pada produksi garam, seperti *pikul*, dan *koyang*. Pengukuran semacam ini tidak menunjukkan kepastian karena dalam setiap *koyang* tidak selalu menunjukkan jumlah kilogram atau *pikul* yang pasti. Sebagai contoh satu *koyang* = 30 pikul, tetapi di dalam pelaksanaannya menjadi 32 *pikul* atau lebih. Hal ini terjadi karena penggunaan takaran keranjang *pikul* antara waktu membeli dari penjual dan mengirim garam ke berbagai tujuan tidak menggunakan ukuran keranjang yang sama. Dengan kejadian semacam itu ada pihak-pihak yang dirugikan, sementara yang lain memperoleh keuntungan.[17] Pengukuran semacam itu juga tidak begitu praktis untuk perdagangan skala kecil.

Dalam kondisi demikian pedagang perantara mendapat tempat guna melayani kebutuhan garam yang berskala kecil. Perdagangan untuk memperjualbelikan garam secara eceran dengan menggunakan ukuran kilogram dan penakarannya menggunakan takaran dari tempurung kelapa. Penggunaan alat ini juga memungkinkan terjadinya kecurangan dari pihak penjual perantara. Kecurangan terjadi, misalnya, ketika pedagang sedang membeli, tangannya mengangkat takaran yang berisi garam dengan jari-jari tangan yang lain dipasang pada tempurung bagian atas, sehingga isi garam menjadi lebih banyak. Pada waktu menjual, jari-jari tangan yang lain tidak dipasang sehingga mempengaruhi isi dibanding pada waktu membeli.[18]

Pabrik garam briket yang pertama berdiri di Madura adalah di Kalianget, Sumenep. Pabrik tersebut dibangun pada tahun 1899 di bawah

---

[16] Van den Kemp. *loc. cit.*

[17] *Jaarverslag van de Dient der Zuotverpakking Jaarverslag 1910 - 1911*, (Batavia : Landsrukkerij,1912), hlm.2.

[18] Van Braam, *op. cit.*, hlm. 100.

pimpinan Dr. Van Buhren, *Directoer der Zout-verpakking*. Selanjutnya dibangun pabrik kedua di Mangunan, Pamekasan. Akhirnya, pada tahun 1903 dibangun pula pabrik garam briket yang ketiga di Krampon, Sampang.[19]

Dengan munculnya garam briket, dapat dipastikan berpengaruh terhadap penggunaan alat penakaran garam dengan tempurung kelapa untuk mengukur berat garam dalam perdagangan. Hal ini berarti berpengaruh juga terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam perdagangan garam oleh para pedagang perantara. Garam briket dianggap lebih praktis untuk diperdagangkan, karena dengan beratnya yang sudah pasti juga menghapus tindakan para pedagang perantara untuk memanipulasi takaran garam dalam perdagangan. Oleh karena itu, munculnya garam briket di satu pihak dapat memperkecil tindakan negatif para pedagang perantara, dan di lain pihak dapat dipandang sebagai suatu kemajuan yakni penggunaan teknologi modern untuk mencetak garam briket.

Berikut ini hendak diuraikan perbandingan tentang garam briket yang dihasilkan oleh pabrik di Kalianget dan Krampon. Pabrik di Kalianget antara tahun 1899 hingga 1903 merupakan masa percobaan, sehingga tidak dapat ditunjukkan hasilnya. Demikian pula pabrik di Krampon dari tahun 1903 sampai dengan 1904, belum dapat diketahui jumlah garam yang dihasilkan. Baru pada tahun 1904 dapat diketahui produksi gararn di Kalianget sebanyak 14.732 *koyang* dan pada tahun berikutnya sebesar 8.129 *koyang* untuk pabrik di Krampon. Secara keseluruhan produksi garam di kedua pabrik, dari tahun 1904 hingga 1911 dapat dikatakan rneningkat, tetapi bila dilihat per tahun terkadang mengalami penurunan. Mengenai jumlah produksi garam pada masing-masing pabrik maupun keduanya dari tahun 1904 sampai 1911 terlihat dalam tabel di bawah ini:

[19] Jaarverslag .....*loc. cit.*

Tabel 5.1 Produksi Garam Briket di Kalianget dan Krampon 1904 - 1911

Tahun	Produksi Pabrik di Kalianget dalam *koyang*	Produksi Pabrik di Krampon dalam *koyang*	Jumlah Produksi dalam *koyang*
1904	14.732	-	14.732
1905	14.730	8.129	22.859
1906	8.765	12.547	21.312
1907	8.783	11.948	20.731
1908	11.364	12.139	23.503
1909	17.580	14.353	31.933
1910	17.716	20.885	38.601
1911	22.469	21.089	43.558

Sumber: *Jaarverslag van de Dienst der Zoutverpakking, 1910 - 1911* (Batavia: Landsdrukkerij, 1912), hlm. 6.

Dalam kenyataannya tidak semua garam yang dihasilkan dibuat briket, karena ada keperluan yang menyangkut penggunaan garam non-briket, misalnya uuntuk pengawetan ikan. Mengingat potensi ikan laut tidak dapat tahan lama maka untuk pengawetannya diperlukan garam pasir. Dilihat dari kegunaannya kadang-kadang tidak didasari bahwa penggunaan garam untuk konsumsi dapat mempengaruhi terhadap tingkat kecerdasan seorang anak. Hal itu terjadi apabila seorang ibu hamil yang kekurangan garam dapat menyebabkan penurunan kecerdasan pada bayinya hingga 10% dari tingkat pertumbuhan normalnya.[20]

Kegunaan garam yang lain adalah untuk menanggulangi proses pembusukan, misalnya pada ikan. Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan laut yang amat luas diperkirakan mempunyai kekayaan yang menyangkut sumber daya laut, seperti produksi ikan yang amat banyak. Hal ini diperlukan kebutuhan garam yang cukup banyak pula. Selain itu manfaat garam dapat diperlukan pula sebagai bahan pembuatan obat dalam bidang kedokteran.[21]

[20] *Kompas*, 8 Februari 1996.
[21] Van der Kemp. *op. cit.* hlm. 89-100

Penggunaan garam untuk pembuatan obat dapat dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan teknologi. Pendek kata, hanya masyarakat yang memiliki kebudayaan yang cukup maju dapat memanfaatkan garam secara optimal.

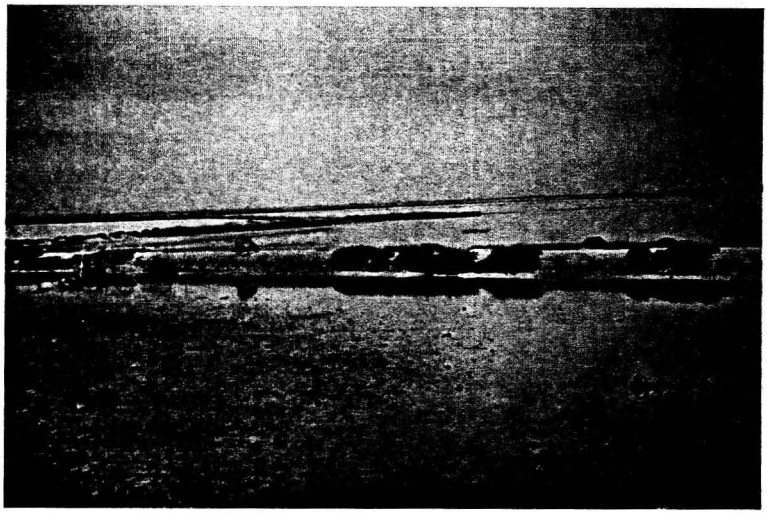

Photo 6: Ladang Garam di Torjun, daerah sengketa yang tak kunjung usai.

B. Kondisi Masyarakat Pegaraman

Mengingat objek studi meliputi satu unit geografis di Pulau Madura, gambaran masyarakat garam ini terbatas pada mereka yang bertempat tinggal di pulau tersebut. Ada tiga faktor penting dalam pelaksanaan produksi, yaitu faktor alam, tenaga kerja dan modal. Faktor alam dalam produksi garam antara lain berupa ladang garam dan air laut. Ladang garam perlu dijelaskan dalam kaitannya dengan hak kepemilikan, sedangkan air laut yang juga merupakan faktor alam tidak dibicarakan karena tidak mempunyai hak kepemilikan, artinya merupakan barang bebas. Mengingat ladang garam mempunyai hak kepemilikan dan merupakan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, dapat dimengerti jika pemilikan ladang garam menjadi salah satu dasar stratifikasi masyarakat. Apabila seseorang mempunyai ladang garam yang luas maka dia menduduki lapisan atas, sedangkan mereka yang tidak mempunyai tanah

berada di lapisan bawah.

Secara garis besar pelapisan masyarakat di daerah pegaraman terbagi, menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang mempunyai ladang garam dan kelompok yang tidak mempunyai ladang garam. Dalam proses pembuatan garam, kedudukan pemilik ladang garam amat penting karena di samping sebagai pemilik, mereka sekaligus sebagai pembuat garam. Dalam proses pembuatan garam pemilik ladang garam biasanya dibantu para pekerja yang tidak mempunyai ladang garam. Jadi, secara dikotomis ada dua kelompok masyarakat yang berperan, yaitu kelompok pembuat garam dan pekerja. Ketika dilakukan kebijakan monopoli oleh pemerintah kolonial, ladang-ladang garam wajib digarap untuk memenuhi kepentingan pemerintah. Meskipun demikian, para pemilik ladang garam berhak memilih untuk mengerjakan sendiri atau menyerahkannya pada orang lain. Apabila rnereka tidak mau menggarap, pemilik ladang harus melepaskan ladang selama musim garam dan diserahkan kepada orang lain yang ditunjuk. Sebelum pembuatan dimulai, orang yang ditunjuk harus memperoleh persetujuan dari aparat pemerintah kolonial. Sebaliknya, apabila para pemilik sendiri yang mengerjakan, mereka harus mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan.[22]

Penggunaan tenaga kerja, secara umum dapat dibedakan dalam dua sistem yaitu sistem yang berlaku sebelum adanya reorganisasi kekuasaan feodal dan sesudahnya. Sistem yang berlaku sebelum adanya reorganisasi, pemanfaatan tenaga kerja dilakukan sebagai bagian dari *pancen* atau semacam *heerendiensten*. Tenaga kerja yang digunakan untuk keperluan produksi dalam masyarakat yang masih tradisional ini pada umumnya masih terbatas pada tenaga kerja dalam unit keluarga dan desa. Sistem kerja pada masa tersebut adalah sistem *pancen* yaitu penduduk desa wajib mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh para pemegang tanah *apanage*. Bila daerah itu telah disewakan pada orang Cina atau pribumi lainnya maka penyewa berhak menerima layanan kerja dari penduduknya. Sistem kerja yang demikian, tidak mengenal sistem kerja upah. Di dalam perkembangan ekonomi maka kegiatan produksi cenderung mempergunakan tenaga kerja

[22] Van Braam. *op. cit*, hlm.10-30

yang lebih kompleks daripada tenaga kerja keluarga. Artinya, tidak hanya terbatas pada satu unit keluarga/desa melainkan telah melibatkan juga tenaga kerja dalam unit keluarga/desa yang lebih luas.

Antara tahun 1865 dan 1868, pemerintah kolonial melakukan penghapus sistem kerja wajib seperti halnya berlaku pada masa pemerintahan pribumi.[23] Sekalipun sistem kerja wajib telah beralih ke kerja bebas, tetapi sistem upah para pekerja garam di wilayah Sampang timbul permasalahan sehubungan dengan pemakaian uang adalah beberapa pembuat garam di Kecamatan Torjun, Sampang terjerat hutang kepada para rentenir. Jika produksi garam gagal atau jelek, terpaksa para pembuat garam meminjam sejumlah uang kepada mereka. Bunga yang dikenakan dalam pinjaman sebesar 5 hingga 6% per bulan. Ketika waktu mengembalikan pinjaman sudah jatuh tempo dan apabila pembuat garam belum siap mengembalikan, maka jalan yang sering ditempuh adalah menjual ladang garam serta biasanya dibeli para rentenir.[24]

Sebenarnya pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memberi pinjaman kepada pembuat garam. Akan tetapi pinjaman baru dapat diterima setelah garam ada di ladang garam. Jadi pinjaman dapat dikatakan sebagai uang muka atau *voorschot*. Tujuan lain dari pemberian pinjaman adalah untuk mencegah munculnya para rentenir. Ternyata yang terjadi sebaliknya, pada tahun 1915 sering dijumpai para pembuat garam memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi yakni antara 8 hingga 20% per bulan.[25]

Pada era kemerdekaan terutama setelah hak monopoli ditiadakan, para petani garam mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam pemanfaatan ladangnya. Penggunaan lahan mengambil bentuk sistem bagi hasil yang melibatkan pemilik ladang dengan pembuat garam yang dalam istilah setempat disebut *mantong* atau *panglako*. Pola semacam ini didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui bersama. Di Pamekasan dan Sumenep pembagian hasil menggunakan sistem *maro*, artinya pihak pemilik dan pekerja

[23] DH. Burger. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia.* (Djakarta: Pradnya Paramita, 1957), hlm. 11 - 56
[24] Van der Kemp. *op. cit.* hlm. 18- 50
[25] Van Braam. *op.cit.* hlm. 18 - 30

masing-masing memperoleh bagian yang sama. Bagian yang diterima dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya produksi. Sementara itu, sistem pembagian yang berlaku di Sampang berbeda, yakni para pekerja memperoleh sepertiga, sedangkan pemilik ladang garam memperoleh dua pertiga dari hasil bersih.

Dalam perkembangan saat ini, sistem bagi hasil yang diterapkan di daerah pegaraman Sampang menggunakan pola 1 : 2, yakni satu bagian untuk pekerja dan dua bagian untuk pemilik ladang garam setelah dipotong biaya produksi. Sementara itu, sistem bagi hasil yang diberlakukan antara PT. Garam dengan penggarap berbeda, yakni 2 : 1 dengan pengertian dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk PT. Garam dengan biaya produksi ditanggung oleh penggarap. Di luar sistem bagi hasil tersebut juga ditemukan model pembuatan garam dengan sistem upah terutama diberlakukan PT. Garam. Menurut seorang informan di Kecamatan Torjun, upah mereka rata-rata per minggu sebesar Rp 85.000,- tanpa membedakan jenis kelamin.[26]

Pada dasarnya upah yang diberikan oleh PT. Garam pada pekerja tergantung pada jumlah garam yang berhasil dikumpulkan. Satuan ukuran untuk menentukan jumlah garam yang terkumpul disebut *kermil,* artinya tumpukan garam yang berukuran panjang, lebar, dan tinggi 1 meter (1 meter kubik). Dalam pelaksanaanya bentuk tumpukan garam dibuat trapesium atau menyerupai batu nisan agar tidak longsor. Rata-rata dalam satu timbunan garam yang dikumpulkan biasanya dibuat ukuran 7 x 20 meter dengan jumlah keseluruhan 14 ton. Pekerjaan pengumpulan garam biasanya dilakukan secara kelompok, yang masing-masing terdiri antara 8 - 10 orang. Dalam satu hari mereka bekerja selama 6 jam dalam dua sesi (jam 08.00-12.00 dan jam 14.00-16.00) dan dapat menghasilkan sekitar 3 patok lahan yang berukuran 10 x 10 meter dengan total jumlah garam sekitar 17 ton. Besarnya upah yang diberikan untuk garam seberat 1 ton sebesar Rp. 5.500,00. Tenaga kerja yang dipergunakan, menurut penuturan Pak Hisyam biasanya didatangkan dari luar daerah pegaraman dengan sistem antar-jemput mengingat kesulitan PT. Garam untuk merekrut tenaga kerja setempat karena mereka sibuk menggarap

[26] Wawancara dengan H. Ahmad, pada tanggal 30 Mei 2004 di Torjun, Sampang, Madura.

lahannya sendiri.

Sistem upah dalam produksi garam rakyat agak berbeda dengan yang diberlakukan oleh PT. Garam. Sistem upah yang berlaku pada lahan perorangan adalah sistem harian, dengan tingkat upah sebesar Rp. 15.000 per hari dengan waktu kerja 07.00-12.00. Penggunaan tenaga upahan tersebut hanya dijumpai pada masa pembuatan meja garam dan ketika garam dipanen.

Kehidupan para petani garam pada tahun-tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dahulu mereka merokok dengan rokok merek-merek terkenal, dan saat kondisi perekonomian garam menurun, mereka cukup merokok dengan ramuan sendiri.[27] Rumah-rumah para petani garam pun ruang tamunya dihiasasi dengan peralatan seperti televisi, radio, dan juga meja tamu yang cukup bagus. Kondisi seperti itu sekarang tidak ada lagi. Kalaupun ada itu bukan dibeli dari uang hasil dari ladang garam, namun karena mereka atau keluarganya ada yang bekerja di luar negeri.[28]

C. Gejolak Sosial

Persoalan konflik agraris bisa jadi termasuk masalah laten di Indonesia. Sejak zaman kolonial, persoalan tersebut telah muncul dan mewarnai perjalanan bangsa. Pada era reformasi sekarang pun, konflik yang didasari oleh sengketa tanah itupun masih belum terselesaikan, termasuk kasus ladang garam di Sampang, Madura.[29]

Dunia penggaraman di Madura sampai saat ini sarat dengan konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan secara tuntas, sehingga sangat potensial mencuat ke permukaan dalam bentuk gejolak sosial. Potensi konflik ini sebenarnya mempunyai akar historis yang panjang sejak masa kolonial (sekitar tahun 1930-an), ketika pemerintah kolonial Belanda merampas hak-hak kepemilikan ladang garam rakyat. Perjanjian antara pemerintah kolonial dengan rakyat setempat melalui kepala desa pada tahun 1936, yang memuat penguasaan ladang garam rakyat kepada pernerintah kolonial berupa hak sewa dalam jangka waktu 50 tahun. Dengan perjanjian ini ladang garam

---

[27] "Menanti Kelahiran Komisi Penegak Konflik Agraria", *Kompas*, 25 Juni 2004.
[28] Wawancara dengan Muhammad pada tanggal 29 Mei 2004 di Torjun, Sampang, Madura.
[29] "Menanti Kelahiran Komisi Penegak Konflik Agraria", *Kompas*, hlm.. 8, 25 Juni 2004.

tersebut dikuasai dan dijadikan ladang garam pemerintah. Ketika negara Indonesia merdeka, ladang-ladang garam tersebut diambil alih pemerintah RI yang kemudian diserahkan pada PN Garam danstatusnya berubah menjadi tanah negara tanpa sepengetahuan rakyat. Rakyat yang merasa hanya menyewakan lahan garam bermaksud meminta kembali lahan tersebut ketika masa berlakunya kontrak sewa dipandang habis. Persoalan semakin rumit ketika pemerintah mencanangkan program renovasi atau modernisasi dalam pengelolaan garam.

PT. Garam (yang masa kolonial dikenal dengan *Jawatan Regie Garam dan Candu*) pada tanggal 31 Oktober 1945 dikuasai oleh Republik Indonesia. Sebagai kepala jawatan yang pertama adalah Moekarto Notowidigdo. Pada tanggal 27 Desember 1949, candu dihapus oleh jawatan tersebut sehingga hanya garam, yang menjadi wewenangnya dan kemudian namanya berubah menjadi *Jawatan Regie Garam*. Jawatan ini tetap melanjutkan politik monopoli garam. Alasan masih dipertahankannya politik monopoli adalah sebagai berikut :

1. Masih dipegangnya monopoli garam oleh pemerintah menjadikan semua keuntungan perusahaan jatuh pada kas negara, untuk kepentingan umum. Hal itu tidak terjadi jika produksi dipegang oleh swasta.
2. Sehubungan dengan ini diperingatkan akan maksud pasal 38 UUDS Republik Indonesia yang menghendaki supaya produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Kualitas garam yang dibikin oleh partikelir ternyata pada umumnya jauh kurang dari kualitas garam pemerintah. Sehubungan dengan itu, ada 3 jenis garam dilihat dari segi kualitas yakni: (a) Putih Sekali (PS). Garam. ini pembuatannya menggunakan teknik Portugis; (b) Putih (P): (C) Madurese (M). Jenis garam yang terakhir ini warnanya agak kecoklatan.
4. Menurut laporan Kementerian Kesehatan, pegaraman-pegaraman partikelir di pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur membahayakan karena kebanyakan menjadi sumber penyakit malaria.
5. Pegaraman-pegaraman pemerintah menurut kenyataannya dapat menghasilkan garam yang melebihi kebutuhan dalam negeri.

6. Untuk memberantas penyakit gondok di daerah tertentu di seluruh Indonesia perlu disediakan garam briket yang telah mengandung yodium.
7. Pemerintah berhasil menyediakan garam bagi rakyat dengan harga rendah di daerah-daerah pedalaman, terutama di Kalimantan, Sumatera dan di Sulawesi Utara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah berpendapat bahwa sistem monopoli garam harus dipertahankan dan setidaknya dikembalikan kepada keadaan semula seperti termaksud dalam *Zout Monopoli Ordonansi 1941*. Pemikiran semacam itu pada prinsipnya hendak mempertahankan sistem monopoli meskipun pada dasarnya tidak sejalan dengan suasana kemerdekaan yang baru saja direbut dari pemerintah kolonial Belanda. Namun, pada tahun 1957 muncul suatu pemikiran untuk menghapuskan sistem monopoli garam dan pemikiran ini direalisasikan dalam ketetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Agustus 1957.

Setelah penghapusan monopoli garam, PT. Garam secara berangsur-angsur mengalami kemunduran. Salah satunya diindikasikan dengan terjadinya rasionalisasi para karyawan yang dilakukan pada tahun 1969 sebanyak 6.551 orang dan pada tahun 1972 sebanyak 2.599 orang. Kemunduran itu lebih tampak pada tahun 1972, terutama menyangkut masalah manajemen PT. Garam yang dalam kondisi tidak sehat. Sebagai perwujudan akan hal itu, antara lain tidak dapat dibayarnya gaji karyawan dengan tepat waktu, termasuk juga mengenai pembagian beras karyawan. Selain itu, pelayanan pengobatan bagi karyawan dan keluarganya semakin tidak terurus, demikian juga tentang keberadaan rumah dinas karyawan yang pada umumnya dalam kondisi memprihatinkan.

Di sektor produksi terjadi persaingan yang tidak sehat antara PT . Garam dan garam rakyat. Dalam hal ini banyak kalangan petani garam yang terjerat *sistem ijon* sehingga pembuatan garam rakyat mengabaikan segi kualitasnya dan lebih mengutamakan segi kuantitas. Di sektor pemasaran, konsumen lebih menginginkan harga yang rendah sekalipun memperoleh garam asal asin saja. Kondisi demikian mengakibatkan harga garam tidak menentu, selain konsumen tidak mengenyam garam yang bermutu. Untuk

melindungi para petani garam dari cengkeraman para *pengijon* dan adanya stabilitas stok maupun harga garam, pemerintah mengadakan pembelian garam rakyat dan menunjuk PT. Garam sebagai pelaksananya.[30]

Sejak Pelita Pertama pemerintah mulai mencanangkan sebuah proyek untuk modernisasi pegaraman di wilayah Madura dengan sasaran mengadakan modernisasi atau renovasi di daerah pegaraman Kabupaten Sampang. Dalam pelaksanaan pembuatan garam sesuai dengan modernisasi dengan menggunakan metode pembuatan secara modern. Proyek ini merupakan proyek pemerintah Indonesia yang pelaksanaannya mendapat bantuan dari pemerintah Belanda. Modernisasi atau lebih tepat dengan istilah renovasi itu tidak saja meliputi ladang garam yang dimiliki PT. Garam tetapi juga meliputi ladang-ladang garam milik rakyat.

Tujuan modernisasi atau renovasi PT. Garam adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam, baik garam untuk keperluan produksi maupun untuk konsumsi. Peningkatan produksi garam industri sasarannya adalah untuk menunjang rencana pemerintah di sektor industri kimia dasar, sedangkan peningkatan produksi garam konsumsi sasarannya adalah untuk menunjang program pemerintah dalam hal perbaikan menu makanan rakyat. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 14 Tahun 1974 yang berhubungan dengan pemberantasan penyakit gondok secara endemik dan beberapa penyakit yang timbul akibat kekurangan yodium.[31]

Sebagai konsekuensi dari renovasi yang melibatkan daerah pegaraman, maka tanah pegaraman rakyat harus dibebaskan. Hal itu disebabkan sebagian tanah pegaraman rakyat berada di lokasi sekitar pegaraman milik PT Garam. Padahal tujuan renovasi adalah untuk mengefektifkan produksi dengan cara memperluas lahan. Sehubungan dengan itu maksud renovasi agar ada kesatuan lahan yang lebih luas, sehingga PT. Garam dapat atau memiliki pemilihan (penampungan air laut) yang lebih luas guna menampung air laut untuk keperluan produksi. Sehubungan dengan tujuan itu, maka ladang-ladang garam rakyat yang ada di sekitarnya harus dibebaskan. Untuk melakukan pembebasan, terlebih dahulu dilakukan studi

[30] *Sejarah PN. Garam*. tt. tp. *(unplubished)*, hlm. 15
[31] *Ibid.*

kelayakan. Dari hasil studi ini, areal garam rakyat yang harus dibebaskan seluas 1271 ha. Selain studi kelayakan, juga dilaksanakan berbagai pertemuan antara PT. Garam dengan berbagai pihak terkait. Akhirnya, pembebasan itu dapat dilakukan sejak tahun 1975.

Terdapat dua pandangan sehubungan dengan proses pembebasan tanah pegaraman milik rakyat yang terkena modernisasi, yaitu dari pihak PT. Garam dan petani garam. Bagi PT. Garam, proses itu dinilai telah melalui prosedur yang semestinya. Langkah pertama terlebih dahulu dilakukan pengajuan surat permohonan pembebasan tanah dari Dirjen Industri Kimia kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim dengan surat No 793/DJ/1974 tahun 1974 seluas 4.100 ha, termasuk tanah pegaraman rakyat yang belum dikuasai PT. Garam. Tanah pegaraman rakyat itu harus tergabung dengan tanah pegaraman milik PT. Garam paling lambat tahun 1976. Setelah pengajuan surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Dirjen Industri Kimia, Gubernur Jawa Timur, Pembantu Gubernur untuk Madura, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep dan Direksi PT. Garam.

Perternuan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan tentang pembentukan sejumlah tim yang bekerja untuk pelaksanaan pembebasan tanah pegaraman rakyat. Menurut tim pembebasan tanah, harga dasar tanah pegaraman mempunyai beberapa klasifikasi dengan harga standar yang berbeda. Sementara itu, menurut para petani garam sebagaimana diungkapkan Yayasan Al-Jihad, pada awalnya kebanyakan petani merasa keberatan dan menolak terhadap pembebasan tanah mereka. Sikap ini dilakukan oleh mereka yang hanya memiliki tanah satu-satunya sebagai sumber penghidupan. Di samping itu, mereka juga merasa kecewa akibat tidak adanya transparansi, khususnya menyangkut wilayah Kecamatan Torjun. Padahal, apabila penutupan dilaksanakan maka para petani akan kesulitan untuk pembuatan garam karena mereka tidak dapat mengalirkan air laut ke ladangnya.

Lebih buruk lagi, proses pembebasan tanah diwarnai adanya tekanan baik yang bersifat fisik maupun mental terhadap orang-orang yang menolak pembebasan tanah. Tekanan yang bersifat mental dilakukan misalnya lewat berbagai pernyataan dan berita bahwa Teluk Gresik Putih dan Sungai Saroka

akan ditutup sehubungan dengan rencana modernisasi. Tekanan tersebut akhirnya dapat mengendorkan sikap penolakan para petani dan kemudian terpaksa menerima atau menyutujui pembebasan tanah yang sekaligus dapat segera menerima pembayaran uang pembebasan. Selain tekanan psikis, juga dilakukan tekanan fisik yang berakibat pada penahanan mereka. Adanya tindakan semacam itu membuat para petani tidak senang dan kecewa kepada pihak PT. Garam dalam melaksanakan proses pembebasan tanah.

Hal lain yang merupakan perbedaan pandangan dari kedua belah pihak adalah tentang besarnya ganti rugi tanah yang dibebaskan. Menurut para petani, uang ganti rugi ditentukan secara sepihak tanpa melakukan musyawarah dengan pemilik tanah. Menurut laporan yang disusun Yayasan Al-Jihad (1999), tanah untuk proyek modernisasi bagi tanah-tanah tidak produktif dihargai Rp 960 per m^2, sedangkan PT. PUSRI waktu membeli dengan harga Rp. 2.200 per m^2.[32]

Pada tanggal 10 April 1985 pematokan lahan yang dibebaskan mulai dilakukan dan dapat diselesaikan pada tanggal 20 Mei 1985. Pematokan itu dilakukan dalam rangka penyerfitikatan tanah yang sudah berhasil dibebaskan. Akan tetapi, muncul berbagai gugatan terhadap pernatokan tersebut, terutama yang berasal dari para penduduk yang tanahnya terkena proyek renovasi. Beberapa orang yang mengadakan tuntutan pada umumnya menyatakan bahwa mereka tidak merasa menjual tanah miliknya. Selain itu, mereka juga melakukan kritik bahwa pelaksanaan pembebasan tanah dilakukan melalui tekanan dan harga tanah ditentukan secara sepihak tanpa melalui musyarawah.

Sebuah insiden terjadi ketika beberapa karyawan PT. Garam dengan bantuan aparat keamanan setempat mengusir para petani garam yang sedang bekerja di ladang yang dipersengketakan dan kemudian diganti dengan pekerja dari PT. Garam sendiri dengan pengelolaan secara tradisional. Bagi PT. Garam, pengusiran dilakukan dengan dalih bahwa tanah tersebut telah dibebaskan untuk keperluan modernisasi. Sementara itu, pihak petani berdalih sekalipun tanah tersebut telah dibebaskan, mereka merasa masih berhak untuk

[32] *Laporan Yayasan Al-Jihad, 1999 (unplublished)*, hlm. 15.

menggarapnya karena menurut versi mereka, tanda selesainya modernisasi berupa pembendungan.

Konflik petani dengan pihak PT. Garam terus berlanjut, bahkan semakin memuncak ketika memasuki era reformasi. Kaum tani bergerak untuk mengajukan berbagai tuntutan atas lahan garam yang mereka yakini sebagai warisan leluhur. Mereka bergerak dengan wadah berbagai yayasan yang bermunculan setelah era reformasi bergulir sejak tahun 1998. Berbagai yayasan tersebut seperti misalnya Yayasan *Tanah Leluhur, Al-Jihad* dan *Pelaba* (Penggarap Lama dan Baru). Bagi Yayasan *Tanah Leluhur*, mereka menuntut agar tanah milik nenek moyang yang pernah dirampas oleh pemerintah kolonial pada tahun 1936 segera dikembalikan kepada ahli warisnya. Berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki, petani garam yang tergabung dalam *Yayasan Tanah Leluhur* berpendapat bahwa ladang garam leluhur mereka dikontrak selama 50 tahun dan batas kontrak berakhir tahun 1986. Bagi Yayasan *Al-Jihad* dan *Pelaba,* tuntutan mereka menyangkut hak penggarapan tanah atau ladang-ladang garam yang pada tahun 1975 dibebaskan oleh pemerintah, dengan argumentasi bahwa tanah tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan mereka.

Berbagai tuntutan tersebut masih terus diperjuangkan hingga saat ini melalui sejumlah langkah dengan menghubungi berbagai pihak terkait. Penyelesaian yang tuntas tampaknya masih jauh dari harapan. Persoalan sengketa lahan garam tampaknya sangat potensial memunculkan konflik dan ketegangan sosial. Dengan demikian, kelangsungan produksi garam sebenamya terus dibayang-bayangi oleh ancaman serius yang berasal dari konflik dan ketegangan sosial.

1. Alasan yang Mendasari Tuntutan Rakyat

Persoalan status hak atas tanah yang masih belum baku dan jelas kriterianya telah menimbulkan banyak konflik pertanahan di berbagai daerah. Belum adanya acuan mengenai pengertian dan pembuktian status penguasaan tanah terutama tanah-tanah dengan hak adat yang dibebaskan secara paksa oleh Pemerintah Hindia Belanda terus menghantui pikiran rakyat untuk tetap memperjuangkan tanah tersebut yang merupakan hak waris dari leluhurnya bisa dikembalikan kepada pemilik yang sah. Apabila kejadiannya

memang demikian adanya, seharusnya tanah tersebut sudah dikembalikan kepada rakyat seiring dengan berakhirnya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Adapun beberapa alasan yang mendasari tuntutan rakyat adalah :[33]

a. Tanah-tanah tersebut merupakan tanah yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat sebagai warisan keluarga.
b. Hubungan masyarakat dengan tanah tidak semata-mata bermakna ekonomi tapi merupakan bagian dari sosial budaya masyarakat yang ditandai dengan adanya nama-nama : tanah *bilah pora, tanah kaet, tanah lentean, tanah rangghun, tanah ambeng-ambeng, tanah paser pote, tanah lek-kolek, tanah sebenges, tanah padeng-padeng, tanah bun-rabun, tanah ajir, tanah kajuh ojen, tanah terbis* dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang no. 5 Tahun 1960
c. Tanah-tanah rakyat tersebut dibebaskah oleh Pemerintahan Zaman Penjajahan yang *nota bene* bangsa Belanda bukan bangsa Indonesia.
d. Sejarah pembebasan tanah diakibatkan adanya *Kebijakan Zout Monopoli* (Monopoli garam, pada tahun 1904) yang berakibat pada dilarangnya rakyat biasa memproduksi garam di tanah mereka sendiri.
e. Tanah-tanah rakyat (pada 3 desa Ragung, Pangrengan dan Apaan) dibebaskan dengan cara pemaksaan disertai intimidasi dan penipuan secara hukum pada masyarakat yang tak mengerti hukum (pada saat itu beberapa orang dinyatakan hilang, ditangkap, ditahan dan ada yang dibuang di Digul dan tidak pernah kembali).
f. Tanah yang ada di desa Apaan, Ragung dan Pangarengan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang (seluas 1.200 ha sebagai areal produksi garam), sebelum dirampas oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1936-1937 adalah hak milik rakyat yang dibuktikan dengan data letter B, surat pembayaran pajak -*anslaag*- dan peta tanah buatan Belanda, termasuk Akte Pembebasan Tanah pada tahun 1936-1937. Seharusnya sejak

[33] *Laporan dari Tim Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Tanah (GRPT), Desa Ragung, Pangarengan, dan Apaan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, 2003. (unpublished)*

Penjajahan Belanda berakhir di Indonesia, tanah-tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik awal.

g. Perjanjian sewa tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda selama 50 tahun kepada masyarakat yang diwakili oleh Bupati Sumenep pada tanggal 7 Agustus 1936. Berdasarkan perjanjian tersebut seharusnya rakyat sudah menerima kembali tanah milik leluhur pada tahun 1987. Tapi kenyataannya pada tahun tersebut tanah itu justru disertifikatkan oleh PT. Garam (Persero) melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur 1987.

Dengan adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa pihak PT. Garam (persero) telah banyak melakukan pelanggaran penyalahgunaan Sertifikat Hak Pakai yang telah diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas tanah tersebut.

D. Gerakan Petani Garam di Desa Ragung, Pangarengan dan Apaan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang

Pada era 1900-an dan sebelumnya masyarakat di sekitar lahan garam yang dikuasai PT. Garam (Persero) hidup serba berkecukupan. Sebagai indikator banyaknya masyarakat setempat yang menunaikan ibadah haji pada saat itu. Daerah pegaraman pada waktu itu menjadi pusat perkembangan ekonomi.

Kebebasan dan kedamaian masyarakat sekitar lahan pegaraman PT. Garam (Persero) mulai terganggu sejak adanya Kebijakan *Zout Monopoli* (monopoli garam, pada tahun 1904). Masyarakat masih diperbolehkan memproduksi garam di tanah mereka sendiri tapi dalam batas tertentu dan garam yang dihasilkan harus dijual kepada Belanda. Bahkan para pemilik lahan (penggarap) tidak diperbolehkan untuk membawa garam ke rumah sedikitpun. Kebebasan dan kemerdekaan rakyat tambah tercekik ketika Belanda mengeluarkan larangan untuk membuat garam pada rakyat jajahannya.

Dengan dikeluarkannya peraturan pelarangan pembuatan garam masyarakat kehilangan mata pencaharian. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1936 dengan cara mengumumkan

akan memberikan ganti rugi pada masyarakat terhadap dilarangnya memproduksi garam. Adapun besar kerugiannya disesuaikan dengan luas lahan tambak pegaraman rakyat yang sudah didaftarkan di Kantor Pajak Bumi. Dengan memanfaatkan kebodohan masyarakat mereka menipu rakyat dengan cara memberikan Akta Pelepasan Hak Garap tahun 1936/1937 dan diserahkan ke Kolonial Belanda. Tetapi hal tersebut akhirnya tercium oleh rakyat dan banyak dari mereka yang tidak mau menerima ganti rugi, sehingga banyak rakyat yang dipukul, disiksa dan dihukum, bahkan dibuang ke Digul dan sebagian diantara mereka hilang. Perampasan paksa ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah *tingkepan*.

Pada tahun 1941 masyarakat yang dipelopori oleh H. Abusiri melakukan perlawanan pada Kolonial Belanda dengan tujuan tanah pegaraman rakyat yang dirampas secara paksa oleh Belanda agar dikembalikan. Perjuangan H. Abusiri dilanjutkan oleh H. Hasan Busri, Hasan Trisno dan Hanafi pada tahun 1955-1957, bahkan mereka langsung menghadap Presiden Soekarno untuk meminta dikembalikannya tanah pegaraman milik rakyat yang dulu dirampas oleh Belanda.

Pada tahun 1986/1987 PT. Garam (Persero) justru mengajukan sertifikat hak pakai yang proses pengajuannya tidak transparan. Hal ini dapat dilihat dari warkah atau RPT yang tidak diumurnkan di Balai Desa yang menurut aturan diumumkan selama 3 bulan. Saat pengukuran lahan pegaraman mereka mengatakan hanya untuk pengukuran ulang (Keterangan H. Asadi Riadi dan diperkuat Surat Rekomendasi Bupati Pemekasan dan DPRD Pamekasan, Demikian halnya dengan kejadian di desa Ragung, Kepala Desa setempat ditekan oleh Bupati Sampang dan aparat Muspida untuk ikut dalam proses pengukuran yang katanya pengukuran ulang. Di samping itu masa perjanjian antara *kalebun* Palebunan dengan Bupati Sumenep menerangkan bahwa pada tahun 1986/1987 perjanjian pemakaian lahan tersebut sudah habis masa berlakunya.

Setelah mengetahui banyak kejanggalan dan bukti-bukti akurat yang menunjukkan bahwa tanah tersebut memang benar-benar kepunyaan rakyat (ahli waris), maka masyarakat secara serentak di seluruh Madura sepakat untuk menuntut tanah tersebut kembali. Setelah berjuang selama 5 tahun mulai

tahun 1998 dengan tidak adanya kepastian yang jelas dari Pemerintah dan DPR maka rakyat Sampang langsung melakukan *reclaiming* pada tanggal 10 Juni 2003.

Gerakan *reclaiming* terhadap tanah pegaraman di Desa Ragung, Apaan dan Plasa Pagarengan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang adalah suatu gerakan petani garam untuk mengambil kembali hak tanah rakyat yang dirampas oleh peguasa Kolonial Belanda pada tahun 1936/ 1937 dengan tidak adanya pembebasan tanah pegaraman oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang ada uang bentuk pemberian Belanda dalam 100 gulden sebagai konsekvensi dilarangnya petani membuat garam dan hanya diberikan 10 gulden sedangkan sisa 90 gulden akan diberikan setelah pemegang akte berkepala singa yang berbahasa Belanda (akte 1936/57) ditarik kembali, namun sampai saat ini masih berada ditangan masyarakat petani.

Belanda saat itu melakukan dengan cara intimidasi dan pemaksaan dalam penandatanganan akte, perlu diingat rakyat saat itu kurang berpendidikan dan tidak mengerti isi dan makna akte tersebut karena tidak bisa bahasa Belanda. Namun sejak itu perjanjian dipegang teguh oleh rakyat petani kerena siapa yang melawan dan menanyakan haknya dianggap pemberontak atau ekstrimis di lain pihak Belanda melakukan sewa tanah pegaraman (dikenal perjanjian 50 th) dengan alasan demi kepentingan negeri saat itu dan akan dikembalikan kepada petani lagi, tapi realitanya setelah Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata rakyat petani tetap tidak diuntungkan kerena kerakusan penguasaan wakil-wakil rakyat berlomba untuk memiliki hamparan tanah dengan penuh rekayasa atas dalih demi kepentingan negara yang sedang membagun perekononnian dan moderenisasi sistem pertanian bersama-sama kaum kapitalis, konglomerat, penguasa dan politisi berlomba dengan penguasa atau pemerintah.

Pada era rezim Orde Baru seputar tahun 1975 masyarakat kembali meminta haknya atas tanah sesuai perjanjian 50 Tahun kepada pemerintah juga tidak didengar bahkan terjadi intimidasi dan pembusukan dengan dalih PKI, maka terjadilah perampasan kembali dengan alasan tanah pegaraman dibutuhkan negara (PT.Garam) untuk keperluan modernisasi berdasarkan SK.1222 Tanggal 29 Oktober 1975 dan pembebasan tanah (Istilah Madura

Tanah Patok) melalui Permendagri No. 15 Th 1975 dan pencabutan SK melalui surat PT. Garam No.370 tanggal 10 Mei 1976 yang tidak pernah ditunjukkan kepada masyarakat serta tidak adanya musyararah secara baik tentang tata cara pembebasan serta ganti rugi saat itu penuh rekayasa kerena surat PT.Garam No.370 baru diketahui masyarakat pada th. 1984 juga alasan yang irasional dari PT.Garam, dimana Penguasaan Tanah tersebut merupakan penerus Perusahaan Garam peninggalan Belanda hal ini secara samar tapi nyata dan tegas ia mengakui prilaku Kolonial atau penerus penjajah Belanda.

PT.Garam juga mengklaim tanah pegaraman di Madura (Sampang, Pamekasan dan Sumenep) telah berbadan hukum berupa Sertifikat Hak Pakai merupakan bukti tertulis yang kuat dan sah secara hukum. Dalam hal ini Penguasa Sipil / ABRI dan POLRI haruslah jeli dan tidak sepihak dalam penanganan kasus *reclaiming* petani garam di Sampang kerena persoalan tanah *(Land Rights)* merupakan persoalan hak asasi manusia, yang dijamin dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2003, dan UU No.5 Tahun 1960, serta dijamin oleh *International Covenant on Economic Social and Cultural Right (ICESCR*-1996), yang menuntut pertanggungjawaban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak tanah rakyat, khususnya bagi petani garam yang tanahnya dirampas. Atas dasar pengaduan dari PT.Garam dan atas nama hukum dan dalih pengamanan aset negara dari pengrusakan oleh rakyat maka ditangkapi masyarakat yang mau mengambil tanahnya sendiri di negeri sendiri dengan cara yang kurang arif dan bijaksana dengan digelandang diatas truk-truk hasil pemberian dari uang Rakyat, dengan kekuatan penuh 2 SSK dibantu oleh Mobil Unit Patroli Polsek sekabupaten Sampang bahkan di Mapolres Sampang telah siap BKO dari satuan BRIMOB Polwil Madura hanya untuk menghadapi lebih kurang 300 petani yang menuntut haknya mulai lelah melalui Birokrasi yang panjang baik di Pemda Tk.II, Tk I Jatim bahkan dipusat selalu dipimpong dari Instansi yang satu ke instansi lainnya. Ironisnya setiap delegasi petani dipanggil didalamnya sudah ada orang PT. Garam mendahului di dalam. Selain itu adanya oknum PT. Garam menjual air tanpa masuk ke dalam pembukuan dan pendapatan perusahaan juga adanya penyimpangan terhadap Sertifikat Hak Pakai dimana pengelolaannya tidak sesuai kerena lahan yang ada semua tidak digarap

bahkan disewa-sewakan dan diberikan kepada 3 Oknom kepala Desa berpuluh-puluh hektar agar membantu dan mengintimidasi rakyat yang menuntut, kenapa hal ini polres Sampang tidak bertindak cepat menangani kasus ini. Sangat sedih dan malang nasib petani garam dimana kasus 14 Juli 2003 di kota Sampang telah terjadi penangkapan kepada 150 petani yang terdiri dari 37 perempuan dan anak-anak dibawah umur dan yang sangat prihatin terhadap mereka yang kebetulan lewat dijalan termasuk tukang ojek ditangkapi serta digelandang ke mapolres dijemur ditengah lapangan dengan dada telanjang tanpa alas kaki. Juga keesokan harinya untuk makan pagi diberikan tengah hari dan 34 resmi ditahan dengan dakwaan tersangka tindak kriminal sedang sisanya dipulangkan.[34]

Reclaiming yang dilakukan oleh petani garam adalah suatu upaya petani garam untuk membangun usaha pegaraman yang kini justru dikelola oleh PT. Garam dimana tata niaganya rusak, harga garam terpuruk akibat permainan PT. Garam dengan pihak importir garam luar negeri, utang membengkak dan petani garam makin terseok-seok kerena harus menanggung beban bayar hutang PT.Garam yang dibebankan kepada Negara, sehingga langkah petani garam selain memperjuangkan kembalinya hak tanah sekaligus membangun usaha pegaraman masa depan bukan merusak seperti yang dituduhkan oleh PT.Garam selama ini.

E. Kronologis Peristiwa Penangkapan, Penahanan dan Penyiksaan terhadap Petani Garam

Kasus penangkapan petani garam ini bermula dari aksi pendudukan warga tiga desa yaitu desa Ragung, Apaan dan Pengarengan terhadap lahan tambak garam yang dikuasai PT. Garam seluas 1200 ha yang diyakini oleh warga tanah leluhur mereka. Pendudukan atau yang disebut dengan *reclaiming* dilakukan 3 kali. Dari keterangan saksi-saksi terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Saat *reclaiming* yang pertama pada tanggal 30 Juni 2003 pukul 07.00 sekitar 400 warga desa Apaan, Pangarengan dan Ragung, berusaha

[34] Wawancara dengan Hisyam, pada tanggal 29 Mei 2004 di Torjun, Sampang.

menduduki lahan pegaraman akan tetapi aksi tersebut dihalau pihak keamanan yang sebelumnya sudah berjaga-jaga di sekitar lahan. Saat itu hampir saja terjadi bentrok fisik antara warga dan.aparat keamanan. Akan tetapi hal itu tidak sampai terjadi dikarenakan warga akhirnya dibubarkan secara paksa oleh aparat.

2. Aksi lanjutan dilakukan 2 hari kemudian yaitu pada tanggal 2 Juli 2003 pukul 09.00 warga kembali turun ke lahan. Saat itu terjadi ketegangan antara warga dengan aparat. Pada saat terjadi ketegangan, di tempat lain terjadi penangkapan terhadap tokoh - tokoh masyarakat, yaitu H. Hisyam, Ja'far, Shodiq, H. Dhofir. Para tokoh tersebut sebelumnya dijanjikan akan diajak berunding dengan pihak PT Garam oleh pihak kepolisian. Akan tetapi mereka malah diintrograsi oleh polisi di Kantor Polres Sampang . Sampai pada akhirnya massa di lahan membubarkan diri karena mendengar perintah dari H. Hisyam sebagai tokoh penggerak agar massa membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing
3. Setelah sempat tenang selama hampir 2 minggu, pada tanggal 14 Juli 2003 massa turun kembali melakukan *reclaiming* atas lahan penggaraman. Hampir sekitar 300 orang, tua-muda baik laki-laki maupun perempuan turun bersama menduduki lahan. Aksi tersebut dimulai pukul 06.00 bahkan ada beberapa orang yang memulai pada pukul 05.00 pagi. Aksi *reclaiming* tersebut diawali dengan menjebol tanggul atau pematang lahan penggaraman. Pada pukul 09.00 pihak keamanan dari polres Sampang datang dan menghentikan aksi warga tersebut. Pada akhirnya seluruh massa yang berada di lahan ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Sampang dan kemudian diperiksa.

Photo 7: Demo Warga Menduduki Ladang Garam.
Sumber : Koleksi dari GRPT

4. Pada tanggal 15 Juli tepatnya dinihari ada sebagian warga yang sudah dipulangkan khususnya anak-anak dan wanita. Akan tetapi mereka menolak apabila hanya dibebaskan sebagian. Mereka meminta agar seluruh warga bisa dibebaskan Tuntutan pun disampaikan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kantor Polres sampai semua kerabat mereka dibebaskan. Akan tetapi pada siang harinya sudah banyak warga yang sudah bersedia pulang setelah diberi uang saku oleh pihak kepolisian. Namun dari ratusan orang yang tadinya ditahan, ada 34 orang yang tetap menjadi tahanan di kantor polisi, selebihnya sudah dipulangkan.
5. Selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata dari penuturan para saksi mata telah terjadi penyiksaan pada tanggal 14 Juli malam hari terhadap warga yang bernama H. Nurhayat yang dilakukan oleh 5 orang tak dikenal memakai baju preman. Tidak diketahui apakah kelima orang tersebut anggota kepolisian atau bukan. Yang jelas itu terjadi di saat korban, H. Nurhayat selesai diperiksa oleh petugas di ruang Intelkam

Polres Sampang. Kejadian ini diakui sendiri oleh korban ketika dipertemukan dengan penasehat hukumnya di ruang Kasat Reskrim Polres Sampang Iptu Anwar Munajah. Ketika kuasa hukum dari H. Nurhayat meminta *visum et repertum* kepada pihak petugas, pihak kepolisian tidak bisa mengabulkan dengan alasan perlu biaya untuk memanggil dokter. Ketika kuasa hukum mau menanggung biaya dokter pihak pihak kepolisian masih tetap belum bisa mengabulkan *visum et repertum* dengan alasan harus izin Kapolres sedangkan Kapolres tidak bisa ditemui dengan alasan sibuk dan harus pergi ke Ketapang.

6. Sampai pada keesokan harinya polisi masih menolak usulan untuk *visum et repertum*. Pada tanggal 17 Juli 2003 tahanan sebagian besar telah dipindahkan ke Rutan. Hanya 3 orang saja yang masih ditahan di Polres. Sedangkan untuk makanan keluarga tahanan terpaksa mengirim makanan ke rutan karena pihak rutan tidak menyediakan makanan bagi tahanan.

F. Dampak : Warga Ragung, Pangarengan, dan Apaan, Tuntut Lahan Garam 1.200 ha

PT. Garam Madura kembali didemo warga. Setelah Sumenep dan Pamekasan, kini giliran sekitar 1.000 warga tiga desa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Pembebasan (GRPT), unjuk rasa ke kantor Pegaraman III dan DPRD Sampang.

Mereka yang berasal dari Desa Apaan. Ragung dan Pangarengan, Kecamatan Torjun, Sampang tersebut menuntut areal 1.200 hektare (ha) lahan yang dikelola Pegaraman III yang berada di tiga desa itu. Mereka mengklaim tanah itu milik leluhurnya, sehingga harus dikembalikan kepada ahli warisnya.

Demo mereka ke Pegaraman III berlangsung 0,5 jam, untuk memasang spanduk berukuran 1,16 x 5 meter di luar pintu halamnan kantor. Spanduk bertuliskan *Hentikan segala aktivitas pada tanah milik rakyat, Cabut klaim atas penguasaan tanah dan kepada rakyat.*

Photo 8: Demo menuntut pengembalian lahan yang dikelola Pegaraman III.
Sumber : Koleksi dari GRPT

Dalam aksi itu, warga yang melakukan demo tidak mengadakan dialog dengan pihak PT Pegaraman III. Dengan menggunakan ikat kepala putih bertuliskan GRPT, mereka kemudian menyerahkan tiga berkas itu kepada Kepala Pegaraman III Sampang. Berkas itu diantaranya berisi sejarah penguasaan tanah dan tuntutan warga.

Dari kantor Pegaraman III, mereka dengan menumpang sejumlah truk, colt station Wagon dan pick up, menuju Monumen Trunojoyo di Jl Trunojoyo Sampang untuk menggelar orasi. Kemudian mereka jalan kaki sejauh 1,5 km menuju kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut H. Hisyam, Koordinator Umum GRPT, apa yang mereka lakukan bukan main-main, karena warga punya saksi hidup dan data letter B, surat pembayaran pajak dan peta tanah buatan Belanda, termasuk akte pembeasan tanah tahun 19361937. Bahkan sekitar 200 warga Desa Pangarengan, Apaan, dan Ragung yang sebagian besar ibu-ibu, juganglurug kantor DPRD dan Pemkab Sampang. Warga menuntut agar 34 suami mereka

yang ditahan Polres Sampang dibebaskan tanpa syarat. Sambil berorasi memprotes tindakan aparat, ibu-ibu itu membentangkan spanduk bernada protes, "Suami kami tidak bersalah. Mereka hanya menuntut haknya agar dikembalikan. Karena itu, tolong lepaskan mereka. Kasihan anak-anak kami!" Setelah puas berorasi di halaman kantor dewan, massa kemudian berdialog dengan wakilnya di DPRD Sampang di ruang rapat paripurna. Waktu itu hadir Ketua Komisi A Faidhol Mubaroq, SAg, Ketua F-Gabungan Abdus, Syakur, Mahfudz, Mayor (TNI) Catur W dan K.H. Umar Faroeq dari FKB. Selain, menuntut agar 34 suami mereka dibebaskan, warga mendesak komisi A mengeluarkan rekomendasi pada gubernur Jatim agar lahan garam milik leluhur mereka dikembalikan. [35]

Mereka juga mendesak BPN menganulir sertifikat kepemilikan PT Garam (persero). Sekitar pukul 10.15, massa mendatangi kantor pemkab dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, mereka berorasi sambil membentangkan puluhan poster bernada protes. "Suami kami bukan pencuri Pak! Tolong jangan disiksa,"

Sesampainya dikantor pemkab, mereka berkumpul persis di depan pintu gerbang. Sambil melanjutkan orasinya, 241 orang perwakilan warga diterima Wabup Dr. H. Moh. Said Hidayat, M.Sc. dan Sekdakab Drs. H.. Moh. Asyhar MM di aula utama. Tampak hadir Asisten II Drs. H. Moh, Yazid, MM, Faidhol Mubaroq S.Ag dan wakil BPN Sampang,

Orasi ibu-ibu ini menjadi pusat perhatian pegawai pemkab dan para tamu. Sebab, tanpa malu-malu mereka memanggil nama Bupati Drs. H. Fadhilah Budiono agar mau melepaskan suami mereka. Tolong Bapak Bupati, bebaskan suami kami. Mereaka bukan mencuri. Justru yang mencuri tanah kami adalah PT. Garam.

Selanjutnya GRPT minta rekomendasi ke DPR Jawa Timur. Sebanyak 25 orang petani garam yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Tanah (GRPT.) mendatangi kantor dewan, sekitar pukul 10.00 18 Desember 2002. Mereka mendesak agar dewan merekomendasi GRPT ke DPR Jawa Timur dan mempertanyakan solusi dewan dalam memperjuangkan aspirasi mereka.

---

[35] Wawancara dengan H. Hisyam pada tanggal 29 Mei 2004 di Torjun, Sampang.

Selama berada di kantor wakil rakyat, mereka diterima oleh M. Faidhol Mubarok SAg, Ir Puji Raharjo, KH Umar Faruq, dan Nuruddin JC di ruang Komisi E. Kepada mereka, Faidhol mengaku kesulitan mempertemukan Pihak GRPT dengan PT Garam "Sudah tiga kali kami mencoba menjadual pertemuan itu, tapi pihak PT Garam sulit dihubungi,"

Yang menarik, dalam perternuan itu Sekretaris FKB Ir. Puji Raharjo menawarkan usulan agar petani garam mengajukan permohonan hak kelola. Tapi, usulan tersebut ditolak mentah-mentah. Mereka tetap ngotot menuntut tanah pegaraman itu kembali utuh. Usulan yang disampaikan Puji itu bukan tidak beralasan. Sebab, berdasarkan data-data yang diperkuat dengan surat dari kepala desa, dijelaskan bahwa tanah tersebut sebelum tahun 1938 adalah tanah GG atau tanah negara. "Karena data-data yang dimiliki oleh PT Garam cukup kuat, maka minta agar GRPT mengumpulkan juga data-data yang dimiliki," Mengetahui harapan mereka duduk satu meja dengan PT Garam semakin sulit, maka Koordinator GRPT H Hisyam justru mempertanyakan sejauh mana kerja dewan dalam menindaklanjuti aspirasi mereka. Bahkan, GRPT juga mempertanyakan perihal beberapa anggota dewan yang di undang PT Garam. GRPT mendesak agar tanah pegaraman itu dikembalikan lagi pada rakyat. Sebab, secara historis, tidak ada ceritanya penjajah Belanda, memiliki tanah pegaraman tanpa melakukan tindak kekerasan dan penipuan. "Tanah itu diambil oleh penjajah dengan memakai cara-cara kekerasan dan penipuan. Bahkan, pada saat itu, ada beberapa pemilik tanah yang dibuang ke Digul.[36] Sampai sekarang persoalan ladang garam tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan.

[36] Keterangan didapat dari wawancara dengan H. Hisyam, pada tanggal 29 Mei 2004, di Torjun, Sampang.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Pada bab-bab terdahulu telah diuraikan tentang berbagai hal yang menyangkut Madura secara umum dan juga tentang gejolak sosial yang terjadi di daerah Madura khususnya Sampang. Oleh karena itu dalam bab ini akan berisi simpulan dari uraian yang telah ada sebelumnya. Masyarakat Madura, pada dasarnya adalah masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam budaya masyarakat setempat. Hal itu tercermin dalam pandangan masyarakat Madura dalam penghormatannya kepada *buppa - bhabbhu, ghuru, rato* (ayah ibu, guru dan ratu). Falsafah hidup yang demikian menunjukkan sifat orang Madura yang sangat menghargai kepada kedua orang tuanya yakni ayah dan ibu, selain itu juga sangat menghormati para guru mereka. Guru dalam itu adalah para ulama yang telah memberikan ilmu agama bagi mereka. Adapun ratu, adalah para pemimpin formal yang duduk dalam pemerintahan.

Ulama, menjadi panutan masyarakat baik dalam urusan sehari-hari ataupun dalam hal politik praktis. Peran ulama yang begitu besar pada masyarakat Madura tersebut terjadi melalui proses sejarah yang panjang, dimulai dari masa kerajaan-kerajaan. Transformasi peran mereka dari para pemimpin keagamaan pada masa kerajaan-kerajaan ke pemimpin masyarakat pada masa kolonial, dan akhirnya menjadi pemimpin politik pada masa kemerdekaan. Bahkan sampai kini peran ulama lokal bagi masyarakat Madura melebihi para pemimpin formal.

Masyarakat Madura menjunjung tinggi rasa harga diri. Sebab-sebab yang dapat mengusik harga diri yang dijunjung tinggi tersebut, antara lain adalah masalah istri atau kehormatan perempuan, tanah, leluhur, agama, dan juga air. Apabila harga dirinya terusik, mereka merasa dilecehkan atau dihinakan status sosialnya.

Terkait dengan upaya pemerintah membuat waduk di daerah Banyuates yang pada awalnya untuk mensejahterakan penduduk, namun dalam prosesnya mengalami 'insiden' yang cukup mengejutkan banyak pihak.

Peristiwa itu bermula dari pengukuran tanah milik penduduk tanpa izin dari si pemilik dan juga tidak adanya dialog yang tuntas menyebabkan warga diliputi rasa resah. Mereka melakukan demo menolak pengukuran tanah, hingga terjadi peristiwa naas. Pembangunan waduk tersebut akhirnya ditunda, akibat adanya insiden Nipah yang menelan beberapa korban. Insiden tersebut menunjukkan bahwa seringkali pemerintah tidak melibatkan rakyat dan juga tokoh masyarakat setempat (ulama) dalam proses perumusan kebijakan publik. Padahal, pembangunan waduk itu, rakyatlah yang akan kehilangan tanahnya. Dalam kasus yang berbeda, yakni di daerah ladang garam, pemerintah juga membuat industrialisasi yang mengesampingkan keberadaan rakyat.

Caracara represif diterapkan oleh pemerintah atas nama pembangunan untuk mendapatkan lahan yang akan dipakai untuk pembangunan phisik. Dari dua kasus yang terjadi di Sampang , Madura, dapat ditemukan beberapa tindakan yang bersifat menekan rakyat, antara lain dalam bentuk, intimidasi dan teror, penangkapan, pembuangan, sampai pada kekerasan phisik atau dengan senjata yang mengakibatkan beberapa korban tewas. Perlakuan aparat yang muncul dalam tindakan kekerasan yang menyudutkan rakyat tersebut, telah menimbulkan aksi yang responsif. Aksi sebagai bentuk perlawanan itu bermotif untuk mempertahankan diri, antara lain tercermin dalam bentuk menolak pengambilan atau pengukuran tanah (baik di Waduk Nipah maupun di ladang garam) yang dilakukan dengan demo dan orasi, menuntut mengembalian tanah (di ladang garam), melakukan aksi delegasi ke lembaga politik (di Waduk Nipah maupun ladang garam), meminta bantuan LBH, LSM atau Kommas HAM, dan juga menggugat ke pengadilan. Di samping itu ada pula tindakan kekerasan phisik yang dilakukan penduduk, yaitu dengan merusak tanggul di daerah ladang garam.

Gejolak sosial yang terjadi di Sampang, khususnya Waduk Nipah, walaupun bersifat lokal, namun akhirnya mencuat menjadi kasus nasional, bahkan internasional. Hal itu tidak lepas dari peran klas menengah yang turut membantu dalam proses penyelesaian gejolak-gejolak sosial tersebut. Di samping itu adalah juga karena keterlibatan para ulama yang *notabene* banyak dari mereka yang berkecimpung dalam dunia politik. Peran mereka baik kelas menengah maupun para ulama Sampang, turut menentukan jalan dalam

proses advokasi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan oleh tim maka dengan melihat karakteristik masyarakat Madura, ada beberapa catatan yang bisa dirokomendasikan terkait dengan model pembangunan bagi masyarakat Madura agar kerusuhan sosial bisa dihindari, yakni

1. Pembangunan, modernisasi, industrialisasi atau apapun namanya, bagi masyarakat Madura haruslah yang 'islami' dan tidak menyinggung budaya lokal mereka. Di samping itu, pembangunan atau modernisasi tersebut juga tidak menyinggung harga diri mereka.
2. Dalam setiap prosesnya, masyarakat hendaknya diberi pengertian dahulu tentang rencana dan manfaat dari 'proyek' yang akan dikerjakan.
3. Terkait dengan karakteristik masarakat Madura yang sangat loyal pada ulama, maka dalam setiap proses 'pembangunan' atau memperkenalkan Madura dengan sesuatu yang baru bagi penduduk, hendaknya ulama selalu diajak berembug. Hal itu menjadi sebuah "keharusan", karena para ulama atau kyai lokal bisa menggerakkan massa.
4. Pembangunan atau industrialisasi bagi masyarakat Madura bukanlah sesuatu yang dihindari, tetapi industrialisasi atau pembangunan itu haruslah yang bisa mengangkat harkat dan mensejahterakan mereka. Di samping itu pembangunan itu haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang telah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat.
5. Pemerintah dalam kasus Nipah dan ladang garam, menyelesaikan pertikaian atau konflik antara pemerintah dan petani menggunakan pendekatan legalistik dalam hal pengakuan kepemilikan tanah. Sementara itu di masyarakat yang sebagian besar masyarakat 'kecil' itu menganggap tanah yang 'dimilikinya' itu adalah sebagai *tanah posaka* yang harus mereka jaga keberadaannya. Dalam kasus itu petani memakai pendekatan budaya yang 'melekat' pada kehidupannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pemerintah juga mau sedikit melihat masalah kultural yang dijalani oleh masyarakat Sampang.

6. Dalam setiap proses pembangunan, apalagi itu menyangkut kepentingan publik, hendaknya masyarakat yang akan terkena objek diajak berdialog, selain itu juga tokoh masyarakat dan juga LSM yang *concern* pada masalah tersebut.
7. Kekuatan bersenjata, hendaknya jangan dulu dibawa ke dalam setiap masalah konflik, sebab hal itu akan menambah 'beban' bagi masyarakat yang sedang mengalami konflik. Pendekatan yang lebih 'ramah' seperti dialog akan lebih mengena. Apalagi untuk daerah yang mempunyai budaya lokal yang kuat seperti Madura, dimana masyarakat sangat menghormati ulama atau kyai maka upaya pendekatan yang 'islami' dan merakyat akan lebih berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Madura dalam Selayang Pandang*. Sumenep: Adikarya, 1971.

Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rejim Kembar di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Agus Basri, " Setelah Mereka Belajar Dari Peristiwa Dili", *Tempo,* 16 Oktober 1993.

Ahmed K. Soeriawidjaja, dkk., "Setelah Pertemuan dengan Jenderal Tanjung", *Tempo,* 23 Oktober 1993.

Aloysius Gunadi Brata, " Konflik di Masa Krisis: Studi Empiris determinasi Ketidakadilan Sosial Ekonomi" dalam *Analisis CSIS* Tahun XXXI/2002 No. 3 (Jakarta: CSIS, 2002).

Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa. Relasi Hubungan Pusat Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726 1745)* (Yogyakarta: Jendela, 2003).

Andi Widjajanto dan Laila Hasnah, "Gelombang Kekerasan di Indonesia Sebagai Masalah Fenomenologis" dalam *Analisis CSIS* , tahun XXXI/ 2002 No. 3 (Jakarta: CSIS, 2002).

Andik Hardiyanto, dkk., *Insiden Nipah: Sengkok Cinta Tang Disa Ma'e Tembak.* Surabaya: Lembaga Bantuan hokum Surabaya-Direktorat Operasional LBHI Jakarta, 1995.

Anonim, *Jawa Timur Membangun. Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat II se-Jawa Timur.* Surabaya: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 1993.

A.R. Udin Adinegoro, dkk., *Atlas Indonesia dan Semesta Dunia.* Jakarta: Djambatan, 2002.

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan 1921 1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan) Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 10.* Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978.

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan Abad XVII.* Bandung: Mizan 1994.

Badan Pusat Statistik, *Jawa Timur Dalam Angka 2002*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jatim, 2001.

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sumenep dalam Angka 2000*. Surabaya: Badan Pusat Statistik, Jatim,2001.

Braam, W. van, " Een en Ander over de Zoutaanmaak der Bevolking op Madoera", *Koloniale Studien I*, 1917

Bruinessen, Martin van, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kekuasaan Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS, 1999.

Budiono, "Tradisi Nyadar bagi Masyarakat Pingirpapas di Madura", dalam Soegianto, *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*. Jember: Tapal Kuda, 2003.

Burger, DH., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Djakarta: Pradnja Paramita, 1957.

Colombijn, Freek dan J. Thomas Lindblad (eds), *Root of Violence in Indonesia* Leiden ;KITLV, Press, 2002.

Detikcom, 10-9-2000.

Dijk, Kees van (ed.), *A Cross Madura Strait: The Dynamics of an Insular Society* Leiden: KITLV Press, 1995.

Dinas Pariwisata, *Jawa Timur: Madura Pulau Pesona*. Surabaya: Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, 1992.

Forum, 17 September 2000.

Heddy Shri Ahimsa - Putra, "Pluralitas Budaya dan Kekerasan Massal: Apakah Hubungannya? *Makalah*. Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2001.

Jaarverslag van de Dient der Zoutverpakking Jaarverslag 1910-1911. Batavia: Landsrukkerij, 1912.

Jalil Hakim,dkk., "Sang Calo dan Ganti Rugi Pak Bupati", *Tempo*, 23 Oktober 1993.

Jalil Hakim,dkk., "Nek Rakyat Njaluk Adu Medun", *Tempo*, 23 Oktober 1993.

Jonge, Huub de (ed.)., *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi. Studi studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Jonge, Huub de, *Madura dalam empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam Suatu Studi Antropologi.* Jakarta: KITLV-LIPI- Gramedia, 1989.

Kemp, P.H. van der, *Handboek tot de Kennis van 'sLands Zoutmiddel in Nederlandsch-Indie, Eene Economisch-Historisch Studie.* Batavia: G. Kolff & Co, 1894.

"Ketika Kiai Jadi Selender", *Tempo,* 16 Oktober 1993.

Kompas, 8 Februari, 1996.

Kuntowijoyo, "Agama Islam dan Politik: Gerakan-gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura, 1913 1920" dalam Huub de Jonge, *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi.*

Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris. Madura 1850 1940* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).

Kusnadi, " Tradisi Rokat Pangkalan di Pasean Madura", dalam Soegianto (ed), *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masarakat Madura.* Jember: Tapal Kuda, 2003.

Laporan Yayasan Al-Jihad. 1999.

Laporan Tim Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Tanah (GRPT), Desa Ragung, Pangarengan, dan Apaan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. 2003.

Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura.* Yogyakarta: LKiS, 2002.

"Menanti Kelahiran Komisi Penegak Konflik Agraria", *Kompas,* 25 Juni 2004.

Mitchell, Bruce, dkk. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan* Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2000.

Moh. Anshori Taufig Rizqon, " Mengapa Sampang Rentan Konflik Kepentingan", *Jawa Pos Radar Madura,* 12 September 2000.

Mohtar Mas'oed , dkk., (ed.), *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu* Yogakarta: P3PK UGM, 2001.

Muthmainnah, *Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi* Yogyakarta: LKPSM, 1998.

New Oxford Dictionary, *The New Oxford Dictionary of Ingslish.* Oxford: Claredon, 1998.

Nordholt, Henk Schulte. "A Geneology of Violence", dalam Freek Colombijn and J. Thomas Lindblad (eds.), *Roots of Violence in Indonesia. Contemporary violence in historical perspective.* Leiden: KITLV Press, 2002.

Ody, "Pengukuran Tanah Sepihak Resahkan Warga Banyuates", *Kompas,* 17 September 1994.

Parwoto, "Monopoli Garam di Madura 1905 1920" *Thesis*, Pascasarjana UGM 1996, belum diterbitkan.

P. Bambang Wisudo, "Catatan Akhir Tahun Di Bidang Politik dan Hukum-Konflik dan Kekerasan yang Tak Kunjung Padam", *Kompas,* 16 Desember 2003.

Pranata Ssp., "Peninggalan Purbakala Madura", *Berita Buana,* 26 April 1975.

Pranata Ssp., "Purbakala Sampang", *Berita Buana,* 8 Juli 1975.

Ritzer, George *Modern Sosiological Theory.* Singapore: McGraw-Hill Book Co, 1992.

Riwanto Tirtosudarmo, " Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah", dalam Analisis CSIS Tahun XXXI/ 2002 No. 3 Jakarta: CSIS, 2002.

Sejarah PN Garam. Belum diterbitkan, tt. tp.

Selo Soemardjan, "Konflik-Konflik Sosial di Indonesia: Refleksi Keresahan Masyarakat", dalam *Analisis CSIS* Tahun XXXI/2002 no. 3. Jakarta: CSIS, 2002.

Soetrisno R, "Topeng Dhalang Madura", dalam Syamsuri, *Madura V: Kumpulan Makalah Lokakarya Penelitian Sosial Budaya Madura.* Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1981.

Staatblad van Nederlandsch Indie, 1882.

Surabaya Pos, 10 9-2000.

The Jakarta Post, 20 December 1994.

Toriq Hadad, dkk., "Nyo'on Odik, Lalu Robohlah Mereka", *Tempo,* 9 Oktober 1993.

Toriq Hadad, dkk., "Harga Satu Nyawa dan Sepuluh Waduk", *Tempo,* 16 Oktober 1993.

Touwen Bouwsma, Elly "Kekerasan di Masyarakat Madura", dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi. Studi-studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura.* Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Touwen Bouwsma, Elly "Kepala Desa Madura: dari Boneka ke Wiraswasta", dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi. Studi-studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura.* Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

"Warga Nipah Mengadu ke Komnas HAM Aparat Keamanan Harus Bisa Menahan Diri", *Merdeka,* 20 Desember 1994.

W. Nitisastro, *Populations Trends in Indonesia.* Ithaca: Cornell University Press, 1970.

Zamakhasari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai.* Jakarta: LP3ES, 1982.

"Zaman Berubah Tuntutan Berubah", *Tempo,* 10 Oktober 1993.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : K.H. Alawy Muhammad
   Umur : 72 tahun
   Pekerjaan : pemilik pondok pesantren
   Alamat : Sampang, Madura
2. Nama : Ir. Agus
   Umur : 45 tahun
   Pekerjaan : Kepala pelaksana pembangunan waduk Nipah
   Alamat : Surabaya
3. Nama : H. Cholil
   Umur : 48 tahun
   Pekerjaan : PNS
   Alamat : Sampang, Madura
4. Nama : Drs. Bambang Nusirwan
   Umur : 50 tahun
   Pekerjaan : Kepala BPN Sampang
   Alamat : Sampang, Madura dan Surabaya
5. Nama : Matsari
   Umur : 44 tahun
   Pekerjaan : Petani
   Alamat : Banyuates, Sampang, Madura
6. Nama : H. Abdul Aziz
   Umur : 48 tahun
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Alamat : Banyuates, Sampang, Madura
7. Nama : Osman
   Umur : 24 tahun
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Sampang, Madura dan Jombang
8. Nama : H. Hisyam
   Umur : 64 tahun
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Alamat : Torjun, Sampang, Madura

9. Nama : Drs. Bambang Samsu
   Umur : 46 tahun
   Pekerjaan : Dosen Universitas Jember
   Alamat : Jember
10. Nama :
   Umur : 50 tahun
   Pekerjaan : Kesra Banyuates
   Alamat : Banyuates, Sampang
11. Nama : Sahil
   Umur : 42 tahun
   Pekerjaan : Petani
   Alamat : Banyuates, Sampang
12. Nama : Wajahari
   Umur : 40 tahun
   Pekerjaan : Petani
   Alamat : Banyuates, Sampang
13. Nama : H. Ahmad
   Umur : 53 tahun
   Pekerjaan : Petani
   Alamat : Torjun, Sampang
14. Nama : Samsuri
   Umur : 48 tahun
   Pekerjaan : Petani, Kyai Lokal
   Alamat : Sampang, Madura
15. Nama : Sutrisno
   Umur : 53 tahun
   Pekerjaan : PNS staf BPN Sampang
   Alamat : Kantor BPN Sampang

MADURA

Skala 1: 850.000

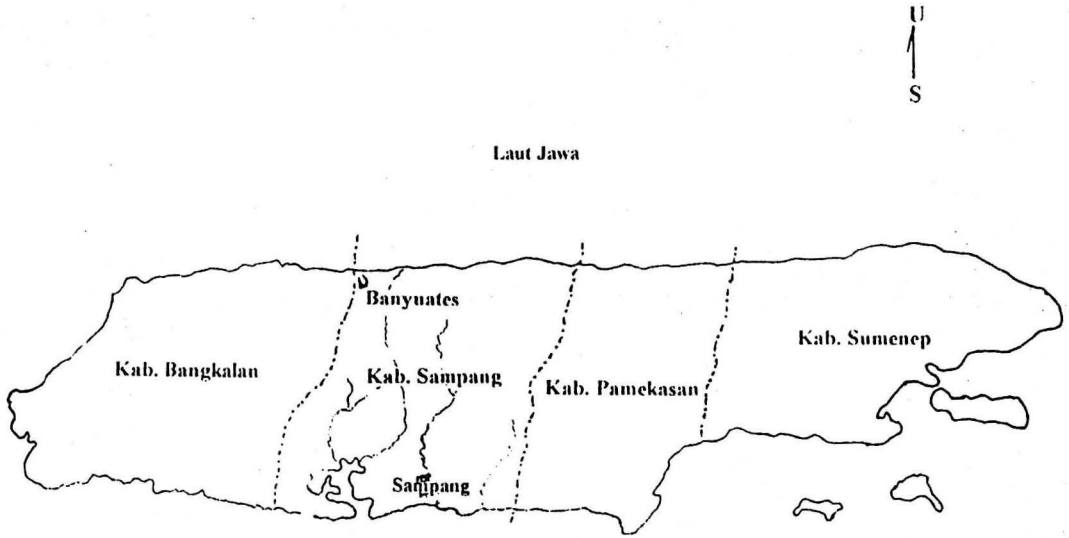

(Sumber : Atlas Indonesia Dan Semesta Dunia,2002:41)

KABUPATEN SAMPANG

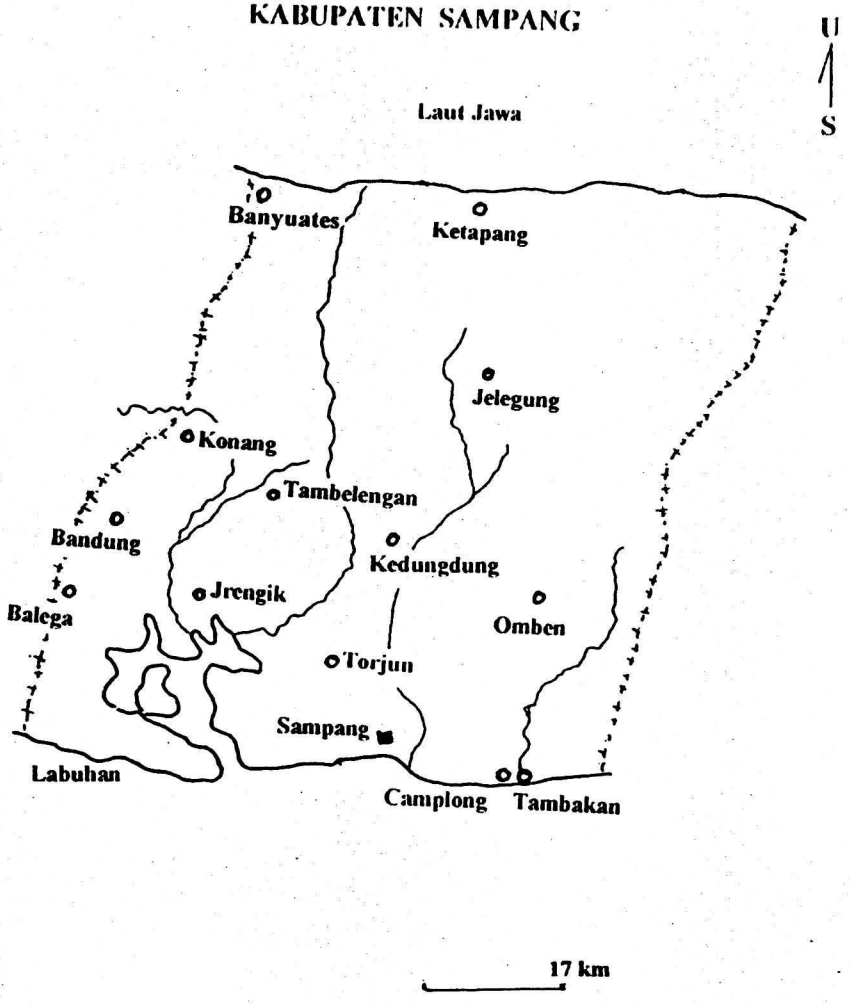

(Sumber : Atlas Indonesia Dan Semesta Dunia, 2002:41)

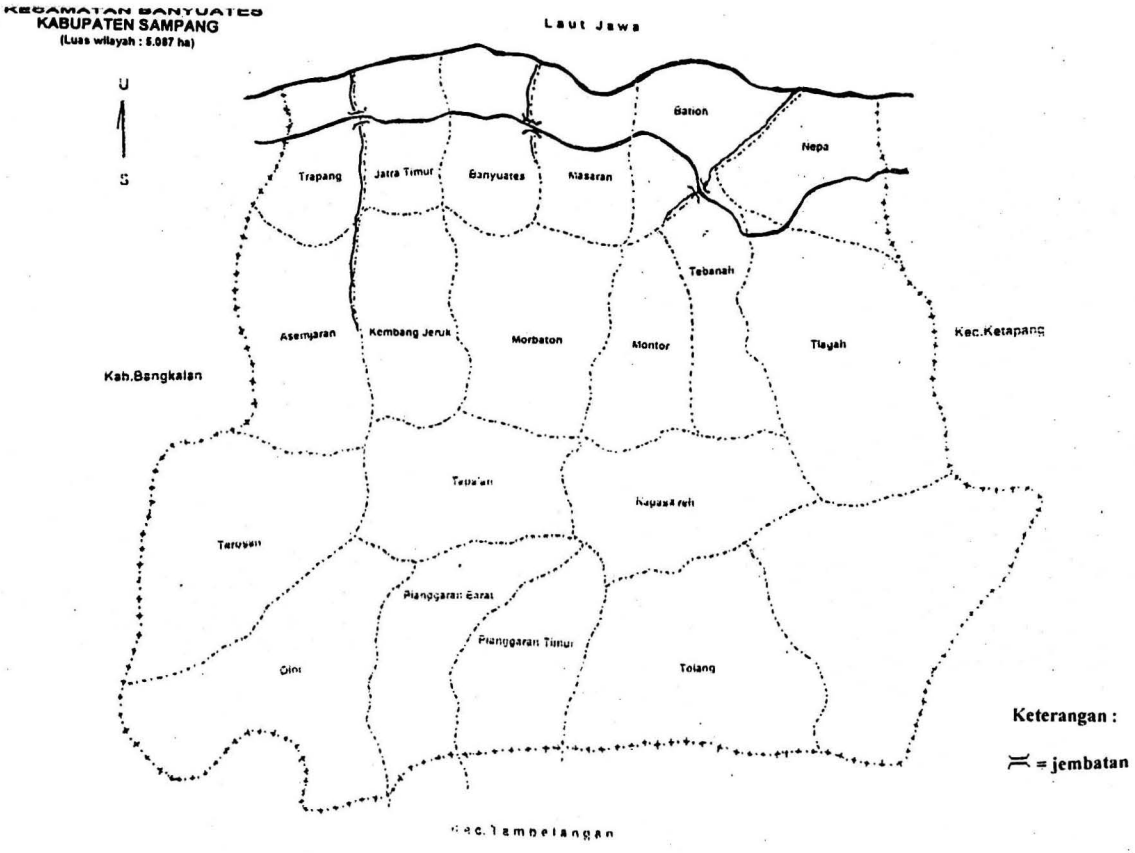
KECAMATAN BANYUATES
KABUPATEN SAMPANG
(Luas wilayah : 5.087 ha)
U
S
Laut Jawa
Batioh
Nepa
Trapang
Jatra Timur
Banyuates
Masaran
Tebanah
Asemparan
Kembang Jeruk
Morbaton
Montor
Tlayah
Kec.Ketapang
Kab.Bangkalan
Tanjung
Kapasareh
Tarobah
Planggaran Barat
Planggaran Timur
Olor
Tolang
Keterangan :
= jembatan
Kec.Tambelangan

DENAH KASAR
LOKASI WADUK NIPAH

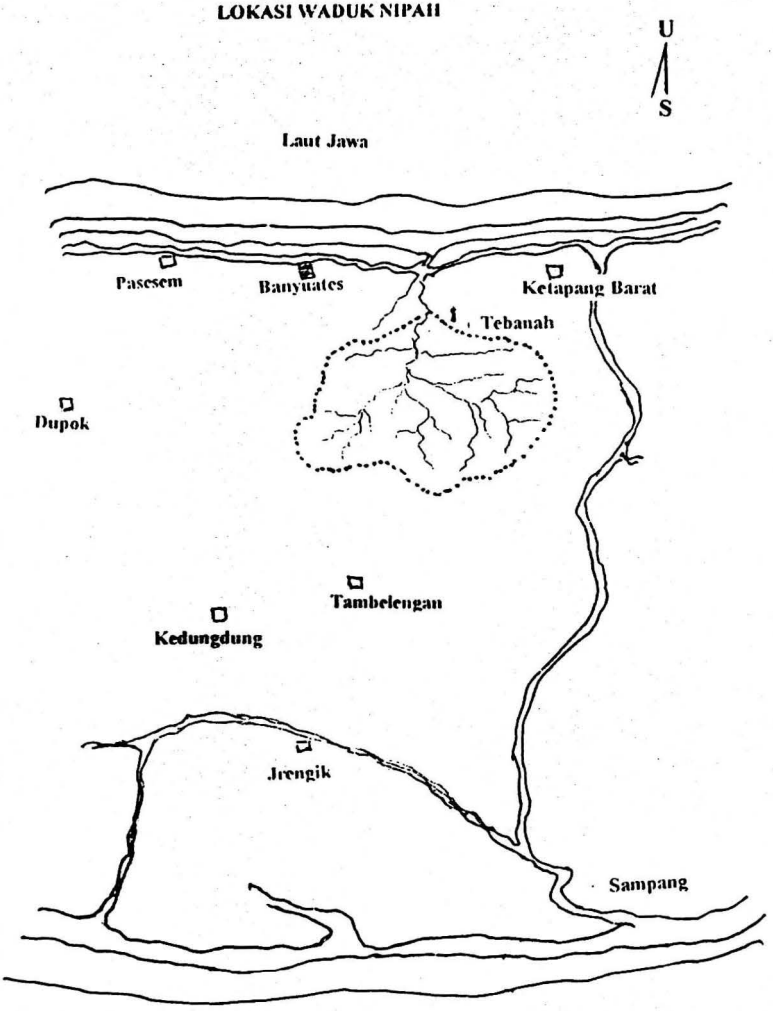

(Sumber : Insinden Nipah,1995)

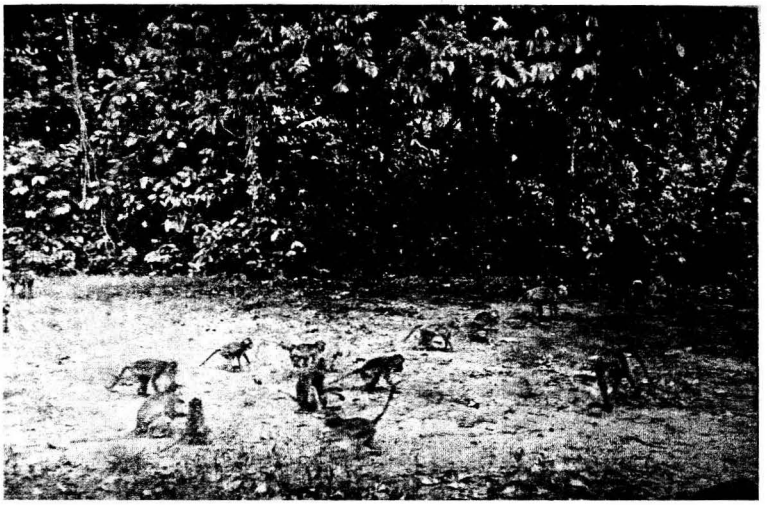

Kawasan Hutan Nipah

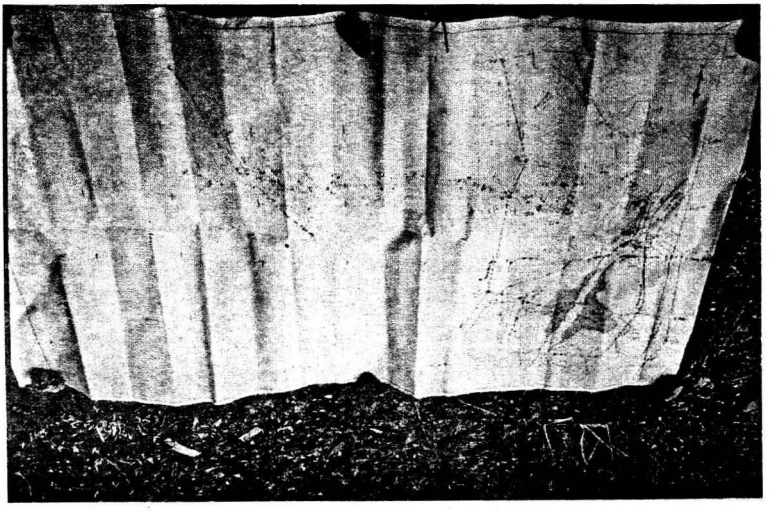

Rencana Pembangunan Waduk Nipah
Sumber : PT. Waskita Karya

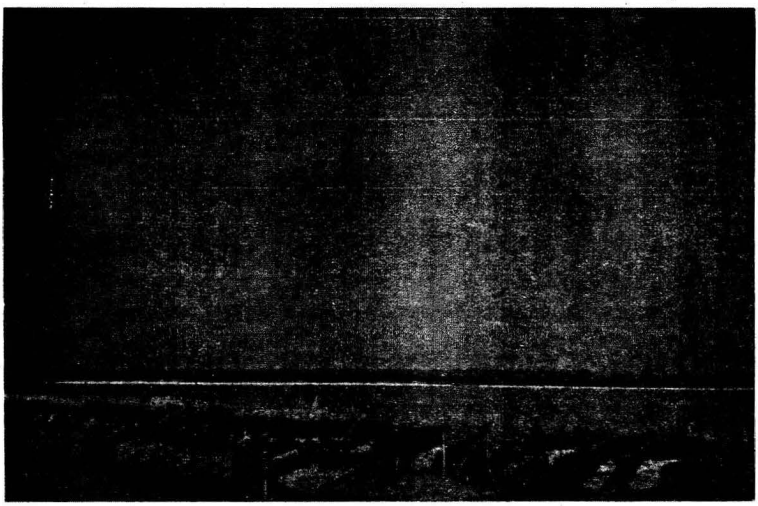

Ladang Garam di Torjun

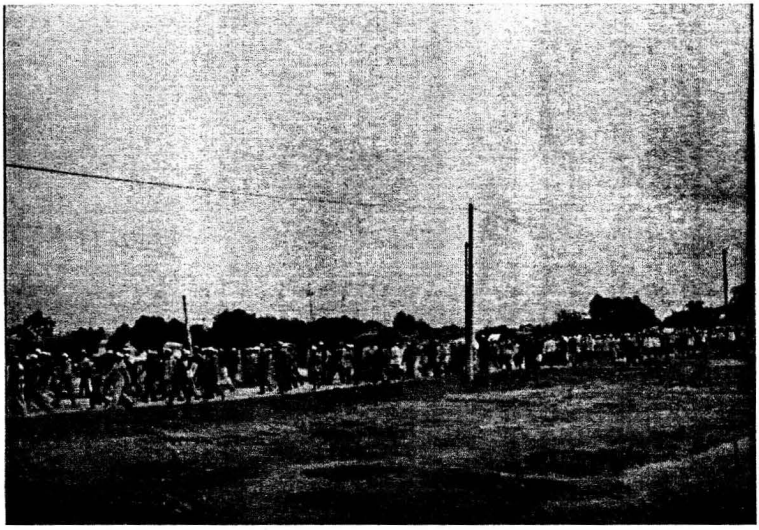

Demo Warga Torjun Menuju Kantor DPRD
Sumber : Koleksi GRPT

Demo Warga Torjun Menuntut Tanag Ladang Garam milik Warga
Sumber : Koleksi GRPT

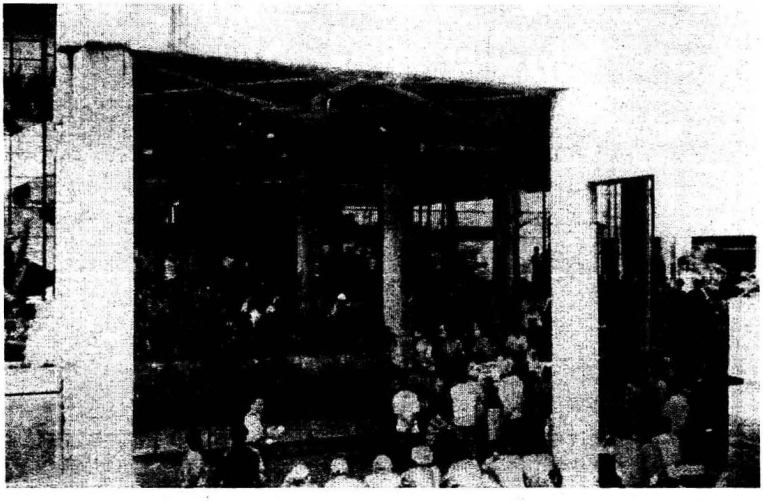

Demo Petani Garam Warga Torjun di Kantor Gubernur, Surabaya, Jawa Timur
Sumer : Koloksi GRPT

Demo I Warga Torjun Ke Sampang diikuti sekitar 1500 orang
Sumber : Koleksi GRPT

Demo II Warga Torjun Ke Sampang diikuti sekitar 1500 orang
Sumber : Koleksi GRPT

Demo Warga Torjun menuju Sampang diikuti sekitar 600 orang (Demo ke 5) Sumber : Koleksi GRPT

Demontrans memasang spanduk di Kantor Bupati Sampang Sumber : Koleksi GRPT

Perpusta
Jender
3

ISBN : 979-8971-35-3